

BAB 5

FAKSIONALISASI INTERNAL PPP, PAN DAN PKS DI MALUKU UTARA

5.1. Penyebab Faksionalisasi Internal PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara

Hasil penelitian tentang dinamika faksionalisasi dalam internal PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara. Faksi sebagai bentuk pengelompokan dalam internal partai yang menimbulkan dampak bervariasi. Pembahasan dengan menggunakan teori Boucek (2009; 2011; 2012) bahwa faksionalisasi disebabkan oleh 4 faktor yaitu (1) keberhasilan partai dalam pemilu dan daya Tarik bagi calon politisi dan persaingan personal; (2) Heterogenitas, Konflik Ideologi dan Resiko Perpecahan; (3) Perebutan Posisi Kunci yang Terbatas untuk Menunjang Politik Karir; (4). Motivasi Kesejahteraan dalam Dilema Kolektivitas Partai Vs Individu. Ketiga partai dalam dinamika faksionalisasi berbeda dalam respons terhadap perpecahan menempuh rute yang berbeda. Tiga bentuk wajah yang muncul adalah faksi kooperatif, faksi kompetitif dan faksi degeneratif.

Penggunaan Teori Faksionalisme partai politik di level lokal ini untuk kesesuaian antara teori dengan hasil temuan berdasarkan data wawancara dan penelurusan dokumentasi. Penulis mempertimbangkan kesesuaian empat indikator faksionalisme: (1). heterogenitas, konflik ideologi dan resiko perpecahan, (2) perebutan posisi kunci partai yang terbatas untuk menunjang politik karir, (3) motivasi Kesejahteraan dalam dilema kolektivitas partai vs individu, dan (4). keberhasilan partai dalam pemilu dan daya tarik bagi calon politisi dan persaingan internal.

Pertimbangan ini berdasarkan kecenderungan faksi partai di Maluku Utara menjadikan jabatan partai sebagai pintu masuk

dalam arena persaingan internal menghadapi serangkaian Pemilu dan Pilkada/Pilgub. Jabatan partai yang diperebutkan berbagai faksi sebagai unsur terbatas dan menentukan kebijakan partai. Faksionalisme persaingan internal elite partai sebagai faktor dominann dari faktor penyebab lainnya.

Rangkaian faksi awalnya dimulai dari heterogenitas etnis dan agama memungkinkan timbulnya gesekan ketika kelompok bertindak kolektif atau lebih terbatas. Faksi termovitasi mengejar keuntungan dan berusaha mengendalikan sumberdaya partai dengan cara menguasai tampuk kepemimpinan partai. Perebutan posisi kunci partai dapat menjadi penyebab kerjasama (*kooperatif*), kompetitif dan degeneratif atau menghancurkan kekuatan partai karena terjadi polarisasi dan pembelahan. Perebutan posisi kunci partai juga sebagai salah satu motivasi untuk mengendalikan sumberdaya partai dan peluang dalam rekrutmen elite dan pemilu.

Rivalitas dan rute faksi PPP, PAN dan PKS menggambarkan bentuk komparasi antar faksi dan aktor di internal partai. Pengorganisasian dan motivasi ekonomi faksi juga menganalisis beberapa kasus di partai dengan menggunakan tipologi Bettcher (pola faksi klientelisme dan patronase, kecenderungan, kepentingan dan prinsip). Poin ini berusaha untuk menemukan peta baru tentang faksi partai politik Islam di Maluku Utara. Bagaimana keterlibatan dan dinamika actor faksi dengan konstituennya atas fungsi partai politik yang diembannya. Klasifikasi tipologi aktor dalam pengorganisasian dan motivasi Bettcher akan membantu menguraikan pola PPP (Faksi Konservatif dan faksi Pembaharuan); PAN (Faksi Ideologis, Faksi Pengusaha dan Faksi Profesional); Faksi PKS (Faksi Idealis, Faksi Pragmatis, dan Faksi Kaum Muda PKS) .

5.1.1 Heterogenitas, Konflik Ideologi dan Resiko Perpecahan

Heterogenitas dimaknai sebagai beragamnya dinamika budaya, etnis dan agama dan struktur sosial dalam ruang politik yang plural. Heterogenitas ideologi partai yang dominan dan berkuasa akan meningkatkan tekanan konflik terhadap klaim kebijakan ideologis dominan akan sangat beresiko terpolarisasi dalam bentuk faksi. Kajian ini menguraikan sisi heterogenitas berbagai faksi yang terbentuk ketika sebagai respon terhadap perbedaan kepentingan dan kebijakan di internal partai.

Fokus kajian heterogenitas faksi tidak terlepas dari kultur demografi etnis di Maluku Utara bahwa di tengah dominannya mayoritas Muslim 76%, tidak satu pun Etnik yang dominan di Maluku Utara dari 28 suku dan etnik. Persentase etnik yang relatif berimbang dapat dilihat dari angka statistik BPS tahun 2010 yaitu Tobelo 10,78%, Galela 9,70%, Ternate 9,40%, Makian 8,51%, Tidore 7.76%, Sula 6,98%, Buton 5,67%, Jawa 4,12%, Sangir 3,04%, Loloda 2,61%, Tobaru 2,24%, Kao 2,15%, Bugis 2,01%, Patani 1,84%, Bajo 1,73%; Lainnya 21, 46% (Ananta, et al., 2015:117). Hal ini mendorong konsentrasi kekuatan politik etnik relatif berimbang dalam motivasi dan distribusi sumberdaya ekonomi (Ananta, 2006).

5.1.2.1. Heterogenitas, Konflik Ideologi dan Resiko Perpecahan PPP

Heterogenitas PPP diwarnai oleh beragamnya latar belakang etnik dan wilayah. PPP adalah partai warisan Masyumi di Maluku Utara. Partai Politik Islam di Maluku Utara dari zaman Orde Lama, pemilu tahun 1955, kekuatan Partai politik Islam Masyumi menang 45 persen di Maluku Utara, sedangkan Parkindo Protestan 22 persen (Alfian 1971:157–60). Pada zaman Orde

Baru, Golkar adalah satu-satunya partai berkuasa melalui doktrin politik rezim yang diperkuat oleh ABRI (TNI) dan Birokrasi Pemerintahan. Sedangkan kekuatan ideologi politik Islam terkonsentrasi di tubuh PPP dibatasi dan diawasi dalam aktivitas politik.

Rusdy Hanafi ketua wilayah PPP sejak Maluku Utara dimekarkan sebagai Provinsi pada 4 Oktober 1999. Basis massa PPP tersebar berbagai daerah, tetapi Etnis Ternate lebih mendominasi penguasaan struktur partai wilayah. Heterogenitas etnis dan ideologi aktor PPP dilatarbelakangi oleh beberapa aktivis Muhammadiyah, HMI dan PII. Kebijakan Rusdi Hanafi dalam mempertahankan dominasi kerabat dan etnik Ternate justru beresiko dalam perpecahan internal. Kohesivitas partai hanya bersifat semu, karena kemampuan Rusdi Hanafi dalam menopang roda partai dilakukan melalui usaha bisnis Kayu sejak tahun 2001.

Personalisasi kepemimpinan partai ini justru tidak menguatkan soliditas internal partai. Dominasi Rusdi Hanafi pada gilirannya tidak menyehatkan organisasi partai karena strukturnya tidak diberikan keleluasaan dalam pengelolaan kebijakan partai. Sebaliknya sikap ini akhirnya mempertajam konflik ideologi antara faksi konservatif yang dikendalikannya dengan faksi pembaharuan yang dimotori Salim (etnik Kayoa), Sadik Diadon (Etnik Tobelo Galela; mengundurkan diri dari PPP), Wahda Dzainal Imam dan Sahril Taher (Etnik Makian; Pindah Ke partai Gerindra pada pemilu 2014, dan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi).

Setelah Pimpinan wilayah dikendalikan oleh Ridwan Tjan beberapa organisasi internal PPP tidak berjalan efektif seperti organisasi sayap partai (1) Gerakan Pemuda Kabah, (2) Wanita Persatuan Pembangunan, (3) Angkatan Muda Kabah, (4). Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI. Konflik dan

perpecahan internal partai telah berdampak pada keberadaan organisasi partai sejak munculnya dualisme kepemimpinan partai. Konflik dan perpecahan internal Pimpinan wilayah PPP Maluku Utara bukan disebabkan oleh faktor tunggal dualisme kepemimpinan PPP di pusat, melainkan juga disebabkan oleh heterogenitas ideologi anggota yang berlatar belakang dari organisasi keagamaan dan kekuatan-kekuatan etnik yang tidak terakomodir secara merata dalam struktur pengurus wilayah. Politik etnik adalah isu sensitif di Maluku Utara.

Pemicu perpecahan etnik dapat dibenarkan karena selama ini kekuatan PPP dikendalikan oleh Rusdi Hanafi, seorang tokoh Muhammadiyah, representasi politisi etnis Ternate dan pengusaha yang sukses. Hal ini dapat dibenarkan melalui semboyan PPP sebagai rumah besar dalam menyatukan kekuatan politik umat Islam. Namun PPP tanpa sadar membenturkan diri antara faksi, tidak cerdas dalam mengelola konflik internal, dan kegagalan sejumlah rencana Islah di Maluku Utara.

Di level Provinsi, tergerusnya suara PPP memperlihatkan ada masalah krusial yang menerpa internal partai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dari ke pemilu, justru PPP semakin ditinggalkan konstituennya. Ridwan Ilyas menegaskan bahwa merosotnya PPP harus ditelusuri akar masalahnya. Akar masalahnya terletak pada konflik internal dan ketidakmampuan partai dalam melakukan kaderisasi partai, pembenahan internal, penertiban administrasi keanggotaan, hilangnya silaturahmi lintas Kabupaten/Kota. Mantan Wakil Bupati Halmahera Tengah ini memberikan saran, agar tirulah pola kepemimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin partai.

“Perpecahan di PPP ini karena lemahnya masing-masing kubu untuk menghayati dan mempraktekkan ideologi Islam sebagai perekat. Sebagaimana kepemimpinan Rasulullah dalam urusan

politik, seperti itu pula seharusnya saudara-saudara pimpinan partai bersikap dewasa. Saya sangat prihatin dengan keberadaan PPP karena Ketua yang baru pak Ridwan Tjan ini tidak mengakomodir melibatkan Salim Halik dalam menentukan formasi pengurus. Akibatnya banyak kader potensi seperti Wahda Imam dan Sahril Taher yang memiliki basis dukungan konstituen yang solid di masyarakat..apalagi saat ini banyak partai politik lainnya yang mengatasnamakan sebagai partai politik Islam. Ini tantangan eksternal yang wajib diatasi. Kepemimpinan politik dalam tradisi Islam itu idealnya mampu menyatukan ummat selama pemimpinnya dapat mengorganisasikan seluruh struktur dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Nilai-nilai Al-Quran tentang amanah, fathanah, Shiddik dan lain sebagainya dalam syarat utama seseorang memimpin partai. Memimpin partai harus mampu mengatur partai. Di masa depan PPP butuh sosok kepemimpinan yang merakyat dengan sifat-sifat tadi yang saya sebutkan itu. *(Wawancara dengan Drs. KH. Ridwan Ilyas, M.Si., Mantan Ketua Fraksi PPP Kab. Halmahera Tengah Tahun 1997-1999; 1999-2004; Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah Tahun 2005-2010; Saat ini sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, 2015-2020 di kediamannya, Ternate, tanggal 17 Agustus 2018).*

Fenomena kontras menyelimuti PPP Maluku Utara yang lebih dikenal sebagai partai keluarga dengan mengandalkan kelompok kekerabatan etnik. Dari sisi banyaknya etnik di Maluku Utara menguatkan politik kekerabatan yang tidak bisa dihindari. Di bawah kepemimpinan Haji Rusdi Hanafi, salah seorang tokoh politik Kota Ternate, pelibatan anak kandungnya, Isa Hanafi sebagai Bendahara PPP memuluskan dan memperkokoh penguatan kekerabatan dalam partai. Namun hal ini justru semakin memperparah kecemburuan kelompok etnik lain yang kurang memiliki akses politik dalam penentuan struktur pengurus, caleg maupun hal-hal lainnya. Hubungan antara faksi berbasis etnik ini kurang terpelihara dengan baik.

Sebagai seorang pengusaha, Rusdi Hanafi mengatur partai ini dari kemampuannya membiayai kliknya di jajaran kepemimpinan. Partai berada ini di bawah kekuasaan uang dan jaringan patronase kekerabatan yang diperoleh melalui usaha-usaha Bisnis Kayu maupun dari konsesi proyek semasa dukungan terhadap Gubernur Maluku Utara 2002-2007 dan 2008-2013. Akibatnya ketergantungan partai pada fugur sangat kental beraroma kekerabatan dan pola politik dinastik. Menjelang berakhirnya jabatan Rusdi Hanafi, PPP tenggelam di bawah bayang-bayang perpecahan internal.

Puncaknya pada Musyawarah wilayah tahun 2013, Salim Terpilih sebagai ketua umum PPP Maluku Utara. Namun di tengah terpilihnya Salim Khalik situasi internal partai tidak harmonis dan kurang direstui oleh Ketua Demisioner Rusdi Hanafi dengan cara mengintervensi PPP yang seharusnya sudah ditinggalkannya karena selesai masa jabatannya. Selama tahun 2013-2016 otomatis mengalami masa konflik internal terparah dalam sejarah dinamika partai berlogo Kabah Hijau Hitam ini.

Tabel 5.1
Etnis, Ideologi dan Jabatan Aktor Faksi PPP

FAKSI	AKTOR	ETNIS	JABATAN
Konservatif	Ridwan Tjan	China Muslim/ Ternate	Wiraswasta; Ketua DPW PPP Malut 2011-2016; 2016-2020; Anggota DPRD Prov. Malut 2014-2019; Caleg DPRD Prov. Malut 2019-2024 (Tidak Terpilih); Rekanan Bisnis dan hubungan kekerabatan dekat dengan Rusdi Hanafi, ketua PPP terdahulu; Garis Politik Orang Tua dari PNI
	Rusdi Hanafi	Arab Ternate	Pengusaha, tokoh Muhammadiyah; Ketua DPW PPP Malut

			dua periode 2000-2004, 2004-2007; pengurus DPP PPP Surya Dharma Ali; Anggota DPRD Prov. Malut 2000-2004; Ketua Tim Pemekaran Provinsi Malut 1999; Wakil Ketua DPRD Prov Malut 2000-2004
	Isa Hanafi	Arab Ternate	Putra Kandung Rusdi Hanafi; Pengusaha; Pengurus DPW PPP Malut; Caleg DPRD Prov. Malut 2009 & 2014 tetapi tidak terpilih;
	Walid Hanafi	Arab Ternate	Putra kandung Rusdi Hanafi; Pengusaha; Pengurus DPW PPP Malut; Caleg DPRD Kota Ternate 2009-2014 tetapi tidak terpilih
Pembahasan	Salim Khalik	Makian	Ketua Pemuda Ka'bah Malut; Ketua DPW PPP Malut 2007-2010 (dikudeta Faksi Konservatif; Ketua DPW PAN Malut Versi Djan Faridz; Anggota DPRD Prov. Malut 2004-2009 dan 2009-2014; Caleg DPR RI 2014 dari PPP
	Wahdah Zainal Imam	Makian	KAHMI, Anggota DPRD Kab. Malut; Anggota DPRD Provinsi Malut 2004-2009; konflik internal dengan faksi Konservatif, pindah ke Gerindra tahun 2014; Anggota DPRD Prov. 2019-2024 dari Partai Gerindra
	Shadiq Diadon	Tobelo	PII, Pengurus DPW PPP Malut 2007-2010 (Bersama Salim Khalik dikudeta Faksi Konservatif; Anggota DPRD Kab Halsel 2004-2009; Pengurus PPP versi Dzan Faridz; Wiraswasta

Sumber: Diolah dari berbagai Media

5.1.2.2. Heterogenitas, Konflik Ideologi dan Resiko Perpecahan PAN

PAN sejak terbentuknya struktur pengurus wilayah Maluku Utara, terbangun berdasarkan semangat majemuk kedaerahan. Platform Partai yang menghargai pluralisme kebangsaan berlaku paradox di daerah. Maluku Utara dihuni oleh berbagai etnik dan pulau, terpolarisasi dalam etnik. Perbedaan etnik, Bahasa, dan keyakinan agama, dan ideologi politik turut membentuk struktur PAN di Maluku Utara. Titik pertemuan heterogenitas etnik lebih dominan dalam struktur PAN. Namun pada perkembangan selanjutnya sepeninggal kepemimpinan Abdurrahim Fabanyo tahun 2010 PAN mulai terpolarisasi ke dalam dua faksi faksi ideologis dan Pengusaha.

Semua orang tahu PAN itu tempat berkumpulnya politisi dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Saya sejak ikut suami, Pak Umar Bobeng beraktivitas di PAN tahun 1999 selalu dinamis. Mungkin karena beragamnya latar belakang ini sehingga kami seringkali bersitegang dengan kubu lainnya. tetapi dulu itu berjalan normal ketika partai ini berada di tangan Ko Im (Pak Abdurrahim Fabano). Saya sendiri merasa terpanggil untuk mengatasi beberapa konflik internal saat saat Ketua Imran Jumadil mulai tidak serius mengurus program kerjanya. Saat itu sebagai ketua umum DPD PAN Kota Ternate melihat kepemimpinannya tidak efektif karena pengurus yang dipilih lebih mementingkan kelompoknya..ini tidak efektif. Menjelang tahun 2011, kepemimpinan Imran Jumadil ditolak oleh teman-teman pengurus DPD lainnya dari Kabupaten dan Kota. Kalau faksi yang bermain di arena kepentingan ini motifnya bermacam-macam. ada karena kepentingan etniknya, kesamaan profesi sebagai pengusaha, ada yang lebih kental dengan mengatasnamakan aktivis Muhammadiyah, ada juga membawa kepentingan karena pertemanannya. Sementara kami juga menghadapi persaingan eskternal dengan partai politik lainnya seperti munculnya Nasdem yang memiliki jargon hamper sama

dengan PAN. Bahkan dalam perkembangannya pada titik klimaks konflik ini, saya memilih meninggalkan PAN dan beralih ke Nasdem membawa seluruh pengurus beralih partai. (HB, 18/08 2018).

Fakta itu membuktikan partai ini menghadapi kondisi yang dilematis dalam menghadapi konflik yang berujung pada berpindahnya beberapa pengurus PAN di wilayah maupun Kabupaten/kota ke Nasdem. Faksionalisasi ini lebih bersifat kolektif karena mempengaruhi sebagian pengurus lainnya. Keterlibatan elite PAN dalam faskionalisasi ini turut berpengaruh terhadap para kader Partai di Level Kabupaten/Kota. Perpecahan sebagai dampak faksionalisasi tersebut tidak berpotensi menimbulkan dampak serius karena tidak melahirkan dualisme kepemimpinan.

Tabel. 5.2.
Heterogenitas Etnis, Ideologi dan Jabatan Aktor Politik PAN

FAKSI	AKTOR	ETNIS	JABATAN
Ideologis	Abdurrahim Fabanyo	Tidore	Ketua PD Muhammadiyah Malut 1997-1999; Ketua DPD PAN Malut 1999 Ketua DPW PAN Malut 2001-2005, Ketua DPW PAN Malut 2005-2010 Anggota DPRD Kab. Maluku Utara Periode 1999-2004, Anggota DPRD Prov. Malut 2004-2009 Cawagub Malut 2007 Caleg DPR RI 2014 dari P. NasdeM
	Sahrin Hamid	Tobelo	Aktivis HMI Jawa Barat; Ketua BM PAN Jawa Barat 1998-2000; Ketua DPP BM PAN 2000-2003; pengurus DPP PAN 2001-2005; Anggota DPR RI 2007-2009; Ketua DPW PAN 2013-2015 Cawagub Malut 2013/2014 Caleg DPR RI 2014 dari PAN

	Ikbal Mahmud	Ternate	Teman Sekolah Sahrin Hamid di Pesantren IMIM Makassar, Sekwil Malut 2013-2015 (Bersama Sahrin Hamid dipecat oleh DPP PAN tahun 2015); Anggota DPRD Kota Ternate hasil PAW atas Husni Bopeng 2013-2014
Pengusaha	Imran Djumadil	Makian	Anggota Golkar tahun 1999; Sekretaris DPW PAN Malut 2001-2010; Ketua DPW Malut 2010-2012 (diberhentikan DPP PAN tahun 2012) Anggota DPRD Prov. Malut 2004-2009; Anggota DPRD Prov. Malut 2009-2014
	Umar Bopeng	Ternate	Ketua Bappilu DPW PAN 2001-2010; Ketua MPW DPW PAN Malut 2013-2017; Anggota DPRD Prov. Malut 2004-2009; Anggota DPRD Prov. Malut 2009-2014
	Husni Bopeng	Ternate	Istri Umar Bopeng, Ketua DPD PAN Kota Ternate; Anggota DPRD Kota Ternate 2009-2014, dipecat pasca konflik internal DPW PAN tahun 2013; Anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019; Anggota DPRD Prov. Malut 2019-2024
	Muhlis Tapi Tapi	Tobelo	Mantan Pjs Ketua PB HMI; Anggota KPU Prov Malut 2 Periode; wakil Ketua PAN Malut; anggota DPRD Prov. Malut 2014-2015 dari P. Nasdem; Wakil Bupati Terpilih Kab. Halut 2015-2020
	Baharullah Karim	Makian	Kerabat dekat Imran Djumadil; Bendahara DPW PAN Malut 3 Periode Caleg DPRD Prov. Malut 2004 & 2009) dari PAN; Caleg DPRD Prov Malut 2014 P. Nasdem
Profesional	Majid Husen	Makian	Eks Sekda Prov. Malut; Ketua DPW PAN Malut 2015-2019; 2019-2023; Caleg DPRD Malut 2019 dari PAN
	Safi Pauwah	Sula	Eks PNS, Sekwil DPW PAN Malut 2019-2023; Anggota DPRD Prov Malut 2019-2024
	Kasman Hi. Ahmad	Tobelo	Pendiri PAN di Maluku Utara; Koordinator Pengungsi Muslim Halut di Ternate 1999-2002; Aktivistis IMM dan Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara; PW. Muhammadiyah Malut; Dosen Negeri IAIN Ternate; Rektor UMMU 2

Sumber: Diolah dari berbagai berita media online dan sumber lainnya

Fenomena lainnya adalah tercorengnya citra PAN sebagai partai yang bersih. Imran Djumadil dalam kepemimpinannya masih menggunakan pola *“one man show”* yang personalistik dalam menjalankan roda kepartaian. Imran Jumadil juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam dugaan suap 7,5 milyar rupiah dalam Proyek jalan Wayabula-Sopi Pulau Morotai dengan anggaran Rp. 100 Milyar tahun 2015. Kasus ini telah mencoreng wajah PAN sebagai partai yang bersih dan anti-korupsi. Kasus ini melibatkan Amran Mustari (mantan Sekda Malut), Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan (politisi PAN) dan salah satu kolega anggota DPR RI PAN.

Sebagai politisi merangkap kontraktor, hal yang sama juga pernah dilakukan dalam bentuk negosiasi PAN dengan kandidat Gubernur sebelum dicopot dari ketua partai. Imran tidak lama memimpin PAN karena digembosi berbagai Pimpinan DPD Kabupaten Kota ke DPP PAN tahun 2012. DPP PAN mengutus Mulharis Harahap dalam menyelesaikan konflik internal. setelah 3 bulan, DPP PAN kembali memberi tugas kepada Sahrin Hamid, pengurus DPP PAN ke Maluku Utara. Sebagai putra daerah, Sahrin menjalankan roda kepemimpinan tahun 2012.

Namun kehadiran Sahrin di Maluku Utara ditantang oleh kolega internal PAN. Ketua MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) Pan Maluku Utara, Umar Bopeng dan Gerbongnya menuduh Sahrin menawarkan PAN kepada sejumlah elite politik daerah menjelang Pilgub Malut 2013. Di tengah perpecahan internal, konflik politik antar Sahrin Hamid dan Umaer Bopeng semakin sengit. Menjelang 3 hari Musywil-Lub dilaksanakan, tindakan

anarkis sejumlah pengurus wilayah, daerah, kader dan simpatisan PAN melakukan pengrusakan dan mengobrak-abrik isi kantor PAN, membakar baliho Sahrin Hamid sebagai bentuk penolakan kepemimpinan Sahrin Hamid yang dianggap otoriter.

Sahrin Hamid tetap menggelar Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Musywil-Lub) PAN Maluku Utara tanggal 25 Januari 2013 di Kabupaten Pulau Morotai. Sahrin Hamid terpilih sebagai ketua PAN yang baru. namun kubu Umar Bopeng menolak hasil Musywil-Lub dan melaporkan ke DPP PAN. Hasil laporannya ditindaklanjuti. PAN kembali menggelar Muswil di Kota Ternate menghasilkan Sahrin Hamid terpilih sebagai ketua partai. Pada Pilgub 2014, Sahrin berpasangan dengan Muhajir Albaar (pensiunan birokrat, Mantan Sekda Malut) namun hasilnya sangat mengecewakan karena perolehannya suaranya berada pada posisi terakhir dari 5 pasangan calon.

Menjelang Pemilu 2014 saya dan pengurus PAN Kota Ternate memilih pindah ke Nasdem..ini dampak dari musyawarah luar PAN Wilayah pada awal tahun 2013 yang lalu. Saya merada tidak nyaman lagi berada di PAN pada situasi yang agak sulit menghentikan langkah ini.. teman-teman juga merespon keputusan ini dan diikuti oleh beberapa pengurus daerah lainnya seperti dari Tidore, Morotai, Halmahera Utara, Kepulauan Sula. Pada pemilu 2014 alhamdulillah, kami masih terpilih termasuk ibu Nelasari, Yamin Rusli Moti. Demikian pula dari Tidore Muhtar Jumati, dan lainnya. (HB, 12/08/ 2018).

5.1.2.3 Heterogenitas, Konflik Ideologi dan Resiko Perpecahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Keragaman dalam PKS Maluku Utara, selain terdiri dari kumpulan dan latar belakang sosial etnik dan wilayah, partai ini juga memiliki beberapa sumber rekrutmen kader dan anggota partai. Heterogenitas dalam mendapatkan sumber anggota dan kader didapatkan melalui jalur perguruan tinggi dengan

mengandalkan dua organisasi yaitu KAMMI dan LDK-Kampus yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. PKS mengandalkan 3 perguruan tinggi terkemuka sebagai sumber rekrutmen kader dan anggota partai yaitu Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Universitas Khairun Ternate, dan IAIN Ternate, maupun Santri Alkhairat yang tersebar di Kota Ternate, Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepulauan.

PKS memilih sumber-sumber rekrutman anggota partai dari KAMMI dan LDK-Kampus karena dianggap memiliki kesamaan gerakan politik yang bercorak keagamaan. Sedangkan keterlibatan aktivis Al-Khairat yang dimotori oleh KH. Abdul Gani Kasuba dan adik kandungnya Muhammad Kasuba karena keduanya berlatar belakang Pendidikan Islam dari Medinah, Arab Saudi dan Pakistan.

Kader Di level masyarakat, PKS mengandalkan kelompok halaqah sebagai cara merekrut dan mengorganisir berbagai kajian keagamaan yang tersebar di Kota Ternate, Halmahera Selatan, Tidore, Morotai, Kepulauan Sula, Halmahera Barat dan Halmahera Timur. Beragamnya heterogenitas partai ini, PKS memeliharanya dengan nilai-nilai Keislaman dan ukhuwah sosial sehingga organisatoris masih solid. Partai ini mendulang kesuksesan melalui dua kader PKS yang masih bertalian hubungan saudara kandung. Dr. Muhammad Kasuba, MA menang dalam pilkada Halmahera Selatan 2 periode (2005-2010) dan 2010-2015. Kaka kandungnya, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc sukses sebagai wakil Gubernur 2007-2013, Gubernur 2013-2018, serta 2018-2023.

Menurut Saya ada dua hal penting yang akan menjadi batu sandungan bagi kami yaitu fenomena munculnya GARBI (gerakan Arah Baru Indonesia) dan perpecahan tokoh PKS yang masih memiliki hubungan keluarga dan dukungan yang kuat dari pendukungnya. Garbi didominasi oleh sebagian kecil anggota PKS maupun eks PKS yang ditelah diberhentikan permanen pada awal 2018. Nah, eks PKS ini lalu berkumpul dalam Garbi. Ada yang belum berpindah ke partai politik lain, sedangkan sebagian besar sudah memilih beraktivitas di Nasdem. Kemudian faktor lainnya berupa konflik tokoh PKS yang dilatarbelakangi persaingan

keluarga di internal marga Kasuba dalam upaya mendapatkan rekomendasi DPP PKS untuk Pilgub Maluku Utara 2018. Masalah ini kami khawatirkan akan berpotensi memecah belah suara PKS di Kabupaten Halmahera Selatan pada pemilu 2019. Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba sebagai kader PKS telah menyatakan keluar dari partai ini pada awal tahun 2018 ke PKPI setelah DPP PKS tidak memberikan lagi rekomendasi dukungan kepada kadernya, KH. Abdul Gani Kasuba dalam Pilgub Malut 2018. (BK, 14/ 05/2018).

Memasuki tahun 2018, salah satu kader PKS, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah membentuk Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi sebagai faksi baru di kalangan anggota PKS. Faksi ini dianggap sebagai tanda akhir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri mengatakan Garbi lahir dari konflik internal di dalam PKS. Terbentuknya Garbi sebagai kritikan Fahri Hamzah dan kawan-kawan atas yang dinilai tidak bersikap demokratis. Menurut Fahri, Garbi menjadi wadah bagi kader-kader PKS, terutama anak muda, yang merasa tidak cocok dengan kultur PKS. Fahri memandang kader-kader ini adalah mereka yang merasa pendapatnya tidak dihiraukan. Pergolakan di dalam tubuh internal PKS, banyak kader PKS yang mengundurkan diri sebagai calon legislatif, ada pula daerah-daerah yang menyatakan diri mundur secara total. Garbi hanya berbentuk organisasi masyarakat, bukan partai politik namun kelahirannya sebagai bentuk perlawanan dan negosiasi terhadap ortodoksi PKS (Akmar, 2019; Prihutmo et al., 2019).

Faksi Garbi lainnya Mahfudz Siddiq meyakini kaum muda PKS sebagai kekuatan besar arah baru Indonesia yang digagas Anis Matta. Garbi itu adalah kumpulan orang yang mengorganisir diri dan aktivitasnya yang setuju, sependapat dengan ide tentang arah baru Indonesia, dan berupaya memperjuangkan ide-ide melalui sebuah wadah. Jika dianalisis pernyataan Mahfudz Siddiq ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk faksi prinsip (faction of principle) yang memiliki motivasi dan kecenderungan (tendency) dalam mengejar patronase dalam skala kelompok internal PKS yang kalah dalam setiap suksesi kepemimpinan dalam PKS.

Beberapa aktivis PKS Maluku Utara Mohdar Bailusi dan Saiful Ahmad memosisikan sebagai oposisi PKS yang dekat Fahri Hamzah dalam gerbong Garbi. Mohdar Bailusi adalah anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019 yang memilih pindah ke Hanura dalam daftar caleg anggota DPRD Kota Ternate. Demikian pula Saiful Ahmad adalah mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2009-2014. Perjalanan karir politiknya semakin redup setelah mengalami konflik internal dengan Husni Salim salah satu kader PKS dalam pencalonan DPR RI Dapil Maluku Utara tahun 2014. Munculnya Garbi di Jakarta mendorong Saiful Ahmad dan Gerbong oposisi PKS di Maluku Utara memanfaatkan faksi ini.

Saiful Ahmad memilih bergabung dengan Garbi setelah tidak diberi ruang lagi untuk beraktivitas di PKS, termasuk dicoretnya nama Saiful Ahmad dari daftar calon sementara (DCS) PKS dalam Pileg 2019. Demikian pula, beberapa eks pengurus PKS di Provinsi maupun Kabupaten/kota merasa perlu ada wadah organisasi yang sosial baru yang dapat menyatukan kegelisahan dan keresahan akibat teralienasi dari aktivitas kepartaian. Di Maluku Utara, Mohdar Bailusi sebagai salah satu aktor pembentukan Garbi Maluku Utara. Sedangkan Ketua Dewan Pembina di bawah kendali Alimin Muhammad. Beliau adalah mantan ketua DPW PKS Maluku Utara 2010-2015 yang tidak terpilih dalam pemilihan ketua yang baru. Meskipun masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota DPRD Fraksi PKS 2014-2019, pilihan pada Garbi sebagai bentuk solidaritas dan rasa kesetiakawanan sesama aktivis dan eks aktivis PKS yang sudah berada di luar aktivitas partai.

“Bahkan PKS di Maluku Utara tidak sepi dari faksi-faksi yang saling berbeda dalam gagasan, strategi maupun kebijakan internal. Ada dua bentuk faksi dalam internal PKS yaitu antara Faksi yang memiliki akses pada kekuasaan pemerintahan daerah dan faksi yang sama sekali yang tidak memiliki akses sam sekali. Faksi yang mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan daerah yaitu Abdul Gani Kasuba, Muhammad Kasuba, Bahrain Kasuba, Rufiati, Zulkifli

Haji Umar, Basri Kanaha, Is Suaib, Muhjir Nabi, Jufri Ade, Cahyo Adi. Sedangkan faksi yang tidak berkuasa antara lain Muhdar Hasanat, Saefudin Soleman, Husein Said, Asnawi Lagalante, Alimin Muhammad, Saefudin Soleman, Kusnandar, Isnain Bailusi, Hardani Pora, Sodikun, Masita mamole, Julfa Jen, Halima Hasan, Sobirin, termasuk saya sendiri. Selain itu dalam perbedaan usia menggiring PKS dalam dua kelompok usia. Lebih dikenal dengan PKS kaum Tua dan PKS kaum Muda. Dalam geopolitik, PKS dapat dikelompokkan dalam sub faksi Etnik Tobelo Galela, Etnik Makian Kayoa, Etnik Ternate, Etnik Tidore dan Etnik pendatang Jawa. Beberapa aktivis PKS Etnik Tidore lebih bersifat pragmatis dalam mengambil memanfaatkan perbedaan kepentingan. Selain itu beberapa anggota PKS yang datang dari Jawa an telah hidup menetap di Maluku Utara memiliki basis yang jelas”. (SA, 23/10/2018).

Basis konstituen PKS sebagian juga bersumber dari perantauan sukses pedagang dan petani transmigran Jawa di Pulau Halmahera. merupakan modal kuat bagi para Dai PKS asal Jawa. Kedekatan Dai PKS Jawa lebih instentif dilakukan dengan elite partai inti dalam dakwah dan dukungan politik.

Tabel. 5.3.
Heterogenitas Etnis, Ideologi dan Jabatan Aktor Politik PKS

FAKSI	AKTOR	ETNIS	JABATAN
Pragmatis	Abdul Gani Kasuba	Tobelo	Ulama/ Dai Populis sejak zaman Orde Baru; Pendiri Ormas Alkhairat; Ketua Parta Keadilan Kab. Malut tahun 1998; Anggota DPR RI Partai Keadilan tahun 1999-2004; anggota DPR RI PKS 2004-2007; Terpilih sebagai Wagub Malut 2007-2013; Gubernur Malut 2014-2019; Gubernur Malut 2019-2024
	Bahrain Kasuba	Tobelo	Ayahnya saudara sekandung dengan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba; Ketua DPRD Kab. Halsel 2004-

			2009 dan 2009-2014; Anggota DPRD Prov. Malut 2014-2015; Terpilih sebagai Bupati 2015-2020; Dipecat dari PKS setelah persaingan internal antara kedua Pamannya AGK Vs MK; Ketua PKPI Kab, Halsel 2018-2022; Calon Bupati Halsel 2020-2025
Idealis	Muhammad Kasuba	Tobelo	Anggota DPRD Maluku dari PK tahun 1999-2000; setelah Maluku Utara dimekarkan Provinsi, sebagai anggota DPRD Prov. Malut 2000-2004; Terpilih sebagai Bupati Kabupaten Halsel selama 2 periode (2005-2010 & 2010-2015); Calon Gubernur 2018 tetapi kalah bersaing dengan kakak kandungnya, AGK; Caleg DPR RI 2019 dari PKS tetapi tidak terpilih
	Husni Salim Kasuba	Tobelo	Ketua STA Labuha; Ayahnya saudara kandung dengan AGK, MK dan ayah kandung Bahrain Kasuba; Anggota DPRD Kab. Halsel 2004-2009; ketua PKS 2018-2022; Ketua Tim Pemenangan Pilgub MK Maju 2018; Caleg DPR 2014 (tidak terpilih); Caleg DPRD Prov. Malut 2019 tetapi tidak terpilih.
	Bassam Kasuba	Tobelo	Putra Kandung Muhammad Kasuba; Caleg DPRD Prov. Malut 2019 tetapi tidak terpilih
	Alimin Muhammad	Loloda	Ketua PKS 2007-2011 & 2011-2016; Wakil Ketua DPRD Prov. Malut 2009-2014, Anggota DPRD 2014-2019;
	Ridwan Muhammad	Jailolo	Ketua PKS Provinsi Malut 2016-2020 ; Anggota DPRD Kab. Halbar 2004-2009; Caleg DPRD Prov. Malut 2019 tetapi tidak terpilih.
Kaum	Saiful Ahmad	Makian	Pengelola Pendidikan Yayasan Al-Bina

Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita.

5.1.2 Motivasi Kesejahteraan dalam Dilema Kolektivitas Partai Vs Individu

5.1.2.1. PPP

Motivasi kesejahteraan PPP mengalami masalah pada menurunnya kolektivitas partai politik ketika kesuksesan kepemimpinan partai sejak ditinggalkannya Rusdi Hanafi tahun 2013 silam. Dorongan mengejar kesejahteraan partai pada umumnya dilakukan melalui relasi partai dan pemerintah lokal dalam bentuk konsesi proyek maupun akumulasi dari sumbangan anggota partai yang di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. sebagaimana dijelaskan pada beberapa poin sebelumnya, dilema kolektivitas dalam PPP mulai tidak harmonis lagi sejak dilengserkannya ketua terpilih, Salim Khalik.

Tindakan ini dilakukan oleh DPP PPP atas intervensi mantan Ketua PPP Provinsi sebelumnya, Rusdi Hanafi yang tidak menginginkan Salim Halik sebagai ketua Partai. DPP PPP menggantikan Ridwan Tjan sebagai ketua PPP Provinsi Maluku Utara sampai saat ini. Sebagai seorang pengusaha kayu dan kontraktor, Rusdi Hanafi dianggap sangat berjasa dalam membesarkan PPP selama ini. Kemampuannya dalam membiayai kebutuhan partai di sisi lain telah menciptakan ketergantungan partai terhadap kepentingan Rusdi Hanafi.

Saat berakhirnya masa jabatan ketua partai, PPP provinsi masih di bawah kontrol Rusdi Hanafi melalui ketua Ridwan Tjan yang diangkatnya melalui SK DPP PPP setelah berhasil

menurunkan Salim Halik dari kursi ketua partai. Selain itu, kedua Putranya Isa Hanafi dan Walid Hanafi masuk dalam pengurus partai. Dukungan ini diberikan sebagai bentuk keberlanjutan kepentingan kerabat Rusdi Hanafi dalam PPP.

“Dorongan dan motivasi kesejahteraan ini tidak bisa kami pungkiri dalam berpartai. Tidak ada politisi yang beraktivitas di dunia politik itu dengan penuh kesukarelaan tanpa mengharapkan apapun berupa kekuasaan, jabatan, uang dan akses politik yang besar ketika itu. Saya masih ingat bahwa Rusdi Hanafi semasa kepemimpinannya memiliki akses melalui jatah dan konsesi Proyek pemerintah daerah. Dan ini tindakan ini sangat beresiko pada perpecahan internal partai karena Rusdi Hanafi memiliki kelebihan harta dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Dengan kelebihan uang ini, PPP itu sebenarnya milik Rusdi Hanafi, dan selama kepentingannya tidak diakomodir maka siap-siap berhadapan dengan segala upayanya, dan Salim Halik menjadi korban intervensi yang dilakukannya saat itu. Stigma PPP tidak lebih dari kumpulan keluarga Rusdi Hanafi yang telah keluar dari kolektivitas partai juga menurut saya masih relevan. Maka kami disingkirkan dari struktur partai yang baru, dan ini akan menyulitkan PPP pada pemilu berikutnya. Jika pada pemilu 2014 hanya menyisakan 1 kursi, saya tidak dapat membayangkan bagaimana ujung eksistensi PPP di Maluku Utara jika seandainya pada pemilu 2019 PPP sama sekali tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi. Kepentingan individu telah mengalahkan kepentingan kolektif partai lalu bagaimana bisa partai ini akan kembali meraih kejayaannya seperti padamasa awal Reformasi? Saya bukan tidak menginginkan kepemimpinan Ridwan Tjan gagal tetapi justru pola kepemimpinannya yang akan merusak kekuatan partai ini. (SD, 19/06/2018).

Motivasi kesejahteraan telah mendorong konflik antar dua faksi dalam internal PPP. Faksi konservatif lebih diuntungkan dalam akumulasi kesejahteraan karena berlatar belakang pengusaha. Sedangkan Faksi Pembaharuan lebih berorientasi pada kesatuan nilai partai. Kepentingan yang berlebihan dalam Kesejahteraan telah memantik faksi tercerabut dari ciri khas awal sebagai sebuah kekuatan yang kolektif berubah ke orientasi individu.

Logika tentang kesejahteraan ekonomi seringkali digunakan oleh elite politik yang tidak memiliki kemampuan dalam manajerial partai politik secara profesional dan modern di PPP. Sedangkan hengkangnya beberapa tokoh berpengaruh PPP ke partai lain juga sebagai bentuk pencarian sumber kesejahteraan yang lebih mudah dan kooperatif diperoleh di partai lain. Praktek monopoli kekuasaan dan kebijakan internal partai berimbas pada buruknya hubungan dan komunikasi politik yang menyebar ke berbagai daerah. Kegagalan PPP yang terbesar adalah kegagalan mendongkrak perolehan kursi di DPRD provinsi. Selain itu, sebagai partai lama yang berdiri tahun 1977, PPP kehilangan citranya sebagai partai rumah besar umat Islam. Para elite yang sudah terbiasa berada dalam kepentingan individu, telah kalah bersaing dengan partai yang memiliki symbol dan gerakan yang sama seperti PBB, PKS maupun PAN.

5.1.4.2. PAN

Motivasi partai sebagai agregasi kepentingan mendapatkan tempat dalam dinamika politisi PAN. Bahkan sejak terbentuknya struktur wilayah, PAN secara berimbang dikendalikan oleh para pencari rente proyek dan klik kekuasaan di pemerintahan daerah. Partai sebagai perantara negosiasi. Sejak hadirnya kelompok ini dalam fungsi-fungsi kepartaian, politisi pengusaha memanfaatkan partai ini lebih dari batas normal. Kesibukan yang menguras waktu dan dana untuk mengurus sejumlah proyek pemerintah sambil membangun kekuatan politik di PAN. Berlimpahnya jatah proyek, memberikan peluang besar bagi politisi pengusaha mengawinkan dua kemampuan politik dan ekonomi. Keuntungannya dijadikan modal besar dalam ongkos politik. Politisi pengusaha seperti Umar Bopeng dan Imran Djumadil adalah contoh politisi PAN yang berkontribusi dalam membantu

keuangan di partai. Keduanya berfungsi sebagai penyuplai dana operasional partai. Tetapi kepentingan individu akan menguat terhadap pembiayaan pemilu. Dengan uang yang dimilikinya, para politisi pengusaha lebih mudah membeli suara (politik transaksional).

Munculnya Sahrin Hamid sebagai pengganti Ketua DPW PAN Imran Djumadil saat itu kami sambut baik karena bertujuan untuk mengembalikan eksistensi PAN ke platform perjuangannya. Meskipun Imran berada pada gerbong yang sama dengan kumpulan pengusaha yang berada di dalam PAN namun hal ini saya nilai perlu ada keseimbangan peranan sehingga tidak terkesan PAN sebagai partainya pengusaha. Bahkan kami ingin menghapus penilaian orang lain tentang pragmatismenya politisi PAN di Maluku Utara yang identik dengan kumpulan pengusaha tadi. Ada Asrul Sani di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). yang lainnya termasuk Imran Djumadil, Umar Bopeng, Baharullah Karim, Ghazali Abdul Muttalib, Rafel Sofyan dan nama-nama lainnya yang berada dalam struktur PAN namun disibukkan dengan aktivitas bisnis dan proyek. Pada umumnya mereka beralasan mengejar kesejahteraan dan keuntungan finansial itu untuk membiayai program kerja PAN di Maluku Utara. (IM,11 /07/2018).

Kekalahan faksi pengusaha pada pemilihan ketua PAN tahun 2013, berakibat pada menurunnya aktivitas bisnis. menjelang tahun 2014, Faksi Pengusaha pindah ke Partai Nasdem. Selama ini faksi pengusaha mengandalkan kemampuan uang dan modal, kedekatan dengan pemerintah, sedangkan faksi ideologis lebih menjaga ideologi PAN sesuai dengan platformnya. Perbedaan orientasi kesejahteraan antara faksi ideologis dan faksi pengusaha yang lebih pragmatis ini menyulitkan PAN menjaga kolektivitasnya. Perpecahan tidak bisa dihindari setelah Musyawarah Wilayah luar biasa pada desember 2012 dan peburari 2013. Kalangan Faksi ideologis beranggapan para pengusaha PAN hanya menjadikan partai sebagai alat dalam

negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan proyek yang menguntungkan kelompoknya. Pada umumnya faksi pengusaha bergerak dalam dua rutinitas politik dan ekonomi terutama memburu proyek-proyek Milyaran maupun proyek kecil.

PAN sebagai kendaraan politik dalam negosiasi berbagai kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan modal dan pembangunan. Imran Djumadil dan Umar Bopeng meraih dua kesuksesan sebagai pengusaha. Kedua politisi ini pernah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Pemilu 2004 dan pemilu 2009 silam. Pengusaha membutuhkan legitimasi politik melalui penguasaan partai politik. Sistem demokrasi menghendaki demikian. Kesejahteraan yang termanifestasi dalam kehidupannya dikonversikan dengan kemampuan finansial untuk membayar rutinitas politik. PAN dibiayai dari kemampuan para pengusaha. Tetapi hal ini juga telah mengancam suasana relasi yang cair dalam keputusan politik internal seperti struktur partai, formasi daftar caleg, dukungan politik terhadap pemerintahan di daerah, maupun koalisi dengan partai politik lainnya. Kemampuan membiayai partai diikuti dengan keinginan mengendalikan kepentingan dan keputusan partai. Makna Uang telah mengkerdalkan nilai tawar faksi Ideologis.

Dinamika ini sebenarnya telah berlangsung lama sejak pembentukan awal PAN di Maluku Utara. Pergeseran dan peralihan aktor politik di partai ini dapat diketahui melalui struktur inti yang didominasi aktivis berlatar belakang Muhammadiyah, alumni IMM, HMI dan tentu saja para pengusaha. Kemampuan di dunia usaha dan resiko berbisnis dapat saja mengorbankan kebersamaan dan kesatuan nilai dalam PAN. Bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan politisi yang sukses, melainkan juga etika politisi yang terjerat kasus hukum proyek Milyaran seperti yang dialami Imran Djumadil, mantan ketua PAN wilayah.

5.1 4.3. PKS

Pada masa awal terbentuknya elite PKS di Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba terjun sebagai pengusaha Kayu gelondongan di Halmahera Selatan. Aktivitas sampingan dilakukan untuk menopang dana pencalonan ke DPR RI tahun 1999. Bersama adik kandungnya Muhammad Kasuba, keduanya terpilih sebagai anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 1999 (menjelang pemekaran Provinsi Maluku Utara dari Provinsi Maluku bulan September 1999).

Dorongan kesejahteraan elite partai PKS itu turut mendorong terbentuknya pengelompokan yang bergerak dan beraktivitas dalam lingkaran kekuasaan partai dan pemerintahan lokal. Muhammad Kasuba selama mengendalikan pemerintahan Kabupaten Halmahera selatan 2 periode, telah mengubah keseimbangan internal PKS di Halmahera Selatan yang lebih didominasi oleh Keluarga Kasuba. Peranan para Politisi Kasuba bersaudara (Abdul Gani Kasuba, Muhammad Kasuba dan Bahrain Kasuba) telah menciptakan risiko loyalitas mayoritas etnik Tobelo muslim maupu Kristen di sebagian besar Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Morotai dan Suku Tobelo yang berada di wilayah Halmahera Timur. Ambiguitas kesadaran politik ini, di satu sisi terbuka untuk masyarakat pada umumnya, namun ketiganya tetap mengandalkan mengkapling etnik sebagai kekuatan terbesar dalam mengalahkan kepentingan kolektif partai. Kekuatan keluarga Kasuba berada dalam organisasi Suku Tobelo yang kuat. Ada dua bentuk organisasi yang terbangun sejak Kasuba bersaudara masuk dalam dinamika politik PKS. Yaitu dari sisi kultural, keduanya sebagai top leader Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba (AGK) memiliki pengaruh yang luas karena kurang lebih 30 tahun (sejak tahun 1970-an) telah berdakwah

pada ratusan pulau-pulau, setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Medinah, Arab Saudi.

Model Patronase kultural pada AGK telah terbangun sejak lama. Masyarakat menginginkan figur pemimpin agama dan politik yang dekat dengan rakyat. Modal besar ini menciptakan dukungan dari organisasi sosial Tobelo-Galela, membesarkan organisasi agama Alkhairat, maupun PKS. Pengaruh AGK yang terbangun melalui kepercayaan sosial namun sangat bergantung pada hubungan pribadi sang Kiyai. AGK adalah figur yang menyerupai kharismanya seperti Sultan Ternate yang memiliki basis dukungan di kalangan masyarakat adat Maluku Utara. AGK di kenal secara merata bukan hanya sebagai tokoh agama, masyarakat, melainkan juga sebagai tokoh politik yang sangat diperhitungkan oleh elite politik lokal lainnya.

Sebagai salah satu pengusaha saya tidak bisa menghindari kepentingan politik ini dijaga dengan baik agar akses tetap tidak bermasalah dengan pejabat. Meskipun saya adalah keluarga dekat dengan AGK, Muhammad Kasuba dan Bahrain tetapi Pilgub 2018 ini memang sangat dilematis. Saya selalu diberi akses yang besar dalam mendapatkan jatah proyek di berbagai daerah terutama di Halmahera Selatan sejak tahun 2004 sampai saat ini. Namun perbedaan prinsip ini membuat saya memilih dan turut bekerja pada pasangan calon Gubernur Muhammad Kasuba yang diusung PKS, PAN dan GERINDRA pada Pilgub Malut 2018. saya hanya salah satu dari puluhan pengusaha berbeda pilihan. Saya membentuk Poros Generasi Muda Tobelo-Galela (PGM TOGALE) Kabupaten Halmahera Selatan mengambil langkah menolak pencalonan AGK kembali dan lebih memilih mendorong adik kandungnya Dr. Muhammad Kasuba (MK) sebagai figur yang kami anggap lebih sesuai dengan kebutuhan Maluku Utara karena telah berpengalaman memimpin Halmahera Selatan selama dua periode. (SE, 26/08/2018).

Sarka menginginkan agar tidak ada perpecahan dalam tubuh Togale karena akan berakibat fatal dalam konflik internal Togale (Etnis Tobelo Galela terbesar di Maluku Utara). Sebagai salah satu aktor politik pendukung dan penopang paling loyal dan dipercaya oleh Muhammad Kasuba semasa menjabat Bupati Halsel. Dengan kucuran Proyek bersumber dari APBD, sebagai kontraktor, Sarka yang loyal itu sebagai gantinya mendapat sejumlah insentif yang diinginkannya seperti akses sumberdaya yang langka, proyek, dan layanan Patron. Di sisi lainnya, internal partai politik PKS diperhadapkan oleh keinginan Kasuba bersaudara. Pertanyaan, apakah PKS tersandra dalam drama pencalonan gubernur oleh Kasuba bersaudara? Ridwan Husen Ketua DPW PKS Provinsi Maluku Utara beralasan bahwa PKS tidak tersandera dengan popularitas AGK yang telah diusung oleh PDI-P dan PKPI. Sebagai partai kader yang modern, PKS diyakini mampu mandiri tanpa dukungan dan pengaruh popularitas petahana dalam mempertahankan suara partai. Justru AGK dianggap ingkar janji dalam mendorong kesejahteraan dan kolektivitas partai. Bahkan AGK dianggap telah mengabaikan hak-hak partai dalam distribusi kesejahteraan.

Kami masih yakin bahwa tanpa tokoh politik seperti pak Gubernur Abdul Gani Kasuba Bupati Bahrain Kasuba pun PKS masih menjadi pilihan utama. PKS itu partai modern dan mandiri sehingga tidak tersandera dengan popularitas AGK yang diusung oleh PDI-P dan PKPI pada Pilgub Malut 2018 dan telah terpilih kembali. Sebagai partai kader yang modern, PKS diyakini mampu mandiri tanpa dukungan dan pengaruh popularitas pejabat mempertahankan suara partai kami di Pemilu 2019 akan datang. yang terkesan selama ini adalah justru yang terjadi selama ini Pak Kiyai Abdul Gani Kasuba saya anggap ingkar janji dalam mendorong kesejahteraan dan kolektivitas partai karena beliau diusung oleh PKS saat terpilih sebagai Gubernur pada Pilgub 2014 silam. Bahkan saya menilai beliau kurang komitemennya karena

telah mengabaikan hak-hak partai dalam distribusi kesejahteraan. (RH, 16/06/2018).

Pengakuan ini sebagai sebuah bentuk kekecewaan Ketua DPW PKS karena merasa dirugikan dengan rendahnya komitmen AGK dalam membesarkan partai setelah terpilih. Bahkan AGK dianggap telah mengorbankan kebersamaan dan kesatuan nilai PKS hanya karena mementingkan kelompoknya dalam mengejar kesejahteraan. Bagi Ridwan Husen, diusungnya AGK ke PDIP justru lebih baik agar PKS tidak selamanya tersandra di bawah figur ketokohan AGK. Di sisi lainnya, AGK ternyata masih memiliki dukungan yang solid dari kliennya. Hubungan ini berkelanjutan meskipun model klientelisme yang dibangun oleh AGK tidak tertata dengan baik namun tidak rentan runtuh akibat perpecahan dengan MK. Penolakan PKS terhadap AGK dimanfaatkan oleh PDI-P dan PKPI yang menawarkan dukungan rekomendasi Pilgub.

Ketiga, faksi-faksi yang berada dalam tubuh PKS sebenarnya bergantung pada figur AGK dan MK yang memiliki dukungan solid dari masyarakat etnik Tobelo Galela. Meskipun keberadaan etnik Tobelo Galela tidak semuanya berada di PKS, melalui kedua figur ini, menciptakan PKS diidentikkan dengan Partai Keluarga Kasuba oleh lawan-lawan politiknya. Berbeda dengan teorisasi awal tentang Faksi bersumber pada relasi patron klien dianggap lemah, namun daya tahan faksi Keluarga Kasuba dan etnik Tobelo-Galale sebagai organisasi informal yang menyiratkan daya tahan, kohesi, atau disiplin yang kuat. Meskipun dukungan terhadap faksi internal PKS ditujukan kepada figurnya, namun kemampuan faksi ini melampaui faksi prinsipil yang berkomitmen terhadap ideologi atau pandangan kebijakan bersama. Partai lebih berfungsi sebagai kendaraan politik kekuatan informal dalam politik praktis.

Saldi Kasuba yang dekat dan kepercayaan AGK. Saldi adalah simpatisan PKS yang telah berganti partai PKPI.

Abdul Gani Kasuba itu masih diinginkan oleh pendukungnya dan memiliki pengaruh yang kuat dan modal sosial yang besar. ini resiko dari pilihan yang berbeda dengan keluarga lainnya yang bertahan di PKS Bersama Haji Muhammad Kasuba. Saya sebagai salah satu orang kepercayaan AGK lebih memilih melepaskan keanggotaan dari PKS dan melanjutkan karir politik di PKPI. Nasib internal keluarga Kasuba juga alami keributan akibat perpecahan pilihan ini. Namun tidak benar kalau PKS kurang diperhatikan sama sekali oleh Pak Kiyai. Mereka diberi jatah proyek juga untuk kepentingan dana partai. (SK, 20/08/2018).

Faksi AGK dan MK dapat dikategorikan sebagai faksi kepentingan yang memiliki klien di kalangan aktivis parpol, kontraktor, dan kalangan aktivis keagamaan yang tumbuh subur dalam relasi patronase. Pilgub 2018 telah menggiring gerbong simpatisan PKS menjadi konstituen AGK. Kondisi ini yang berubah ini dapat dipahami sebagai suatu pola relasi yang bergantung pada akumulasi hubungan simbiosis mutualisme. Perpecahan faksi Keluarga Kasuba dalam tubuh PKS dapat diperlihatkan pada beberapa kejadian menarik. Beberapa keluarga Kasuba yang bekerja di instansi pemerintahan Halsei dinonjobkan oleh Bahrain Kasuba, Bupati Halsei dari jabatannya karena diduga mendukung MK.

Fakta ini menunjukkan bahwa faksi kepentingan keluarga Kasuba ini mudah mengalami perpecahan sesama internal faksi. Sorotan tajam dikemukakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menggambarkan konflik kakak beradik sebagai elite PKS Maluku Utara adalah bentuk kegagalan DPP PKS dalam menjaga kolektivitas partai.

Tabel. 5.4
Motivasi Kesejahteraan dan Kekayaan Calon Pilgub 2018

CALON GUB/WAGUB	KEKAYAAN
Ahmad Hidayat Mus	Tanah & Bangunan Rp.33.855.304.500; Alat Transportasi & Mesin Rp. 7.950.000.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 1.570.000.000; Kas & Setara Kas Rp. 8.865.807.694; Total Harta Kekayaan Rp. 52.241.112.194
Rivai Umar	Tanah & Bangunan Rp. 1.420.000.000; Alat Transportasi & Mesin Rp. 286.500.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 119.300.000; Kas & Setara Kas Rp. 524.579.987; Harta Lainnya Rp. 22.985.000; Total Harta Kekayaan Rp. 2.373.364.987
Burhan Abdurrahman	Tanah & Bangunan Rp. 8.441.264.400; Alat Transportasi & Mesin Rp. 225.000.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 52.500.000; Surat Berharga Rp. 700.000.000; Kas & Setara Kas Rp. 2.064.105.000; Hutang Rp. 741.751.200 Total Harta Kekayaan Rp. 10.741.118.200
Ishak Djamaluddin	Tanah & Bangunan Rp. 1.174.096.000; Alat Transportasi & Mesin Rp. 9.500.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 65.000.000; Kas & Setara Kas Rp. 185.773.000; Hutang Rp. 50.000.000; Total Harta Kekayaan Rp. 1.384.369.000
Abdul Gani Kasuba	Tanah & Bangunan Rp. 5.380.000.000; Alat Transportasi & Mesin Rp. 100.000.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 360.000.000; Kas & Setara Kas Rp. 1.035.876.657; Hutang Rp. 330.000.000; Total Harta Kekayaan Rp. 6.545.876.657
Ali Yasin	Tanah & Bangunan Rp. 17.094.180.000; Alat Transportasi & Mesin Rp. 710.000.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 2.034.211.504; Kas & Setara Kas Rp. 2.395.008.630;; Total Harta Kekayaan Rp. 22.233.400.134
Muhammad Kasuba	Tanah & Bangunan Rp. 4.144.000.000; Alat Transportasi & Mesin Rp. 230.000.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 119.900.000; Kas & Setara Kas Rp. 62.979.249; Total Harta Kekayaan Rp. 4.556.879.249

Madjid Husen

Tanah & Bangunan Rp. 942.040.000; Alat Transportasi & Mesin Rp. 285.000.000; Harta Bergerak lainnya Rp. 238.000.000; Kas & Setara Kas Rp. 1.672.723.816; Total Harta Kekayaan Rp. 3.137.763.816

Sumber: : LHKPN KPK tahun 2018

5.1.3. Perebutan Posisi Kunci yang Terbatas untuk Menunjang Politik Karir

5.1.3.1. PPP

Berkaitan dengan poin ini, PPP juga menjadi ajang perebutan posisi kunci ketua partai antara Salim Halik dan Ridwan Tjan. Hal ini dilakukan karena keduanya memiliki dukungan politik yang kuat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Maluku Utara yaitu Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Terbatasnya kemampuan PPP dalam mendapatkan dua kursi di Dapil 1 Maluku Utara ini mendorong keduanya harus bersaing ketat dalam penentuan daftar calon tetap. Kekalahan Salim Halik dalam dominasi ketua partai, berakibat pada tidak terakomodirinya beliau dalam daftar caleg 2014 maupun 2019.

Beberapa tokoh PPP lainnya memilih pindah ke GERINDRA menjelang pemilu 2014. Wahdah Zainal Imam sebelumnya adalah seorang loyalis PPP jauh sebelum runtuhnya Orde Baru. Bahkan masih sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara 1997 dan 1999 serta anggota DPRD Kota Ternate 2004-2009. Pada pemilu 2014, beliau terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi mewakili Gerindra. Wahdah Zainal Imam beralasan figur dalam partai politik tidak akan berpengaruh besar jika partai politik dikelola sekedar sebagai arisan keluarga. Partai tidak bisa selamanya dikendalikan oleh kekuatan marga tertentu atau rumpun dan kumpulan marga yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Beberapa sosok loyalis partai lainnya Sahril Taher anggota DPRD Provinsi fraksi Gerindra sebelumnya sebagai salah

satu pengurus PPP. Memiliki alasan yang sama dengan Wahda Zainal Imam bahwa PPP mengalami distorsi sebagai partai umat Islam. Lemahnya manajemen internal partai mendorong keduanya hengkang ke Gerindra.

Saat itu dalam internal kami semakin menguat perilaku pragmatis terutama anggota DPRD PPP dalam menyikapi fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan. Kedekatan PPP dengan dengan Gubernur Maluku Utara Tyaib Armayn (2002-2007). Simbiosis mutualisme ini terjalin karena PPP masuk dalam koalisi partai pemerintah. Merosotnya perolehan suara PPP pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 akhirnya berpengaruh terhadap tingkat konsolidasi internal partai. Tahun 2014 setelah diangkatnya Ridwan Tjan tanpa melalui mekanisme Musyawarah itu sebagai awal perpecahan kami. Saya dan Pak Sahril Taher memilih menyebrang ke Gerindra, dan alhamdulillah kami terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019. konflik internal ini mendorong kami untuk memilih keluar dari PPP setelah tidak dilibatkan lagi dalam struktur partai. Selain itu karena kami juga tidak sependapat dengan faksi Konservatif yang masih saja mengakomodir kepentingan Pak Rusdi Hanafi setelah melihat perkembangan konflik ini justru akan membuka peluang jatuhnya wibawa partai dan kehilangan popularitas di mata pemilih. (ST, 20/06/ 2018).

Sahril menilai bahwa kebijakan partai masih lemah dalam mendorong PPP menjadi lokomotif bagi kekuatan masyarakat di level akar rumput. Beliau menilai PPP mengalami distorsi dan kemunduran karena disebabkan oleh program-programnya tidak mampu diwujudkan dalam kerangka pelayanan publik di berbagai basis konstituennya.

5.1.3.2. Perebutan Posisi Ketua PAN Wilayah

Perebutan posisi kunci di PAN dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu penentuan formasi caleg pemilu 2014, serta daya

Tarik pencalonan beberapa elite PAN pada Pilgub 2013. Imran Djumadil memanfaatkan posisi ketua ke hadaoran elite politik yang berkeinginan menggunakan Pan sebagai kendaraan politik Pilgub. Demikian juga ketika Sahrin Hamid setelah menduduki PAN, secara terang-terangan menawarkan PAN kepada beberapa kandidat Gubernur untuk berpasangan. Di sisi lainnya, Umar Bopeng juga berminat mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat Wakil Gubernur yang ingin berpasangan dengan Rudi Erawan, Bupati Halmahera Timur dan sebagai ketua PDI-P.

Perebutan posisi kunci difokuskan pada kompetisi mendapatkan ketua partai. Kasus perpecahan PAN tahun 2012 karena kepentingan terbesar para politik karir adalah menguasai kursi ketua partai. Meskipun disadari bahwa posisi kunci itu sangat terbatas jumlahnya. Namun disadari bahwa posisi ketua partai sangat menentukan dalam penguasaan kebijakan dan garis komando partai. Selain terbatasnya posisi kunci dalam partai, masing-masing faksi tetap mempertahankan tujuan awalnya untuk menguasai posisi strategis partai. Formasi kekuasaan yang tersedia yang terbatas itu memicu konflik internal partai antara faksi pengusaha berhadapan dengan faksi ideologis dalam dua kali Musyawarah Luar biasa pada 25 Desember 2012 di Kabupaten Pulau Morotai (Kompas/01/25/2013) dan awal januari 2013 di Kota Ternate.

Perebutan ketua partai dilatarbelakangi oleh isu, intrik dan konflik antar faksi ideologis dan faksi pengusaha dalam persaingan internal elite PAN menjelang Pilgub Malut 2018.

“Apa yang dilakukan Plt Sahrin Ketua PAN Malut sangat memalukan. Sahrin telah menawarkan kursi kepada sejumlah Kandidat balon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut yang mendaftarkan diri di PAN dengan harga yang sangat tinggi,” ujar

Ketua MPP PAN Malut, Umar Bopeng
(<https://daerah.sindonews.com/21/01/2013>)

Faksionalisme di tubuh PAN semakin menguat. Dampaknya berujung pada menurunnya komunikasi antar faksi. Tindakan anarkis berbuntut pada perusakan fasilitas kantor partai politik dengan membakar berbagai atribut partai, Foto Ketua DPP PAN, Hatta Rajasa.

Gambar 5.1. Pembakaran Atribut di Kantor DPW PAN Maluku Utara Pasca Penolakan Muswilub Faksi Pengusaha



Sumber:<https://daerah.sindonews.com/berita/715476/26/tolak-hasil-muswilub-kantor-dpw-pan-malut-dirusak> tanggal 7 Pebruari 2013.

Pendukung Faksi Pengusaha pengurus wilayah, kaders, dan simpatisan PAN di Kabupaten Kota di Malu menyegel dan merusak fasilitas kantor DPW PAN Malut, membakar atribut Bendera dan beberapa berkas caleg Pemilu 2014. Buruknya manajemen internal partai yang harmonis dan kooperatif

memposisikan PAN dilematis menghadapi persaingan internal partai yang tidak kondusif. Perebutan posisi kunci partai telah memicu keluarnya beberapa pengurus partai, anggota DPRD ke partai Nasdem. Inisiasi faksi pengusaha ini memilih pindah partai ditanggapi faksi ideologis yang telah menguasai struktur DPW PAN Malut dengan langkah pemecatan atas keanggotaan partai.

"Sesuai ketentuan organisasi setiap kader yang hijrah ke parpol lain maka harus dipecat, termasuk yang menjadi anggota DPRD," kata Sekretaris Umum DPW PAN Malut Ikbal Mahmud di Ternate. Anggota DPRD dari PAN yang dipecat di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Husni Bopeng, anggota DPRD Malut Helmi Umar Muksin, dan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Adjan Jaguna. Ikbal mengatakan PAN kini sedang memproses pergantian orang-orang yang telah dipecat tersebut melalui mekanisme pergantian antarwaktu. "Mereka tidak lagi dibenarkan menggunakan fasilitas DPRD dengan mengatasnamakan wakil dari PAN," katanya. (<https://ambon.antaranews.com/berita/19787/pan-maluku-utara-pecat-anggota-pindah-partai/> 19 Maret 2013)

Pada umumnya, dampak buruk dari perebutan ketua partai tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART. Salah satu anggota faksi pengusaha, Husni mengatakan kepindahannya ke Partai NasDem merupakan sikap politik atas isu korupsi yang melilit tubuh DPW PAN selama ini. "Partai NasDem lebih jauh dari isu-isu korupsi," katanya. Ia juga mengklaim bahwa sebagian besar kader PAN Kota Ternate mengikuti langkahnya pindah ke Partai NasDem (<https://ambon.antaranews.com/>, 19 Maret 2013). Kiprah Husni Bopeng disokong penuh oleh Umar Bopeng, suaminya yang memiliki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPW PAN Malut. Husni Bopeng sebelum terjun ke politik dan menjadi

caleg, berprofesi sebagai pengusaha atau kontraktor. Dengan modal politik dan ekonomi mempermudah kemampuannya dalam memobilisasi dukungan konstituen dalam pemilu multipartai yang memerlukan dukungan finansial yang besar pada pemilu 2009 (Andriana, et al., 2012:212).

Ketika faksi ideologis berhasil mengambil alih kembali DPW PAN sejak tahun 2012-2015, Sahrin Hamid lebih mengandalkan kedekatannya dengan ketua DPP PAN, Hatta Rajassa daripada membangun relasi dengan patronase pemerintahan daerah dalam membiayai aktivitas PAN. Di tengah perjalanan kepemimpinan, Sahrin tidak sempat menyelesaikan tugasnya sebagai ketua PAN sampai 2017. Sahrin didepak dari ketua Partai tahun 2015 setelah Sahrin Hamid dituduh oleh lawan-lawan politiknya tidak mampu menyatukan berbagai perbedaan di berbagai Kabupaten/Kota pasca ditinggalkannya kelompok faksi pengusaha yang hengkang ke Nasdem dan partai lainnya.

Pemicu diberhentikannya Sahrin Hamid dikait-kaitkan dengan ada dugaan keterlibatannya dalam dugaan kasus suap Calon Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua terhadap Ketua MK RI, Akil Mohtar dalam sengketa penyelesaian hasil pilkada tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi yang digelar tahun 2015. Bertepatan dengan terpilihnya Ketua Umum DPP PAN yang baru di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan tahun 2015, Sahrin dicopot dari posisinya sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara. Langkah selanjutnya PAN di bawah kendali pejabat Ketua Imran Jumadil sampai menunggu Musyawarah tahun 2017. Kondisi PAN semakin tidak terkendali. Langkah-langkah kudeta terhadap kepemimpinan digerakan oleh pengurus Kabupaten/Kota. Sebagai gantinya, Imran Djumadil diberikan kesempatan

mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 2 (Zona Kota Ternate-Halmahera Barat) Pemilu 2019.

Jabatan saya sebagai bendahara DPW PAN sejak periode pertama Pak Abdurrahim Fabanyo maupun Pak Imran Djumadil tahun 2011. Saya mengamati ternyata konflik perebutan Ketua ini terjadi pada saat Saudara Imran Djumadil dianggap tidak serius menjalankan program kerja partai, tetapi menurut saya ini subyektif penilaian dari beberapa pengurus DPD PAN Kabupaten dan Kota. Ini hanya alasan untuk memberhentikan Imran Djumadil dari posisi ketua terpilih, terbukti Imran diberhentikan oleh DPP PAN tahun 2011 dengan salah satu pengurus DPP PAN Sahrin Hamid. Saya merasa tidak cocok dengan pola kepemimpinan Sahrin, lalu Bersama Ibu Husni Bopeng dan sebagian besar pengurus DPW lainnya melepaskan seluruh atribut PAN dan memilih NASDEM sebagai partai baru kami di pemilu 2014. Bukan soal terpilih atau tidak terpilih melainkan ketidakharmonisan antara kami dengan Sahrin Hamid membuat ini mengganggu kegiatan kami di partai. Jika ditelusuri posisi kunci ini pada umumnya sangat menunjang karir politik kami di sini. Sebagai pengusaha, saya menyadari posisi bendahara partai juga selalu diperebutkan. (BAK,18/08/2018).

3.1.3.3. Babak Baru Perebutan Posisi Kunci Partai di Bawah Kendali Majid Husen dan Konflik Internal Antar Faksi

Pasca diberhentikannya Sahrin Hamid dari posisi ketua Partai, Muswil DPW PAN Malut berhasil memilih Majid Husen sebagai nakhoda baru setelah diawali Pemilihan 4 Formatur perwakilan dan 1 perwakilan DPP untuk memilih Ketua umum DPW. Berbeda dengan pola Muswil sebelumnya yang berakhir perpecahan antar faksi dan konflik yang buruk, Muswil IV tanggal 21 Pebruari 2016 di Ternate berakhir demokratis.

Sistem pemilihan ini sangat ideal digunakan untuk menghindari terjadinya perpecahan, bukan dilakukan dengan cara pemilihan secara terbuka dan memicu terjadinya konflik. "Proses pemilihan diserahkan ke DPW PAN Malut melalui sistem musyawarah mufakat. Pola yang digunakan PAN dalam setiap Muswil juga bagian dari proses demokrasi yang semata-mata menghindari terjadinya perang kandidat. Pengalaman setiap kali Muswil di Provinsi Malut selalu melahirkan konflik dan ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Karena itu, upaya pemilihan ketua melalui formatur bisa menjadikan solusi Muswil berjalan secara demokratis dan elegan, ujar ketua DPP PAN Zulkifli Hasan (<https://ambon.antaranews.com/berita/32297/dpp-tidak-intervensi-muswil-pan-maluku-utara>)

Babak baru perebutan posisi kunci partai di tubuh PAN belum berakhir. Setelah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan melantik pengurus DPW PAN Malut Periode 2015-2020 yang diketuai Madjid Husen di Ternate Sabtu, 15 April 2017), babak baru perebutan posisi kunci partai kembali menguat. Faksi-faksi yang bertikai adalah sisa-sisa kekuatan faksi pengusaha, politisi aktivis Muhammadiyah dan beberapa kalangan muda PAN yang berafiliasi dengan organisasi BM PAN, IMM, Pemuda Muhammadiyah dan KNPI. Amanat DPP PAN tentang tanggung jawab besar dalam mendukung berbagai program pemerintah, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, pendidikan politik bagi masyarakat dan demokrasi anti-konflik (<https://ambon.antaranews.com/15 April 2017>).

Kejutan lainnya pada awal Tahun 2018 adalah tindakan yang tidak prosedural yang dilakukan oleh Majid Husen, ketua DPW PAN pengganti Sahrin Hamid. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara pada kenyataannya belum memiliki pengalaman dalam aktivitas kepartaian, pengkaderan formal partai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perilaku pragmatis PAN telah mengalahkan keyakinan ideologis partai. Majid Husen adalah

representasi Ketua Partai non-kaders. Artinya, keberadaan dalam tubuh partai sangat dilematis karena pada perkembangan politik selanjutnya MH menghadapi berbagai masalah internal termasuk upaya-upaya kudeta lawan politiknya, dan tindakan pemberhentian dari struktur partai terhadap pengurus yang menentang keputusan partai yang menolak MH sebagai calon Wakil Gubernur Malut 2018.

Menjelang penjarangan bakal Calon legislatif pemilu 2019, Ketua DPW PAN memecat lawan-lawan politiknya dari faksi Pengusaha (Ketua MPW Umar Bopeng) dan aktivis Muhammadiyah, Sekretaris PAN Wilayah, Saleh Tjan. (<https://www.brindonews.com/2018/01/sekwil-bantah-pernyataan-ketwil-pan.html>).

5.1.3.3. Perebutan Posisi Kunci Partai di Internal PKS

Berkaitan dengan poin ketiga, kader PKS yang memiliki pengaruh dan popularitas selalu aktif dalam perebutan posisi dalam karir politik. Rotasi dan rekrutmen elite partai berepengaruh dalam penentuan calon DPRD Provinsi Maluku Utara pemilu 2019. Tentu saja ada yang tereliminasi dari daftar calon tetap legislatif. bahkan sejumlah kader dipastikan di-PAW (Pergantian antar waktu) karena tidak terakomodir dalam daftar calon tetap. Hal ini disebabkan oleh turunnya loyalitas terhadap kebijakan organisasi partai dan sirkulasi kepengurusan struktur partai. Terbatasnya formasi kekuasaan yang tersedia dalam PKS mendorong timbulnya persaingan sesama kader PKS.

Penentuan formasi daftar caleg PKS di Provinsi Maluku Utara dan sejumlah Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam beberapa kasus. Pertama, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 2 periode, Alimin Muhammad yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai 2009-2014, dan

2014-2019 tidak lagi diakomodir dalam daftar caleg 2019. Tersingkirnya Alimin berkaitan erat dengan tidak terpilihnya dalam formasi struktur pengurus PKS provinsi setelah sebelumnya memimpin 2 periode.

Sedangkan politisi kabupaten/kota lainnya yang di-PAW adalah Mochdar Bailussy (DPRD Kota Ternate), Karnawi Hasan (DPRD Kabupaten Halmahera Selatan), Jais Miraj (DPRD Kabupaten Halmahera Timur). Ketiga kader ini pindah ke partai Nasdem dan membentuk organisasi GARBI daerahnya masing-masing. Sebagai politik karir, ketiganya memilih pindah partai saat tidak terakomodir dalam daftar caleg PKS. Pencari kekuasaan kader PKS ini sebagai akibat dari terbatasnya sumberdaya partai dengan posisi yang diinginkannya sehingga mendorong untuk mencari sumber-sumber partai lain yang lebih terbuka.

Perebutan posisi kunci lainnya adalah persaingan dua politisi PKS yang bersaudara, antara KH. Abdul Gani Kasuba dengan Dr. Muhammad Kasuba. tanpa dipungkiri bahwa kedua politisi bersaudara ini turut mewarnai dinamika PKS dengan dominannya ketokohan Kasuba bersaudara yang memiliki kedekatan dengan pendiri organisasi keagamaan Alkhairat. Perebutan posisi kunci ini dimulai sejak memasuki tahun politik 2017 menjelang Pilgub Maluku Utara, perpecahan PKS tidak bisa dihindari. Perpecahan meluas pada level individu dalam struktur provinsi sampai Kabupaten/Kota. DPP PKS memberikan rekomendasi kepada adik kandungnya, Muhammad Kasuba, dan mencabut mandat rekomendasi pertama yang awalnya sudah diberikan kepada kakak kandungnya, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), sebagai petahana. Sumber konflik internal ini memicu perpecahan seluruh pendukung Kasuba menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan. Petahana AGK Bersama Bahrain Kasuba dengan pihak lainnya Muhammad Kasuba dan PKS.

Demikian Bahrain Kasuba Bupati Halmahera Selatan (2015-2021) menyatakan mundur dari anggota PKS dan memilih menakhodai sebagai Ketua PKPI dalam kendaraan politik yang baru. Tentu saja AGK dan PDI-P memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Meskipun AGK masih berstatus sebagai anggota PKS, tetapi dampak dari Pilgub 2018 mengisyaratkan AGK akan lebih mengutamakan caleg PDI-P dan PKPI dalam pemilu 2019. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan penghargaan AGK karena kedua partai ini telah banyak membantu dalam kemenangan Pilgub 2018. Komitmen ini dapat dilihat pada beberapa kebijakan AGK memberikan proyek Milyaran kepada beberapa tim sukses pilgub 2013 maupun pilgub 2018.

Pasca pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilgub 2018, AGK, Gubernur petanaha hanya berada posisi kedua. Ahmad Hidayat Mus (tahanan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong Tahun 2009) unggul 176.993 suara. Sedangkan AGK dan Yasin Ali (AGK-Ya) yang diusung PDIP dan PKPI memperoleh 169.123 suara. pada posisi ketiga disusul oleh Burhan Abdurahman dan Ishak Djamiludin (Bur-Jadi) yang diusung Partai Hanura, Demokrat, NasDem, PBB dan PKB dengan 143.416 suara. Sedangkan adik kandung AGK, yakni Muhammad Kasuba yang berpasangan dengan Majid Husen (MK-Maju) diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN dengan 65.202 suara.

Gugatan dilayangkan kubu AGK-Ya ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Sebagai pemohonan perkara, Permohonan AGK-YA dipenuhi. PSU diselenggarakan di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Taliabu. Selain itu gugatannya lainnya yang dipenuhi adalah PSU di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat. Hasil PSU dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi

yang mengadili Pilgub Malut 2018, AGK menyatakan terangnya dukungan terhadap calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung oleh PDI-P. Dukungan ini dinilai sebagai bentuk manuver politik baru terhadap menggelindingnya spekulasi terkait keanggotaannya sebagai kader PKS. Untuk menepis semua itu, AGK menyatakan siap berkampanye dan mengajak konstituennya memenangkan Jokowi-Maruf Amin di Provinsi Maluku Utara.

Pada kasus lainnya, Hengkangnya Bahrain Kasuba ke PKPI disebabkan oleh kuatnya tekanan PKS terhadap Bupati Halmahera Selatan dalam Pilgub 2018. Kepindahan Bahrain Kasuba ke PKPI itu sebagai satu-satunya cara menghakhiri perdebatan dan tarik menarik dengan PKS yang tidak mampu dikompromikan lagi. Selain itu, untuk memuluskan langkah AGK mendapatkan rekomendasi PKPI, Bahrain Kasuba, ponakannya diberikan kepercayaan untuk menangani rekomendasi DPP PKPI. Langkah ini mampu meyakinkan DPP PKPI menarik dukungan dari pasangan Pilgub lainnya, Dr. Burhan Abdurrahman dan Ishak Djamaludin.

Logika tentang perebutan jabatan dan posisi kunci dalam PKS sebenarnya tidak muncul ke permukaan selama ini karena mekanisme pemilihannya berbeda dengan pola pemilihan ketua partai politik lainnya. Bagi kami, ini menjadi alasan mengapa tidak ada hal yang diperebutkan dalam posisi kunci di PKS. Namun posisi ini justru PKS dimanfaatkan oleh beberapa tokoh yang menganggap memiliki pengaruh besar karena Jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau sebagai Gubernur. Padahal mereka dibesarkan oleh partai dan bernaung di bawah partai. ini yang seharusnya mereka mereka bersyukur dan menghormati putusan partai. Kami di internal partai juga memiliki ukuran dan cara pandang berdasarkan mekanisme kepemimpinan sehingga tidak pernah ada konflik di internal kepemimpinan selama ini. Sebelum saya ada Pak Alimin Dua Periode memimpin PKS dan

alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dua periode juga. Namun dengan segala pertimbangan kami tidak lagi mencalonkan Pak Alimin Muhammad sebagai calon anggota DPRD pemilu 2019 karena untuk menjaga sirkulasi dan rotasi dalam daftar caleg. Ini untuk menjaga keseimbangan, tidak ada maksud lainnya. Meskipun beberapa orang mempersoalkan keputusan kami yang dianggap memotong keberlanjutan karir mantan ketua PKS ini, tetapi ini adalah hal yang biasa untuk menyegarkan rotasi dalam PKS karena masih banyak kader-kader potensi lainnya yang sudah antri lama. (RH, 28/06/2018).

Gambaran tersebut menguak beberapa fakta di mana PKS sebenarnya menghadapi tekanan internal dalam rotasi kepemimpinan meskipun tidak berdampak serius pada perpecahan internal pengurus partai. Namun secara eksternal tekanan kuat terhadap PKS karena dukungan mayoritas justru selama ini diperoleh dari Kabupaten Halmahera Selatan sejak naiknya Muhammad Kasuba sebagai Bupati dua periode. Selain itu, Pilgub Malut 2018 juga sebagai salah satu gambaran utuh tentang perilaku politisi karir dalam mengejar posisi kunci yang terbatas untuk menunjang akses jabatan dan keberlanjutan karir politik di daerah. Faksionalisme yang muncul dalam tubuh PKS ini dipengaruhi oleh ideologi, isu, kepemimpinan, strategi dan taktik. Apa yang menjadi keputusan PKS tidak diindahkan oleh petahana. Dengan jaringan sumberdaya yang dimilikinya, AGK melawan garis kebijakan PKS terkait status keanggotaannya dan hak politiknya. DPP PDI-P memutuskan rekomendasi diberikan kepada AGK. Tentu saja hal ini dapat dilihat pada upaya AGK menjadikan PDI-P dan PKPI untuk mempertahankan kekuasaannya. Demikian pula Bahrain Kasuba keluar meninggalkan PKS, dan memilih PKPI sebagai kendaraan politik baru demi menjaga kesinambungan kontrol politik dengan pamannya. Kegagalan Muhammad Kasuba di Pilgub 2019, kini

disiasati dengan cara mencalonkan kembali sebagai anggota DPR RI Pemilu 2019. Poin ini dapat dipahami bahwa posisi kunci yang terbatas sangat tidak mudah dikendalikan. Jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota tidak akan menjamin seorang calon mampu meraih pencarian sumber-sumber kekuasaan baru jika tidak diukung dengan kemampuan mengolah isu politik di level akar rumput.

5.1.4 Pragmatisme dan Persaingan Internal Partai

5.1.4.1 PPP

Keberhasilan PPP justru pada masa awal reformasi. Dengan runtuhnya Orde Baru, PPP mengklaim sebagai partai representatif politisi yang berideologi Islam yang berbeda dua partai non agama lainnya seperti Golkar dan PDI. Di Maluku Utara PPP didominasi keanggotaannya dari aktivis politik berlatar belakang Muhammadiyah, alumni HMI, PII, NU, maupun eks Masyumi yang masih memiliki pengaruh dalam tubuh PPP. Namun pasca memasuki era reformasi, struktur kepemimpinan PPP yang personalistik diperlihatkan oleh masa Rusdi Hanafi sejak tahun 1999-2014. Setelah berakhir masa kepemimpinannya, Musyawarah PPP menghasilkan figur yang berjiwa pluralis, Salim Khalik. Namun Rusdi Hanafi tidak berada pada pihak penggantinya. Persaingan internal bermula dari dicopotnya ketua PPP Maluku Utara tanpa melalui prosedur internal. Kejatuhan Salim Halik dikaitkan dengan dugaan intervensi Rusdi Hanafi melalui sebuah surat keputusan pemberhentian yang dilayangkan oleh DPP PPP. Akar konflik sebenarnya diawali dari kekalahan Ridwan Tjan sebagai kompetitor dalam pemilihan ketua partai. Kedekatan bisnis antara Ridwan Tjan dengan Rusdi Hanafi memberi ruang gerak yang luas bagi keduanya dalam menghadang SalkimHalikdi PPP. Sebagai salah satu tokoh PPP

yang berpengaruh di berbagai daerah maupun klik yang dekat dengan pimpinan DPP PPP, Rusdi Hanafi berhasil meyakinkan DPP PPP untuk membekukan kepengurusan Salim Halik dan digantikan oleh Ridwan Tjan.

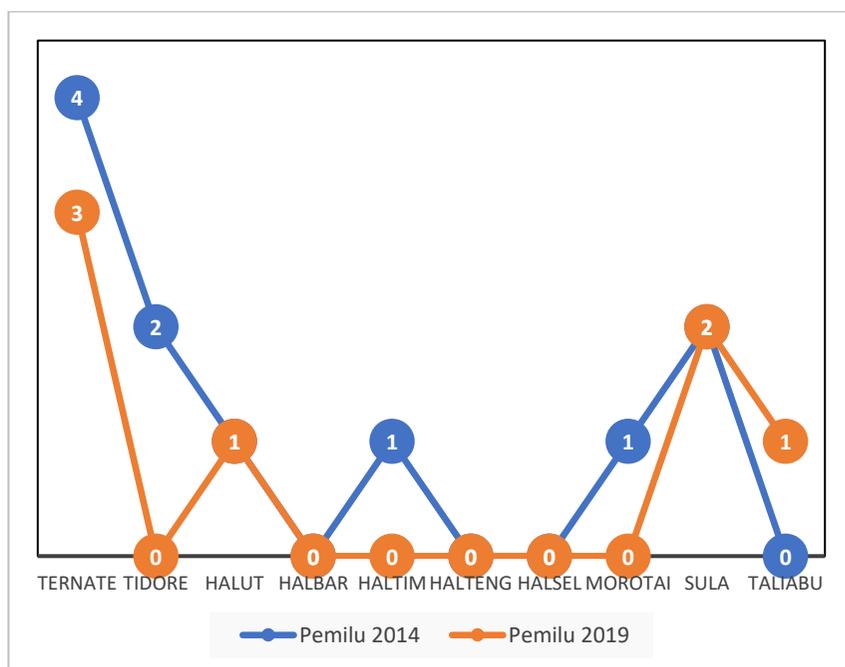
Sebagai salah satu pengurus DPP PPP, Rusdi Hanafi menggunakan kekuatan politiknya untuk mendorong salah satu rekanan bisnis Ridwan Tjan sebagai ketua wilayah PPP di Maluku Utara. Kubu Salim Halik menolak penunjukan Ridwan Tjan karena dianggap bukan kader PPP, tidak pernah melewati level pengkaderan PPP, serta sebelumnya belum pernah menduduki jabatan pengurus PPP di level Kabupaten/Kota atau Provinsi. Ketua PPP, Ridwan Tjan memiliki akses tunggal dalam mendapatkan peluang sebagai ketua PPP tahun 2016. Sebaliknya Salim Halik salah satu kader partai yang dibesarkan melalui akar perkaderan PPP berjenjang. Persaingan antara Ridwan Tjan dan Salim Halik melahirkan dua kubu yang saling melemahkan. Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2009-2014, keberadaannya dianggap sangat berbahaya oleh Kubu Ridwan Tjan.

Kemudian pada pemilu legislatif 2014 Salim terpental dari daftar caleg tetap DPRD Provinsi Maluku Utara. Jika Pemilu 1999-2004 PPP memiliki 6 kursi; 2004-2009 4 kursi; 2009-2014 2 kursi; 2014-2019 menyisakan 1 kursi, dan Pemilu 2019 PPP gagal meraih kursi dari 45 kursi DPRD Provinsi Maluku Utara. Sebenarnya mengalami kemerosotan politik yang diikuti oleh konflik internal meskipun kecilnya keberhasilan dalam Pemilu 2009 dan 2014. Intervensi politik DPP PPP justru semakin memperparah perebutan pucuk pimpinan.

Gambaran 5.6 di bawah fakta nyata tentang kegagalan PPP di berbagai Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di bawah kepemimpinan Ridwan Tjan. Demikian pula perolehan

kursi PPP di DPRD Provinsi semenjak dinakhodai justru semakin memperburuk hasilnya. Jika pada pemilu 2014 hanya memperoleh 1 kursi, justru pada pemilu 2019 partai ini tidak meraih satu kursi pun dari 45 kursi yang tersedia.

Gambar 5.2 Data Jumlah Perolehan Kursi PPP pada 10 Kabupaten/Kota Pemilu 2014 dan Pemilu 2019



Sumber: Data KPU Provinsi Maluku Utara, tahun 2014 dan 2019

Tidak ada langkah islah sejak perpecahan awal tahun 2014 antara faksi Ridwan Tjan (Konservatif) dengan Faksi Pembaharuan di bawah kendali Salim Khalik. Perpecahan ini semakin melemahkan PPP di Maluku Utara. Faksi konservatif di bawah gerbong Ridwan Tjan menekan seluruh anggota faksi pembaharuan, mendepak dari struktur wilayah dan tidak meloloskan pencalonannya dalam daftar calon legislatif 2014 di

DPRD provinsi Maluku Utara. Setelah terdepak ketua partai, Salim Khalik beralih menerima mandat sebagai ketua wilayah PPP versi Djan Faridz. Nama Salim Khalik dicoret dari daftar calon DPRD Provinsi Ternate-Halbar dianggap menjadi pesaing berat. Sejak Pemilu 2014 partai mengalami persaingan.

Konflik internal PPP semakin menguat menjelang penentuan formasi caleg untuk Pemilu 2014. Putusan PTUN mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz terhadap keabsahan muktamar di Surabaya. Sedangkan penolakan tetap disampaikan Ridwan Tjan yang menyatakan bahwa DPW PPP Malut versi M. Romahurmuziy tetap mengakui pengurus DPP PPP hasil muktamar di Surabaya. Karena menganggap muktamar itu telah sesuai dengan AD/ART partai. Selain muktamar VIII Surabaya yang diakui oleh pemerintah dari sisi legalitas partai, ancaman pemecatan terhadap beberapa pengurus yang mendukung hasil muktamar yang digelar kubu Suryadharma Ali (SDA).

Gambar 5.1. memperlihatkan DPD PPP Kota Ternate mulai kehilangan 1 kursi pada pemilu 2019. Bahkan hasil pemilu 2019 PPP tidak meraih kursi di 6 Kabupaten/Kota karena defisit suara dan kursi. Banyak faktor yang menyebabkan hilangnya suara PPP. PPP pada masa awal Reformasi memiliki suara yang signifikan di Tidore, Morotai dan Halmahera Selatan. Seiring dengan ketidakmampuan Sumberdaya internal, PPP diperparah oleh konflik di Provinsi telah menguras banyak tenaga dan pikiran hanya untuk menyelesaikan konflik yang belum berakhir normal. PPP semakin terpuruk dalam 2 kali pemilu terakhir. PPP kehilangan perwakilan di DPRD Provinsi Maluku Utara dan di Enam DPRD Kabupaten/Kota.

”Sejak saya masih kuliah di IAIN Ternate tahun 1991, saya sudah mengaktifkan diri di partai persatuan pembangunan ini. Bersama teman kuliah lainnya berharap partai ini lebih banyak membawa

aspirasi ummat Islam. Meskipun sistem politik Orde Baru telah membatasi partai kami ini, kami masih bisa bersaing dengan Golkar partai penguasa Orde Baru di beberapa daerah seperti Morotai, Tidore, Ternate, Pulau Makian dan Kayoa di Halmahera Selatan saat itu. Tetapi seiring dengan waktu reformasi maupun lahirnya partai politik Islam yang baru ini seperti PKS, PKB, PBB dan PAN sebenarnya turut mempengaruhi keberadaan partai ini...Bahkan kepemimpinan Rusdi Hanafi yang otoriter telah memicu konflik internal bagi pengurus baru setelah beliau ditarik masuk sebagai salah satu pengurus di DPP PPP di Jakarta (SA, 21/06/2018).

Ketidakmampuan Ridwan Tjan yang hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya di Ternate dan Halbar. PPP di masa Orde Baru jauh lebih ideologis dan solid. Karena ditempa oleh kekuasaan yang korup namun masih mampu meyakinkan pemilih bahwa PPP adalah partai ummat. Dengan cara demikian dapat mendorong kepercayaan publik terhadap PPP. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya kursi yang diraih dengan soliditas yang kuat. Sedangkan saat ini lebih banyak perilaku pragmatis menerpa partai ini.

“Persaingan dalam partai politik adalah hal yang biasa. Namun seharusnya persaingan itu tidak membawa perpecahan. Saya menyesali partai ini yang telah mengalami perpecahan dan harus membayar mahal dampaknya yaitu banyak kader partai yang handal dan berpotensi lebih memilih partai politik lain sebagai kelanjutan karir politik. Mereka tidak merasa nyaman bertahan dalam situasi ancaman pemecatan dan terancam tidak terakomodir dalam struktur baru. Termasuk saya sendiri adalah korban dari buah perpecahan ini. Dulu di masa Orde Baru, partai ini sangat solid, kompak dan selalu mengutamakan kepentingan partai...mungkin karena kami ditempa oleh tekanan politik dan kekuasaan rezim yang kuat...Saya khawatir dengan semakin merosotnya perolehan kursi di DPRD Provinsi karena hal ini sangat berpengaruh terhadap mental di Kabupaten dan Kota.

Jangan hanya karena hanya kepentingan beberapa orang lalu mengorbankan partai ini. (SA,19/06/2018).

Di tengah menguatnya persaingan partai politik dalam sistem multi partai, PPP menghadapi dua tantangan berat. Kedua tantangan tersebut antara lain persaingan internal partai di tengah kegagalan pada pemilu 2014. Idealnya, persaingan internal lazimnya ditandai oleh kesuksesan partai dalam pemilu. Hal ini berbanding terbalik antara kegagalan dalam pemilu namun diikuti oleh pola persaingan internal yang tidak sehat. Hal ini justru berdampak buruk bagi keberlangsungan di masa depan. Kekuatan PPP di parlemen akan semakin menurun setelah tidak ada perwakilan di DPRD Provinsi. Kegagalan hasil pemilu sebagai salah satu ukuran obyektif tentang eksistensi partai yang terjebak pada konflik internal yang berkepanjangan. Realitas ini memperbesar resiko bagi kegagalan partai.

5.1.4.2. Akar Konflik dan Persaingan Antar Faksi PAN

Pola rivalitas politik dalam persaingan internal masih berkisar pada Pemilihan Gubernur. Persaingan internal Jabatan kunci kursi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diperebutkan diawali dari pola yang sama berupa perebutan posisi kunci partai. Pilgub 2007, Pilgub 2013 dan Pilgub 2018 memberikan warna konflik internal yang menonjol. Jauh sebelumnya timbul penolakan dari kubu lainnya seperti Ibrahim Attibaan, Mansur Hasan, Jony Nabiu ketika rumor pencalonan Abdurrahim Fabanyo sebagai Gubernur Maluku Utara yang digulirkan di tengah kedatangan Amien Rais di Maluku Utara tahun 2004 silam.

DPW PAN Malut pernah mengusung Abdurrahim Fabanyo, senior faksi Ideologis, dan tokoh Muhammadiyah ini sebagai calon wakil Gubernur yang berpasangan dengan Abdul Gafur, tokoh

politik senior Orde Baru Pilgub 2007 namun berakhir dengan konflik Pilgub dalam sejarah politik electoral di Maluku Utara. KPU terpecah dalam dua kubu dengan dua keputusan yang berbeda (Nazriyah, 2018). Di kubu lainnya, DPW Partai Golkar juga mengalami faksionalisme dan persaingan internal antara Calon Gubernur Thaib Armyrn (Mantan Sekda Malut), Kader Golkar Orde Baru, dan etnis Makian versus Abdul Gafur, kader senior Golkar, etnis campuran Aceh-Patani Halmahera Timur (Misrina, 2010).

Politik Identitas dalam pilgub 2007 mempertajam faksi internal Golkar dan PAN serta politisasi etnis di Maluku Utara. Pasangan Thaib Armayn dan Abdul Gani Kasuba adalah representasi etnis besar Tobelo-Galela dan Makian. Demikian pula pasangan Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo yang diusung Golkar dan PAN adalah representasi dua kekuatan etnis Tidore, Ternate, Maba dan Patani.

Lima Tahun kemudian persaingan internal Pilgub kembali memecah PAN dalam dua Kubu yaitu Sahrin Hamid, faksi ideologis, etnis Tobelo bersaing ketat 2 kandidat Faksi pengusaha Imran Jumadil dari etnis Makian dan Umar Bopeng dari campuran Etnis Ternate Cina muslim. Rivalitas dalam persaingan internal Pilgub 2013 ini diawali perebutan posisi kunci. Hasil Muswillub DPW PAN telah memecah belah PAN menjelang Pilgub 2013. Meskipun Sahrin berhasil ikut dalam kontestasi Pilgub, namun PAN telah retak, sebagian besar faksi pengusaha memilih keluar dari PAN dan beralih ke partai Nasdem.

Kegagalan dua Pilgub sebelumnya, tidak menyurutkan langkah DPW PAN bertarung pada Pilgub Malut berikutnya. Dalam suasana memanas menjelang Pilgub Malut 2018, persaingan internal di tubuh PAN terbelah dalam dua Faksi yaitu Faksi Profesional Versus Faksi Pengusaha. Faksi pengusaha menjagokan Majid Husen, representasi etnis Makian dan Safi

Pauwah dari Etnis Sula. Kedua adalah pensiunan birokrat Maluku Utara, sedangkan Umar Bopeng adalah pengusaha yang pernah menjadi rival berat tahun 2013 melawan Sahrin Hamid (<https://www.jpnn.com/news/hadapi-pilgub-2018-pan-siapkan-tiga-kader/> 4 Maret 2017).

DPP PAN menjatuhkan pilihannya kepada Majid Husen mendampingi Calon Gubernur Muhammad Kasuba dalam Pilgub 2018. Sebagai Ketua PAN, posisi Majid Husen digoyang dan ancaman perpecahan internal mulai semakin buruk. di tengah kesibukan sebagai calon wakil gubernur, Majid Husen tidak mampu membuka ruang komunikasi politik yang dinamis dengan pengurus lainnya. Pilgub 2018 hanyalah kepentingan individual Ketua partai, tanpa melibatkan aspirasi dan keinginan faksi-faksi lainnya.

Rapat Pleno diperluas yang dihadiri pengurus wilayah dan 7 pengurus harian daerah dari 10 Kabupaten Kota, tanggal 29 Maret 2018. Kelompok yang bersebrangan dengan Majid Husen bersepakat memecat Majid Husen dari tampuk kursi ketua partai. Kelompok ini beralasan Majid Husen telah lalai menjalankan program kerja partai sejak terpilih tahun 2016. Hasil pleno ini mempercayakan ketua pelaksana harian (PLH) kepada Dr. Kasman Hi. Ahmad, mantan Rektor UMMU. Heterogenitas PAN dilatarbelakangi oleh elite dengan profesi yang berbeda. Pengusaha, mantan birokrat, akademisi dan kalangan praktisi politik lainnya berpotensi mengancam internal partai

Sejak tahun 2012 PAN ketertarikan terhadap eksistensi PAN sebagai partai menengah menjadi daya Tarik bagi politisi karir dalam memanfaatkan berbagai momen pilkada dan pemilu legislatif. Menjelang Pilgub Malut 2013, 4 kursi PAN di DPRD Provinsi menjadi daya Tarik bagi elite partai dalam mengendalikan dukungan terhadap Pilgub. Daya Tarik antara Pejabat ketua

wilayah, Sahrin Hamid dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai wilayah, Umar Bopeng dalam perebutan Ketua Partai justru mempertajam penguatan ke arah perpecahan kedua faksi yang memiliki kepentingan yang sama. Motivasi Pilgub 2014 dan Pemilu 2014 menjadi daya Tarik bagi kedua faksi.

Gambar 5.3 Suasana Rapat Pleno Diperluas DPW PAN, 2018



Sumber:<https://www.dimensinews.co.id/6094/sibuk-konsolidasi-ketua-pan-malut-dilengserkan-melalui-rapat-pleno.html>

Titik konflik antar faksi dalam PAN memuncak saat Musyawarah Wilayah Luar Biasa tahun 2012 karena buruknya kepemimpinan Imran Djumadil. Faksi yang berkonflik adaah kehadiran salah satu tokoh muda PAN, Sahrin Hamid. Sebagai orang dekatnya Ketua Umum DPP PAN, Hatta Radjasa, Sahrin Hamid dipercayakan sebagai pejabat ketua PAN di Maluku Utara. Tugasnya mempersiapkan Musyawarah setelah sebelumnya kepemimpinan Imran Djumadil dibekukan oleh DPP PAN tahun

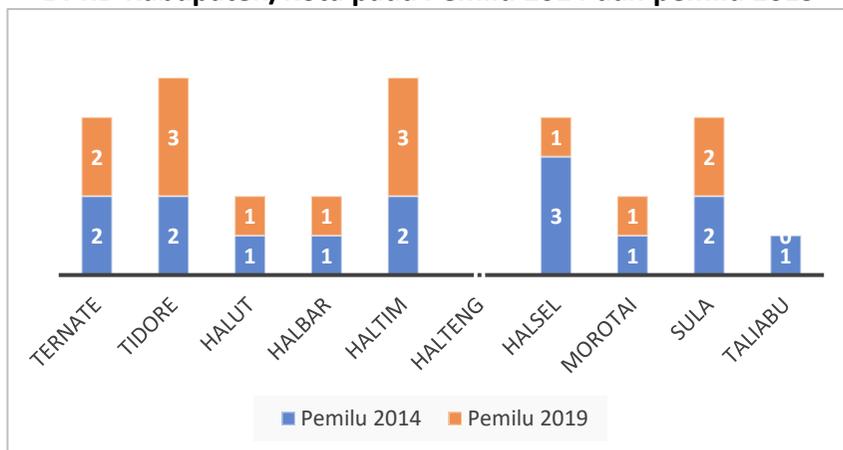
2011. Imran dinilai gagal dalam mengembangkan PAN karena buruknya kepemimpinan sebelumnya, serta lebih fokus dengan bisnis.

Sebagai seorang kader HMI dan dibesarkan di Partai Amanat Nasional ini, sejak awal saya telah mengabdikan diri baik semasa masih mengendalikan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Provinsi Jawa Barat tahun 1999 sampai 2001 maupun saat menjabat sebagai ketua DPP BM PAN selama satu periode tahun 2003-2009.... Saya ingin berkarir di daerah sendiri (Maluku Utara) masalah mosi tidak percaya Pimpinan DPD PAN 7 kabupaten/kota dari 10 DPD....kemudian DPP memberikan mandate kepada saya untuk menyelesaikan dan melanjutkan sisa kepemimpinan pada tahun 2011 untuk mempersiapkan musyawarah wilayah luar biasa... di masa kepemimpinan saya, PAN mempertahankan 4 kursi. kami kehilangan kursi di daerah pemilihan Halmahera Utara-Morotai... tekanan politik dari DPD maupun lawan politik dalam struktur pimpinan wilayah mencoba menekan agar saya tidak lagi mencalonkan kembali sebagai ketua karena gagal dalam Pilgub...situasi ini saya rasakan turut mempertajam situasi internal partai....intinya kami berkomitmen mendorong agar PAN mampu bertahan di tengah tingginya kompetisi kepemimpinan. (SH, 25/06/2018).

Analisa ini mengarah pada gambaran situasi dilematis PAN yang terbelah atau bahkan terancam ditinggalkan faksi Ideologis dan kalangan intelektual yang menjadi ciri khas PAN selama ini. Penyelamatan organisasi dilakukan. Namun Musyawarah PAN akhir Desember 2012 di Kabupaten Pulau Morotai berlangsung kacau balau. Kekacauan ini berawal dari faksi pengusaha yang menolak kehadiran Sahrin Hamid di Maluku Utara. Faksi pengusaha mendorong Umar Bopeng maju dalam pencalonan Ketua PAN. Sedangkan faksi ideologis memberikan kepercayaan kepada Sahrin Hamid.

Musyawarah berakhir ricuh. Umar Bopeng dan seluruh anggota faksi Pengusaha menyatakan *walk out* meninggalkan forum Musyawarah. Sedangkan Sahrin Hamid dan gerbongnya tetap melanjutkan Musyawarah wilayah. Meskipun tidak ada quorum (2/3) peserta musyawarah yang hadir, hasil Musyawarah memutuskan Sahrin Hamid didaulat sebagai ketua PAN terpilih 2012-2017. Kekalahan Umar Bopeng, memicu mayoritas faksi Pengusaha pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem), setelah ketua Nasdem Maluku Utara, Mufti Baba dan seluruh pengurusnya menyatakan mundur Nasdem karena pergolakan politik dalam internal DPP Nasdem antara Surya Paloh dengan Hary Tanoesoedibjo.

Gambar 5.4. Perbandingan Perolehan Kursi PAN untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 dan pemilu 2019



Sumber Data: KPU Kabupaten/Kota Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

Beberapa eks PAN berhasil memperoleh kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara pemilu 2014 seperti Helmi Umar Muksin dan Muhlis Tapi Tapi. Demikian pula Nini Bopeng, istri Umar Bopeng berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kota Ternate,

setelah sebelumnya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Ternate utusan PAN. Pemilu 2009 PAN meraih 4 kursi DPRD Provinsi dan 3 kursi pada pemilu 2014. Helmi Umar Muksin sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi dari PAN pada pemilu 2009. Beliau terpilih dari daerah Pemilihan Maluku Utara 4, Kabupaten Halmahera Selatan. sedangkan Muhlis Tapi-Tapi adalah mantan Ketua PB HMI, memulai karir politik di PAN Maluku Utara tahun 2010.

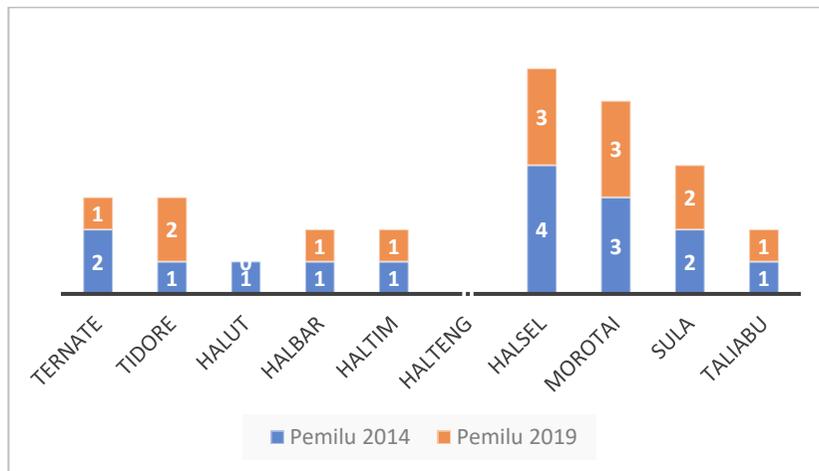
5.1.4.3. Persaingan Internal PKS dan Politik Familisme

Masalah keberhasilan partai dalam pemilu tentu saja memancing persaingan di internal partai. Kesuksesan PKS sebenarnya awalnya ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Selain mampu bersaing dengan Golkar pada pemilu 2009, kesuksesan PKS juga melalui 3 periode masa kepemimpinan Bupati sejak tahun 2004. Namun menjelang Pilgub 2018, partai ini mengalami perpecahan di level struktur partai pengurus daerah yang berimbas pada menurunnya perolehan suara di pemilu 2019. Berdasarkan data perolehan kursi pemilu 2009 (4 kursi), Pemilu 2014 (5 kursi) dan pemilu 2019 (2 kursi) PKS justru mengalami inkonsistensi perolehan kursi. Demikian pula perolehan kursi di 10 Kabupaten/Kota kembali menurun.

Dinamika PKS pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 dapat jelaskan dalam dua aspek. PKS hanya mendapatkan sedikit kesuksesan di Halmahera Selatan dan Morotai. Berdasarkan data perbandingan tersebut di atas (Gambar 5.1), Halmahera Selatan dapat sebagai penyokong utama suara PKS selama ini. Selain kehilangan 1 kursi di Halmahera Selatan, PKS juga kehilangan 3 kursi di DPRD Provinsi pada pemilu 2019. ketiga kursi antara lain 1 kursi dari daerah pemilihan Halmahera Selatan, 1 kursi daerah pemilihan Sula-Taliabu dan 1 kursi di Daerah pemilihan Ternate-Halbar. Sejak terpilihnya kader PKS, Muhammad Kasuba sebagai Bupati

Halmahera Selatan 2 periode berturut turut (2005-2010 dan 2010-2015), PKS juga mengalami kenaikan perolehan kursi di Halmahera Selatan sebanyak 7 kursi dari total 30 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pemilu 2009 namun berkurang pada pemilu 2014 hanya 4 kursi dan pemilu 2019 berjumlah 3 kursi.

Gambar 5.5. Perbandingan Perolehan Kursi PKS untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 dan pemilu 2019



Sumber: 10 KPU Kabupaten/Kota Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

Ada masalah yang krusial, mengapa kesuksesan dalam Pemilu tidak diikuti dengan inkonsistensi perolehan kursi di legislatif. Pada pemilu 2009, Bahrain Kasuba adalah salah satu caleg yang terpilih dan dipercayakan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 2009-2014. Namun pada pemilu 2014, PKS kehilangan 3 kursi dari 7 kursi pada pemilu sebelumnya. Setahun menjelang Pilkada Halsel 2015, PKS telah mempersiapkan Bahrain Kasuba sebagai suksesor Muhammad Kasuba.

Bahrain mendundurkan diri dari anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2019) dan mencalonkan sebagai calon Bupati Halmahera Selatan yang berpasangan dengan Iswan Hasjim periode 2015-2019. Melalui dukungan PKS dan Hanura, pasangan berhasil terpilih sebagai kepala daerah. Memasuki tahun 2017, rekrutmen elite partai untuk Pilgub 2018 dilakukan oleh semua partai politik, tidak terkecuali PKS. DPP PKS awalnya telah memberikan rekomendasi kepada petahana KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan syarat harus berpasangan dengan salah satu pimpinan partai dari Gerindra atau PAN. Otomatis ditolak oleh AGK karena DPP PKS sengaja tidak memberkan pilihan.

Penolakan AGK atas persyaratan ini, diikuti dengan sikap politiknya yang lebih memilih pasangan wakilnya dari PDI-P, Yasin Ali (Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2 periode). DPP PKS menarik dukungannya kemudian dialihkan ke adik kandungnya, Muhammad Kasuba yang berpasangan dengan Ketua PAN Maluku Utara, Majid Husen. Majid Husen adalah pensiunan Birokrat, mantan Setda Provinsi Maluku Utara dari tahun 2013-2016 karena telah memasuki masa pensiun PNS.

AGK masih berstatus sebagai anggota PKS, namun berhasil meyakinkan PDI-P. Tanpa dukungan PKS pun AGK tetap yakin memenangkan Pilgub Maluku 2018. Dengan menggunakan dua partai PDI-P dan PKPI, Pasangan Abdul Gani Kasuba dan Yasin Ali terpilih pada pilgub Maluku 2018. DPP PKS lebih memilih Muhammad Kasuba sebagai sikap partai dalam pilihan yang sulit untuk tetap mempertahankan keberadaan PKS dalam jangkauan pemerintahan Provinsi. Perpecahan internal tidak terhindarkan antara pendukung AGK dan pendukung Muhammad Kasuba. meskipun secara organisatoris, DPW PKS mendukung secara resmi terhadap pasangan yang diusungnya, namun beberapa pengurus DPW PKS secara diam-diam mendukung AGK seperti

Basrin Kanaha (anggota DPRD malut periode 2014-2019, Alimin Muhammad, (Anggota DPRD Provinsi Malut 2 periode pemilu 2009-2014 dan pemilu 2014-2019), Is Syuaib (Anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019).

Kesuksesan PKS dalam pemilu dapat saya bandingkan 4 kursi pemilu 2009 dan 5 kursi pemilu 2014 dari total 45 kursi di DPRD Maluku Utara. Dalam masa kepemimpinan kami, PKS memiliki tokoh politik yang cukup berpengaruh di Kabupaten Halmahera Selatan karena selalu memenangkan Pilkada 3 kali berturut-turut. Kiyai Haji Abdul Gani Kasuba sudah dua Periode sebagai wakil gubernur tahun 2007 sampai 2013 dan sebagai gubernur tahun 2013-2018. Jika pertanyaannya partai yang sukses akan alami persaingan internal, justru kami di sini mungkin karena mekanisme pemilihan ketua umum wilayah mampu meredam potensi konflik maka resiko persaingannya masih bersifat normal, tidak menimbulkan perpecahan atau dualisme kepemimpinan. (AM, 27/06/2018).

Persaingan yang ketat ini juga diikuti pada hampir beberapa keluarga dan kerabat Kasuba seperti pengusaha dan kontraktor yang berada di belakang kedua politisi bersaudara. Daya tariknya terhadap masing-masing figur menciptakan dua kelompok yang memiliki keinginan tinggi dalam Pilgub 2018. Perpecahan internal ini menggambarkan tentang kepentingan politik klan Kasuba yang melampaui harmonisasi keluarga dan soliditas internal partai secara perorangan. Di belakang Muhammad Kasuba berdiri beberapa eks akademis Muhammadiyah yang beretnik Tobelo dan Galela seperti Dr. Kasman Haji Ahmad (Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, aktivis PAN Maluku Utara), Dr. Thamrin Pangeran (Mantan Werek 3 UMMU). Sedangkan di kubu AGK berdiri sekumpulan kontraktor pemburu proyek dari etnis China, pengusaha local yang lebih identik

penyatuan kekuatan politik Etnik yang berkolaborasi dengan jaringan birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur.

5.1.4.4. Pilgub 2018: Menguatnya Pragmatisme Faksi dan Politik Dinastik Familisme

Pilgub 2013 adalah pertarungan Jilid I antara kekuatan politik familisme antara Ahmad Hidayat Mus (AHM)-Hasan Doa Vs Abdul Gani Kasuba (AGK)-Muhammad Natsir Thaib (Manthab) . Pada Pilgub 2013, AGK berhasil mengalahkan AHM. AHM didukung oleh modal ekonomi yang lebih besar dan kekuatan Partai besar (Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, PDS, PKPB) sedangkan AGK didukung oleh Partai menengah dan kecil seperti PKS, Partai Republikan, PDK, PKB, PKPI, PPRN. Namun popularitas politik dan elektabilitas yang masih terpelihara sejak menjadi anggota DPR RI dan Wakil Gubernur tahun 2007 mengantarkan AGK-Manthab Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2014-2019.

Pilgub 2018 disebut sebagai pertarungan Jilid II antara AGK Vs AHM. Persaingan internal antara AGK dengan adik kandungnya MK menciptakan dua faksi yang saling berhadapan di internal PKS maupun dalam lingkaran keluarga Kasuba, dan etnis Tobelo, Galela, Kao, Loloda yang masih berada dalam rumpun etnis Hibualamo. Sedangkan AHM juga menghadapi masalah lainnya terkait dengan status tersangka yang ditetapkan KPK sebagai tersangka menjelang 2 hari pemungutan suara.

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil sengketa Pilgub Malut dengan perolehan suara sebagai berikut; pasangan calon Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar memperoleh 175.749 suara, Nomor Urut 2 Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin memperoleh 139.365 suara, Nomor 3 Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali memperoleh

176.669 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 4 Muhammad Kasuba dan Majid Husen memperoleh 63.902 suara. Hasil putusan ini memastikan AGK memimpin kembali Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024.

Tabel 5.5 Persaingan internal & Politik Familisme pada Pilgub 2018

KELUARGA	CALON GUBERNUR	ETNIS	Modal Dukungan Partai & Tokoh Politik
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Tobelo	PDI-P & PKPI; Hein Namotemo (mantan Bupati Halut 2 periode); Mantan Ketua Golkar Halut; Ketua AMAN Indonesia; Bahrain Kasuba, Bupati Halmahera Selatan periode 2015-2020 adalah ponakannya Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba; dukungan Danni Missy, Bupati Halmahera Barat & sebagai pengurus PDI-P Provinsi Maluku Utara; Dukungan Muhammad Sinen, Wakil Walikota Tidore 2015-2020; Kepulauan & Ketua DPW PDI-P Prov. Maluku Utara
	Muhammad Kasuba	Tobelo	PKS, PAN, Gerindra; Sebagai adik kandung dari Abdul Gani Kasuba
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Buton	Golkar & PPP; Dukungan Aliong Mus, Bupati Pulau Taliabu (Adik kandung Ahmad Hidayat Mus; Dukungan Frans Maneri, Bupati Halmahera Utara dan Ketua Golkar Halmahera Utara; Dukungan Edi Langkara, Bupati Halmahera Tengah, Pengurus Golkar Provinsi Maluku Utara; Alien Mus, adik kandung Ahmad Hidayat Mus (Ketua DPRD Provinsi Maluku

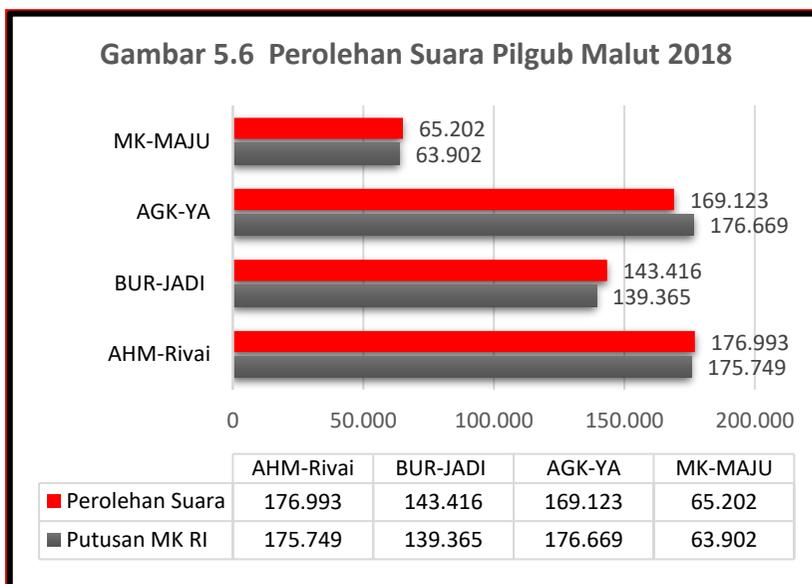
Utara 2014-2019 dan Ketua Golkar
Provinsi Maluku Utara; Syamsir Andili
(mantan Walikota Ternate 2 periode;
Mantan Ketua Golkar Kota Ternate;

Abdurrahman Burhan			
Abdurrahman	Tidore	Nasdem, Demokrat, Hanura, PBB, PKB;	
		Sebagai Walikota Kota Ternate Dua	
		Periode; dukungan Etnis Ternate;	
		Etnis Tidore, Maba dan Patani	

Sumber: Diolah dari berbagai berita media online dan dokumen

Dua tokoh PKS dan masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung bertarung dalam Pilgub. Keduanya memperebutkan suara di kantong-kantong Etnik Tobelo dan Galela yang tersebar signifikan di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan daerah-daerah lainnya. Namun petahana AGK jauh lebih unggul pada pemilih non etnik Tobelo dan Galela. Di balik keunggulan AGK, PDI-P menggunakan kekuatan partai dan basis yang solid di beberapa daerah turut mengungguli pasangan calon lainnya. Ketokohan figur dan kekuatan finansial Petahana dan mesin partai politik PDI-P menyatu dalam Pilgub.

Pilgub Maluku 2018 telah merubah konstalasi politik di Maluku Utara. sebagai akumulasi dari perebutan posisi kunci yang terbatas. Beberapa yang diuntungkan, dan yang lainnya dirugikan dalam kelanjutan politik karir. Partai Pengusung AHM-Rivai adalah Golkar dan PPP. Terpuruknya PPP dalam Pemilu 2014 dikuatirkan akan berimbas pada Pemilu 2019. Harapan terhadap akses sumberdaya dan logistik menemui jalan buntu akibat kekalahan pasangan AHM-Rivai yang diusungnya. Demikian pula dinasti politik AHM telah berakhir setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus fiktif anggaran pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Taliabu.



Sumber: Data Pleno KPU Provinsi Malut, 2018

Pasangan Kedua, Bur-Jadi memiliki nasib yang berbeda. Burhan kembali menjabat sebagai Walikota Ternate. hal ini sesuai dengan aturan, bahwa Kepala Daerah hanya diberlakukan Cuti saat mencalonkan diri. Sedangkan pasangannya, Ishak Djamaludin (JADI) adalah seorang PNS dan menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) yang telah mengundurkan diri demi memperebutkan posisi kunci yang terbatas itu. untuk memenuhi persyaratan calon, JADI mundur dari PNS dan jabatan Rektor UMMU. Pasangan ketiga, AGK-YA beruntung dalam kontestasi ini. Masa jabatan Gubernur AGK sampai bulan Mei 2019. Pilgub 2018 mengantarkan Abdul Gani Kasuba-Yasin Ali (AGK-YA) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024. Pasangan wakil Gubenur Yasin Ali adalah kader inti PDI-P dimana sebelumnya menjabat dua periode Bupati Halmahera Tengah.

Pasangan keempat, Muhammad Kasuba- Majid Husen (MK-Maju) setelah gagal dan terpukul menempati urutan terakhir dalam perolehan suara, kembali mencalonkan di Legislatif. Muhammad Kasuba menggunakan PKS untuk mencalonkan diri di DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara. Sedangkan Majid Husen masih memilih PAN sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 4 (Zona Kabupaten Halmahera Selatan).

Tabel. 5.6 Ringkasan Penyebab Faksionalisasi Internal Partai

Penyebab	PPP	PAN	PKS
Heterogenitas dan konflik Ideologi	(1) Disharmonisasi antar etnis Ternate dengan Etnis lainnya dalam struktur partai (2) tidak berimbangnya representasi etnis dalam struktur partai dan dominasi Etnis Ternate	(1) heterogenitas Ideologi berbasis ormas Muhammadiyah aktivis muda NU, HMI dan kalangan pengusaha; (2) partai terpolarisasi dalam faksi ideologis, faksi pengusaha dan faksi professional	(1) dominasi elite Etnis Tobelo dan keluarga Kasuba dalam keputusan dan pengendalian kebijakan Partai (2) Partai terpolarisasi dalam faksi Idealis, faksi Pragmatis dan faksi kaum muda
Motivasi Kesejahteraan & Dilema Kolektivisme Vs Individualisme	(1) lebih banyak dikendalikan Faksi Konservatif atas akses sumberdaya partai terbatas (2) keluarga Hanafi memanfaatkan koneksi partai dalam dominasi bisnis dan akses kekuasaan terhadap pemerintah	(1) Faksi pengusaha memiliki motivasi yang tinggi yaitu mengendalikan keuangan partai dan mempengaruhi kebijakan internal partai; (2) Motivasi Faksi pengisaha dalam mengejar rente proyek telah mempertajam	(1) Kesuksesan dalam Pemilu, Pilkada dan Pilgub lebih banyak dikendalikan oleh keluarga Kasuba; (2) Motivasi kesejahteraan telah menciptakan perpecahan internal Keluarga Kasuba di PKS (3) PKS tergantung pada sumber

Penyebab	PPP	PAN	PKS
		pengelompokan di partai	daya keluarga Kasuba dan dilemma bagi keutuhan partai
Perebutan Posisi Kunci Partai	<p>(1) pemecatan DPP PPP atas ketua terpilih Salim Khalik atas intervensi Rusdi Hanafi, klik kuat faksi konservatif dan memiliki hubungan baik dengan Surya Dharma Ali</p> <p>(2). Dominasi Faksi Konservatif dalam perebutan posisi kunci struktur partai</p> <p>(3) Dualisme kepemimpinan DPW PPP Malut dipengaruhi dualisma DPP PPP</p>	<p>(1) perebutan posisi ketua partai berulang kali yaitu tahun 2003, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019</p> <p>(2) keterlibatan faksi Ideologis, Faksi Pengusaha dan Faksi professional dalam konflik perebutan posisi kunci partai</p> <p>(3) perebutan posisi kunci partai berdampak luas terhadap perpecahan antar faksi dan pembelotan faksi pengusaha ke partai Nasdem yang berdampak terhadap menurunnya perolehan kursi hasil pemilu 2014;</p>	<p>(1) Husni Salim Kasuba (faksi Idealis) merebut tampuk kursi ketua PKS Halmahera Selatan tahun 2017 yang dikendalikan Muslimin (Loyalis Faksi Pragmatis Abdul Gani Kasuba (Gubernur Malut dan Calon Gubernur Malut Pilgub 2018;</p>

Penyebab	PPP	PAN	PKS
Kesuksesan Partai & Persaingan Internal	<p>(1) semakin gagal dalam Pemilu telah semakin mempertajam persaingan internal;</p> <p>(2) persaingan internal antar etnis Ternate Vs Non-Ternate</p> <p>(3) konflik Faksi Konservatif Etnis Ternate Vs faksi Pembaharuan (etnis tobelo, Makian dll)</p> <p>(3) persaingan internal dalam bentuk familisme dan etnis</p>	<p>(1) fluktuasi sukses & gagal dalam pemilu; (2) Pilgub 2014 & Pilgub 2018 sebagai pemicu utama dalam persaingan antar faksi Ideologis Vs faksi pengusaha dan faksi faksi professional</p>	<p>(1) sukses dalam pemilu, Pilkada Halsel, Morotai, Sula & Pilgub 2007, 2013 dan 2018</p> <p>(2) Gagal dalam Pemilu 2019</p> <p>(3) Konflik politik Dinastik familisme internal keluarga Kasuba pengaruhi hasil buruk Pemilu 2019.</p>

Sumber: Hasil Analisis dan Ringkasan

Berdasarkan table 5.6 tentang Ringkasan Penyebab Faksionalisme Internal Partai tersebut di atas. beberapa hal utama dapat disimpulkan. *Pertama*, penyebab awal terbentuknya faksi dimulai dari kondisi internal partai politik yang heterogen. Namun heterogenitas yang memicu konflik ideologi sebenarnya pada eksistensi aktor politik yang terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok etnik. Partai politik Islam PPP, PAN dan PKS tidak bebas dari pengaruh identitas politik Etnis maupun relasi genealogis dengan organisasi masyarakat berbasis agama seperti NU dan Muhammadiyah. sejumlah fakta menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah kalah bersaing dibandingkan dengan identitas politik etnis yang lebih lokal dan lebih kuat ikatan kultural di berbagai arena faksi dan partai. Pada perkembangan selanjutnya, identitas politik keluarga, etnis dan pemodal lebih menentukan pengelompokan faksi seperti faksi Konservatif di PPP didominasi keluarga dan kerabat dekat Rusdi Hanafi beretnis Ternate , faksi Idealis dan faksi pragmatis didominasi Keluarga Kasuba etnis Tobelo di PKS, dan faksi Pengusaha sebagai representasi pemodal di PAN.

Kedua, pada indikator teori Boucek mengklaim bahwa motivasi kesejahteraan semakin meningkat ketika partai mengalami kesuksesan. Namun fenomena sangat kontras dengan fakta PPP di tengah kegagalannya dalam pemilu, semakin tajam perebutan sumberdaya partai yang memiliki jaringan dan akses Bisnis dan proyek dengan pemerintah daerah. Perolehan 6 kursi dari pemilu 1999, 2004 4 kursi, 2009, 2 kursi, 2014 1 kursi dan 2019 tanpa kursi perwakilan. Kegagalan PPP dari pemilu ke pemilu telah berpengaruh pada akses sumberdaya partai semakin terbatas. Dominannya faksi konservatif etnis Ternate di PPP menciptakan polarisasi akses sumberdaya yang tidak berimbang. Berbagai faksi di PAN juga lebih tajam motivasi sumberdaya

terutama faksi Pengusaha yang memiliki motivasi yang tinggi dalam mengendalikan keuangan partai dan mampu mempengaruhi kebijakan partai. Faksi ini beranggotakan pengusaha yang masih memiliki hubungan keluarga (Imran Djumadil dan Baharullah Karim) etnis Makian, dan tipe suami-istri (Umar Bopeng dan Husni Bopeng dari etnis Ternate). Demikian pula motivasi kesejahteraan di internal PKS lebih dikendalikan oleh Keluarga Kasuba. Motivasi ini didorong oleh jejaring patronase etnis Tobelo yang kuat di kedalam pemerintahan dan melayani loyalis faksi. Modalitas PKS bergantung pada pemanfaatan dua tampuk pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara. Motivasi kesejahteraan ketiga Partai tersebut memiliki kemiripan karena didominasi keluarga, pemodal dan etnis.

Ketiga, Perebutan posisi kunci menempatkan PAN lebih kompetitif. meskipun sebagai partai Islam modernis, PAN lebih terbuka dan plural menerima berbagai ideologi, etnis dan aktor politik yang bermain di kontestasi pemilu dan persaingan internal. Jabatan Ketua Partai diperebutkan sejak tahun 2011, 2013, 2015, 2018 dan 2019 yang didorong dan didominasi oleh motivasi persaingan internal pada setiap Pilgub dan Pemilu. Kondisi yang berbeda pada PPP terjadi perebutan ketua partai berbuntut Panjang pada dualisme kepemimpinan partai yang didukung oleh dua faksi Pimpinan pusat, sedangkan pada PKS perebutan posisi kunci ketua partai relatif kondusif. Namun motivasi dominan adalah ketua partai dianggap sangat strategis sebagai batu loncatan karir politik di arena Pilgub. PKS dan PAN adalah dua rival partai politik di arena Pilgub sejak 2007, 2014 dan 2018.

Keempat, persaingan internal adalah satu-satunya faktor dominan dalam penyebab faksionalisme. Persaingan internal antar faksi mendorong masing-masing aktor politik yang

menggunakan segala cara untuk menguasai dan merebut posisi kunci partai dan penguasaan terhadap akses sumberdaya partai. Jika membandingkan hubungan antara etnis dan persaingan internal, keduanya memiliki relasi erat. Partai politik sebenarnya sekedar sebagai instrumen politik semata bagi kepentingan etnis dalam Pilgub. Namun, yang membedakannya, kekuatan etnis dieksploitasi untuk kepentingan faksi. Hal ini dapat menggambarkan fenomena rivalitas di internal Kasuba antara Abdul Gani Kasuba (Gubernur Petahana) dan Muhammad Kasuba (mantan Bupati Halmahera Selatan). Bahkan kemenangan sebagai Wakil Gubernur pada Pilgub tahun 2007 dan Gubernur pada Pilgub Tahun 2014 ditentukan oleh basis etnis Tobelo dan Galela di Halmahera Selatan , sebagai pemilih terbesar di provinsi Maluku Utara.

Uraian singkat ini dapat mengerucut pada beberapa telaah kritis dan temuan tentang 4 (empat) penyebab faksionalisme. *Pertama*, heterogenitas etnis sebagai faktor internal faksi yang lebih dominan dibandingkan dengan keyakinan ideologi Islam. Asumsi ini lebih sederhana dan mudah dipahami bahwa satu keyakinan aqidah tidak memiliki korelasi erat dengan kohesivitas sosial antar aktor dalam partai Islam di Maluku Utara. Etnis sebagai pembeda kepentingan yang meluas.

Kedua, berbeda dengan teori Boucek , pada kajian ini menemukan banyak hal yang bertentangan dengan beberapa indikator awal. Misalnya, persaingan internal lebih banyak dilatarbelakangi oleh kegagalan partai dalam pemilu seperti PAN dan PPP. Sedangkan kesuksesan PKS dalam Pilkada , Pemilu dan Pilgub mendorong menguatnya persaingan internal pada Pilgub 2018. Kekalahan Muhammad Kasuba pada Pilgub 2018 dampaknya meluas dan mempengaruhi hasil Pemilu PKS atas pemilu 2019. Gagalnya Abdul Gani Kasuba pada Pilgub 2018 yang

diusung PDI-P dan PKPI maupun gagalnya Muhammad Kasuba yang diusung PAN, PKS dan Gerindra justru berimbas dan semakin mempertajam persaingan internal di pemilu 2019. Persaingan juga masih berlanjut pada internal keluarga Kasuba. Kegagalan Muhammad Kasuba caleg DPR RI dan putra kandungnya Bassam Kasuba sebagai caleg anggota DPRD Provinsi Malut pada Pemilu 2019 merupakan imbas dari rivalitas dan perpecahan dukungan di internal Etnis Tobelo dan Galela. Padahal Pada pemilu terdahulu sejak 1999, 2004, 2009 dan 2014, keterwakilan PKS sebagai anggota DPRD Provinsi PKS dari caleg etnis Tobelo dan Galela selalu terwakili melalui jejaring patronase keluarga Kasuba yang kuat dan solid.

Ketiga, kasus ini dapat disimpulkan bahwa pola persaingan internal semakin meruncing pada pemilu berikutnya jika salah faksi sukses dan faksi lainnya gagal lalu bersaing kembali pada momentum yang sama atau berbeda. Data terbaru tentang Pilkada Halmahera Selatan 2020 membenarkan temuan baru ini. Bassam Kasuba diusung sebagai calon Wakil Bupati Halmahera Selatan melawan petahana, Bahrain Kasuba sebagai calon Bupati. Bola salju rivalitas menggelinding antara dua faksi yang sukses dan gagal ini telah berbeda dengan keumuman teori Boucek yang hanya memfokuskan pada kesukses partai, namun gagal menggambarkan faksi yang gagal.

5.2. Keterlibatan Aktor Familisme, Pola Pengorganisasian dan Motivasi Faksi

5.2.1. Aktor, Faksi dan Dualisme Kepemimpinan PPP

Memahami keterlibatan aktor PPP dalam berbagai konflik antar faksi dapat dikenali dari model dualisme kepemimpinan pasca berakhirnya kursi kepemimpinan Rusdi Hanafi. Klasifikasi

aktor dalam bentuk faksi, model pengorganisasian dan Motivasi berdasarkan Teori Bettcher (2005). Temuan data dan berbagai hasil kajian memunculkan dua pola faksi yang bermain di arena konflik dualisme struktur wilayah. Tipe aktor masih berkuat pada pola klientelisme yang kuat pada masa kepemimpinan Rusdi Hanafi.

Partai bergantung pada kemampuan finansial dan jaringan patronase yang kuat di kalangan pemilih muslim tradisional di Maluku Utara. Sebagai tokoh politisi Muhammadiyah, mentalitas dalam mengendalikan partai menyerupai model klientelisme yang kuat. Pada akhir kepemimpinannya, gejala perpecahan internal mulai menggerogoti kekuatan partai di parlemen. Sekurang-kurangnya menurunnya perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara dari pemilu ke pemilu membenarkan gejala ini. Sepeninggalnya PPP mengalami perpecahan dalam dua faksi. yaitu Konservatif yang didominasi pendukungnya adalah Etnis Ternate.

Tipikal politisi penggantinya masih mengandalkan pengendalian kursi perwakilan dengan pola lama klientelisme namun semakin melemah karena selalu mengalami benturan dengan faksi Pembaharuan yang masih bersikukuh bertahan dan menjadikan PPP sebagai satu-satunya partai yang diminati. Meskipun beberapa anggota faksi Pembaharuan (Wahdah Zainal Imam, Sahril Taher, Sadiq Diadon memilih keluar dari PPP), namun Ketua Lama yang dilengserkan, Salim Khalik masih bertahan dan memulai membangun struktur baru di bawah Djan Faridz.

Beberapa Aktor faksi Pembaharuan memilih bertahan karena konflik dualisme di level nasional juga belum berakhir, tanpa islah dan masing-masing tetap bertahan mengklaim sebagai pewaris partai. Dualisme kepemimpinan, klientelisme kuat dan

lemah maupun faksi yang masih berkepentingan dengan basis massa tidak mampu disatukan. Pemilu 2019, Faksi Pembaharuan menggembosi faksi Konservatif yang berakhir gagalnya PPP meraih kursi di seluruh Daerah Pemilihan DPRD Provinsi. Kegagalan ini berimbas pada ketua PPP wilayah. Selain gagal mempertahankan kursi perwakilan untuk dirinya sendiri, PPP juga redup di tengah hiruk pikuk politik pilkada 2020. Kepemimpiann partai yang Personalistik itu tidak diimbangi dengan kekuatan finansial yang kuat. Klaim PPP sebagai rumah ummat Islam kehilangan kekuatan dan elektabilitas di bawah bayang-bayang perpecahan yang melibatkan sentimen etnis, keluarga dan pertemanan.

Tabel 5.7. Aktor, Model Pengorganisasian dan Motivasi Faksi PPP

Aktor/Keluarga	Partai/Faksi	Model Pengorganisasian dan Motivasi Faksi
Rusdi Hanafi	PPP/Konservatif	<i>Klientelisme kuat</i> ; pengusaha, etnis Ternate, mantan ketua wilayah PPP Prov. Malut, aktivis Muhammadiyah
Ridwan Tjan,	PPP/Konservatif	Klientelisme lemah; Pengusaha, Etnis Ternate, memiliki hubungan keluarga dengan Rusdi Hanafi, ketua DPW PPP Malut
Isa Hanafi,	PPP/Konservatif	Pengusaha, Putra Kandung Rusdi Hanfi
Walid Hanafi	PPP/Konservatif	Pengusaha, Putra Kandung Rusdi Hanafi.
Salim Khalik	PPP/ Pembaharuan	<i>Kepentingan</i> ; Aktivis HMI; Etnis Makian; memiliki hubungan keluarga dengan Rusdi Hanafi dari pihak ibunya.
Sadiq Diadon	PPP/ Pembaharuan	Pengusaha-, Alumni PII, etnis Tobelo.
Wahdah Z. Imam	PPP/ Pembaharuan	Klientelistik Kuat, Politisi, Akademisi, alumni HMI, Etnis Makian.

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

5.2.2 Faksi Orientasi Kepentingan di PAN

Berbeda dengan PPP yang didominasi aktor dengan pola faksi klientelisme keluarga dan dualism kepemimpinan, keterlibatan aktor faksi di PAN lebih bercorak faksi kepentingan, relasi terbatas antar keluarga dan tumbuhnya kekuatan politik modalitas yang kolektif pada faksi pengusaha. Konflik dan perpecahan internal PAN mendorong elite faksi memilih pindah ke partai Nasdem.

Masing-masing aktor memiliki identitas politik kultural yang bervariasi seperti Muhammadiyah, HMI, PII, Pengusaha, Eks Golkar, Eks Birokrat, organisasi sayap partai BM PAN, dan. Akademisi. Figur faksi yang kharismatik, Abdurrahim Fabanyo adalah tokoh politik awal PAN di Maluku Utara masih menjaga keseimbangan antara basis massa warga Muhammadiyah dengan kelompok yang lebih plural. karakter pengorganisasi dan motivasi di PAN adalah masuk pada kategori faksi kepentingan (interest).

Namun ketika diperhadapkan pada tekanan politik basis massa, para aktor lebih teridentifikasi sebagai faksi kepentingan meskipun belum bisa bergeser dari tarikan pemisah etnis. keterlibatan Umar Bopeng di PAN sebagai king maker kelompok faksi pengusaha dengan modal berkecukupan. Kekuatan aktor faksi pengusaha terletak pada jaringan bisnis dengan koneksi di pemerintahan.

Motivasi kepentingan kapital yang sama ini mendorong Umar Bopeng dan Imran Djumadil lebih lama bertahan di PAN di tengah disharmonisasi dengan aktor faksi Ideologis Sahrin Hamid pada Pilgub 2014, maupun dengan Majid Husen dari Faksi Pengusaha menjelang Pilgub 2018. Konflik pergantian Ketua Partai yang prematur, dan mekanisme pemilihan ketua partai Muswillub yang ditolak kubu faksi pengusaha.

Tahun 2019 sebagai fase krusial bagi Majid Husen karena memberhentikan 5 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota. Cara ini dimaksudkan untuk memotong manuver faksi Ideologis yang serah dengan kubu Amien Rais di Pusat. Tindakan sepihak mencerminkan aktor-aktor yang bertikai dalam partai ini tidak mempertimbangkan dampak buruk keteratakan internal seperti tahun 2013.

Tabel 5.8 Aktor, Model Pengorganisasian dan Motivasi Faksi PAN

Aktor/Keluarga	Partai/Faksi	Model Pengorganisasian dan Motivasi Faksi
A.R. Fabanyo	PAN/Ideologis	<i>Kepentingan</i> ; etnis Tidore, Muhammdiyah
Sahrin Hamid	PAN/Ideologis	Kepentingan; etnis Tobelo, HMI, BM PAN
Imran Djumadil	PAN/Pengusaha	Kepentingan; etnis makian, Eks Golkar
Baharullah Karim	PAN/Pengusaha	Kepentingan; etnis makian, hubungan keluarga dengan Imran Jumadil, Membelot ke Nasdem
Umar Bopeng	PAN/Pengusaha	Kepentingan; etnis Ternate; PII
Husni Bopeng	PAN/ Pengusaha	Istri Umar Bopeng, pindah ke Nasdem
Helmi U. Muksin	PAN/Pengusaha	Kepentingan; etnis Makian; pindah ke Nasdem
Muhlis Tapitapi	PAN/Pengusaha	Kepentingan; Etnis Tobelo; HMI; pindah Nasdem; Wakil Bupati Halut 2015-2020
Majid Husen	PAN/ Profesional	Kepentingan; Etnis Makian, Eks Birokrat
Safi Pauwah	PAN/ Profesional	Kepentingan; Etnis Sula, Eks Birokrat
Kasman		
Hi. Ahamd	PAN/Profesional	Kepentingan; Etnis Tobelo; Eks Rektor UMMU
Husnullah		
Pangeran	PAN/Profesional	Kepentingan; Etnis Galela, Eks Warek UMMU

Sumber: Diolah dari berbagai Media online

5.2.3. Keterlibatan Aktor Politik Familisme PKS & Motivasi Faksi Klientalisme Etnis

Pada pembahasan sebelumnya, persaingan internal partai adalah faktor yang sangat dominan dalam dan berkontribusi besar terhadap penyebab faksionalisme. Persaingan internal aktor lebih mengandalkan politik dinastik, politik familisme, dan

orang kuat lokal (*Local Strongman*). Meskipun PKS adalah partai Programatik dengan struktur basis Jamaah Tarbiyah yang terorganisir, namun Motivasi aktor politik masih mengandalkan jejaring klientelisme etnis Tobelo-Galela (Togale) yang kuat. mobilisasi etnis Togale terbagi dalam dua faksi PKS yang berbeda. Gesekan di internal keluarga Kasuba telah menghancurkan kekuatan PKS dengan struktur basis masa yang kuat. Faksi yang bertikai di PKS lebih didominasi keluarga Kasuba.

PKS gagal pada Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. Abdul Gani Kasuba, petahana Gubernur Malut bersaing dengan adik kandungnya Muhammad Kasuba, mantan Bupati Halsel 2 periode pada Pilgub 2018. Keduanya memiliki pengaruh klientelisme yang kuat. Namun upaya Muhammad Kasuba menafaatkan jaringan basis Tobaleo Galela di Halmahera Selatan terhalang oleh kekuatan politik suksesornya, Bahrain Kasuba, Bupati Halsel yang lebih memilih Petahan Gubernur. Rivalitas internal keluarga sangat dilematis dalam gerbong faksi Idealis vs faksi Pragmatis. Praktek Faksionalisme klientelistik ini cenderung melemahkan stabilitas dan prospek pelembagaan PKS karena merusak koherensi organsiasi partai.

Keterlibatan aktor lain dalam tipologi faksi yang mengandalkan kepentingan jamaah partai dapat dilihat pada posisi Alimin Muhammad, Ketua PKS wilayah 2 periode dan anggota DPRD Prov Maluku Utara. Alimin Muhammad anggota Faksi Idealis yang masih mengandalkan relasi dengan aktor partai lainnya Ridwan Husen, Ketua Partai dan loyalis faksi Idealis adalah aktor yang kurang memiliki modalitas ekonomi memadai. Distribusi sumberdaya yang dimiliki keluarga Kasuba dengan cara menciptakan patronage yang kuat di sekelilingnya dan mengandalkan popularitas dan jabatan. AGK dan MK adalah representasi Etnis Tobelo dan Galela yang mengaandalkan

jaringan patronase, sedangkan aktor lainnya Alimin Muhammad, Ridwan Husen, Saiful Ahmad dan Mochdar Bailussy masih mengandalkan keyakinan ideologis. Warnanya sangat Kontras. AGK dan MK adalah tipologi faksi Klientelisme dan jaringan patronase etnis dominan, sedangkan aktor faksi Idealis lebih memiliki ubungan emosional dengan struktur sosial jamaah tarbiyah, anggota KAMMI, LDK.

Tabel 5.9 Aktor, Model Pengorganisasian dan Motivasi Faksi PKS

Aktor/Keluarga	Partai/Faksi	Model Pengorganisasian dan Motivasi Faksi
Abdul Gani Kasuba	PKS/Pragmatis	Klientelisme Kuat, Local Strongman; Etnis Tobelo; Wakil Gubernur Maluku Utara 1 periode dan Gubernur Maluku Utara 2 Periode, Ulama Kharistmatik; tokoh Pendidikan; Politisi Populis
Bahrain Kasuba	PKS/Pragmatis	Klientelisme Kuat; Etnis Tobelo, Mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan, Bupati Halmahera Selatan 2015-2020, Ponakan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba; membelot ke PKPI menjelang Pilgub 2018
Muhammad Kasuba	PKS/Idealis	Klientelisme kuat; etnis Tobelo; Mantan Bupati Halmahera Selatan 2 periode
Basam Kasuba	PKS/Idealis	Klientelisme lemah; etnis Tobelo; Putra Kandung Muhammad Kasuba
Husni S. Kasuba	PKS/Idealis	Klientelisme Lemah; etnis Tobelo, Keponakan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba; Akademisi STA Labuha
Alimin Muhammad	PKS/Idealis	Kepentingan; etnis Loloda; KAMMI, eks Ketua wilayah PKS 2 Periode, anggota DPRD Prov. Malut 2 Periode
Saiful Ahmad	PKS/Kaum Muda	Kepentingan; etnis Makian; KAMMI, Akademisi, Deklarator Garbi dan Gelora Maluku Utara, eks anggota DPRD Prov. Malut
Mohdar Bailussy	PKS/	Kepentingan; Etnis makian, KAMMI, KNPI, Eks anggota DPRD Kota Ternate; membelot ke ke Partai Nasdem 2019; Kini Deklarator partai Gelora Maluku Utara

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

5.2.4. Menakar Aktor dan Faksi dalam Jaringan Patronase

Mayoritas aktor oportunistik yang mengandalkan jaringan, modalitas ekonomi dan keterbukaan politik lebih memilih membelot dari keanggotaan partai ketika menghadapi jalan buntu. Beberapa anggota Faksi Pengusaha PAN, Faksi Pragmatis PKS, Faksi Kaum Muda PKS, dan Faksi Pembaharuan PPP memilih cara yang lebih lebih efektif dan praktis untuk menangani perselisihan internal dengan cara meninggalkan partai, bergabung dengan partai lainnya demi kelangsungan karir politik, berkoalisi kepentingan jangka pendek Pilgub dan Pilkada.

Demokrasi patronase di Maluku Utara lebih mengejar akses ke sumber daya pemerintah lokal berupa konsesi proyek terutama kalangan politisi pengusaha yang memiliki akses politik dan modal ekonomi berlimpah. Tujuan akhir adalah kepentingan ekonomi. Partai sekedar organisasi politik yang memudahkan langkah aktor mendapatkan akses ekonomi. Ketika aksesnya terhambat, kelompok ini lebih memilih membelot dan meninggalkan partai dan memasuki partai lainnya yang memberikan jaminan akses ekonomi politik

Contoh kasus ini pada dari faksi Pengusaha PAN yang membelot dan memilih Partai Nasdem dalam pencalonan anggota DPRD pemilu 2014, semuanya terpilih (Muhlis tapi tapi, Husni Bopeng, Yamin Rusli, Syarif, Helmi Umar Muksin dll); Faksi pragmatis PKS AGK dan BK dalam Pilgub 2018. Kekuatan lainnya seperti Faksi Hein Namotemo Golkar Halut lebih memilih bergabung dengan kubu AGK pada putaran kedua pilgub 2014 dan Pilgub 2018, menolak Gubernur calon AHM dan kader Golkar dan diusung oleh Golkar. Selain itu Faksi pembaruan PPP memilih PBR pada pemilu 2009, dan pindah ke Gerindra pada Pemilu 2014 dan pemilu 2019.

Faksi di Maluku Utara pada dasarnya adalah aliansi klientelistik dan jaringan patronage mengikuti garis etnis politisi. Dukungan politik, mobilitas etnis dalam pemilu sudah berulang kali dilakukan oleh aktor dan faksi klientelisme yang memiliki yang sama dan disatukan kepentingan terhadap akses sumberdaya. Sepak terjang aktor tipe ini berkontribusi langsung pada volatilitas dan fragmentasi partai. Apa yang digambarkan (Robison dan Hadiz, 2004) tentang aktor partai sebagai perwujudan kolektif demokrasi patronase "oligarki," kumpulan elit, bisnis, birokrat, dan politisi ke tubuh PAN di level Nasional juga berlaku di Maluku Utara.

5.3 Implikasi Faksionalisme dalam Wajah Faksi PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara

Implikasi dari faksionalisme intra partai tentu saja menimbulkan wajah faksi yang berbeda-beda terhadap ketiga partai. Wajah faksi itu antara lain kooperatif, kompetitif dan degeneratif. *Pertama*, Faksi kooperatif dikaitkan dengan implikasi faksi internal partai yang mampu menjaga stabilitas dan demokratisasi internal partai ketika menghadapi sebuah perbedaan antar faksi. Konflik internal sesama elite dan faksi dapat diselesaikan melalui penguatan dan demokratisasi internal partai. *Kedua*, Faksi Kompetitif digambarkan sebagai implikasi faksi yang memiliki kompetisi yang tinggi, sering mengalami perpecahan internal namun tetap bertahan pada kepentingan masing-masing faksi. *Ketiga*, Faksi degeneratif menggiring partai politik pada implikasi yang tidak prosedural, mengabaikan demokratisasi internal partai, kuatnya praktek kekerabatan, dominannya personalisasi kepemimpinan partai.

Hal ini mengakibatkan partai mengalami kehancuran atau degeneratif pada suatu level tertentu. Dinamika partai yang

degeneratif ditandai oleh merosotnya perolehan suara partai pada pemilu yang disebabkan oleh konflik internal partai. Konflik disebabkan oleh lemahnya manajemen internal partai dan perilaku kepemimpinan yang sangat personalistik. Persaingan internal partai dalam posisi kunci, perburuan keuntungan dan tidak berfungsinya mekanisme dan rambu-rambu aturan partai, sehingga partai mengalami dinamika perpecahan internal dan degeneratif.

5.3.1 PPP dan Implikasi Faksi Degeneratif

Implikasi faksi degeneratif terhadap PPP sudah ada sejak berkurangnya pengaruh kendali Rusdi Hanafi. Sebagai seorang pengusaha sukses, PPP yang dipimpinnya identik dengan partai keluarga (*Party of Family*). Selama masa kepemimpinannya di PPP lebih didominasi kepentingan keluarganya dalam insentif personal mendapatkan akses sumberdaya partai.

Anak kandungnya, Isa Hanafi dilibatkan dalam dunia usaha dan politik secara bersamaan. Sebagai kelompok faksi etnik Ternate yang konservatif, keberadaan Rusdi Hanafi dalam masa ini lebih dikenal sebagai perilaku klientelistik yang terbatas di internal PPP. Perilaku ini mengakhiri popularitas PPP sebagai partai ummat di kalangan politisi Muslim. Dominannya faksi konservatif dalam PPP antara lain sebagai penyokong dukungan dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2002 melalui utusannya di DPRD Provinsi Maluku Utara. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh PPP dan beberapa partai politik lainnya menang. Kemampuan kepemimpinan ketua PPP dalam menyokong dinamika politik pemerintahan daerah tidak mampu ditransformasikan secara berimbang dalam mengembangkan partai di Kabupaten/Kota.

Bahkan dalam lingkaran keluarganya, PPP berfungsi sebagai penyokong utama dalam mendapatkan hasil pertukaran suara partai yang dikorbankan untuk mendapatkan proyek, uang dan jaringan patronase dengan Pemerintah Provinsi saat itu. Demikian pula, struktur pengurusnya didominasi keluarganya yang berasal dari etnik Ternate. Dominasi keluarganya pupus setelah Rusdi Hanafi lengser dari ketua partai, digantikan oleh Salim Halik tahun 2012 yang lebih responsif terhadap semangat kemajemukan dalam politik PPP. Hal ini secara tidak langsung mendorong perebutan faksi. Salim Halik muncul sebagai bentuk antitesa karena membawa pola kepemimpinan yang mendobrak kebiasaan lama. Gaya pembaharuan Salim Halik berbuntut pada kudeta secara sepihak tahun 2014.

Rusdi Hanafi merasa dirugikan dengan pola kepemimpinan Salim Halik karena telah membatasi akses sumberdaya dan bisnis keluarganya melalui pemanfaatan jaringan partai. Usaha bisnis yang telah dirilis di masa kepemimpinannya mulai dihentikan oleh Salim Halik. Kepemimpinan Salim Halik berlangsung singkat. Pembaharuan yang dilakukan ditolak keras oleh penerus konservatif Rusdi Hanafi yakni Muhamamd Ridwan Tjan dan Isa Hanafi anak kandungnya. Menjelang pemilu 2014, perpecahan tidak dapat dihindari. Beralihnya kepemimpinan Salim Halik ke tangan Muhammad Ridwan Tjan dan Isa Hanafi tidak lepas dari intervensi Rusdi Hanafi. PPP semakin jauh dari tujuan kolektifnya. Latar belakang Muhammad Ridwan Tjan tidak dibesarkan dari penjenjangan kader PPP, melainkan oleh kedekatan kekerabatan.

“Sejak awal sudah saya tegaskan PPP akan ditinggalkan banyak konstituennya jika Pak Ridwan Tjan masih meneruskan gaya kepemimpinan Pak Rusdi Hanafi. Bayangkan kami ini adalah tokoh kunci dalam memperkuat PPP di DPRD maupun ketika berada di masyarakat, tetapi ini. Khan lumrah jika partai

dibesarkan oleh nilai jual dan ketokohan anggota partainya. Jika Ketua bisa memahami posisinya, seharusnya kami dapat diakomodir dalam daftar caleg pemilu 2014 lalu. Cara mengendalikan PPP lebih mementingkan kepentingan pribadi, tertutup dan tidak mau diajak kompromi demi meriah sisi positifnya. Akibatnya kelemahan ini telah berdampak luas pada partai ini, merosotnya kursi di Kabupaten dan Kota, lalu semakin berkurangnya jumlah kursi di DPRD Provinsi, dan jika pada pemilu 2019 berikutnya cara-cara ini masih dipertahankan maka bukan tidak mungkin PPP akan tidak mendapatkan satu kursi pun. Bagaimana PPP dapat bangkit dari keterpurukan ini jika kebersamaan yang selama ini kami rawat dihancurkan oleh ambisi seseorang yang tidak pernah dikader dan didik dalam tradisi politik PPP? Beliau demi memperkuat posisinya struktur pengurusnya lebih banyak etnik Ternate, dari keluarga dan dekat dan sisa-sisa jaringan politik Rusdi Hanafi masih diakomodir. Padahal wilayah Maluku Utara ini sangat luas, multi etnis seharusnya ini yang harus digunakan untuk memperkuat kembali PPP. (WZI, 15/07/2018).

Konflik dalam perebutan kepemimpinan ini telah melahirkan ketidaksabihan internal partai. Salim Halik tidak terakomodir dalam kepemimpinan sementara Ridwan Tjan. Sepanjang 2014 ketidakstabilan internal PPP mengakhiri aktivitas Salim Halik dan gerbong pembaharuannya. Beberapa elite lokal PPP faksi pembaharuan, Wahda Zainal Imam dan Sahril Taher memilih bergabung dengan Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah pemilihan Halmahera Selatan, dan Halmhera Utara-Morotai. Sedangkan PPP hanya mendapatkan 1 kursi melalui ketua PPP daerah pemilihan Ternate-Halmahera Barat. Justru Gerindra mendapatkan 5 kursi. Dua di antaranya disumbangkan oleh eks kader PPP.

5.3.2 PAN dan Implikasi Faksi Kompetitif Negatif dan Positif

Riak faksi dalam PAN sejak awal kemunculannya di Maluku Utara lebih banyak didominasi oleh faksi ideologis dan faksi pengusaha. Kedua faksi ini awalnya saling memperkuat dan menopang aktivitas PAN. Model konsensus sudah diterapkan sejak awal. Namun memasuki tahun 2012, hubungan itu retak. Pemilihan ketua PAN berakhir perpecahan. Setelah kalah dalam perebutan ketua partai, Faksi pengusaha di bawah kendali Umar Bopeng menyatakan pindah ke partai Nasional Demokrat (Nasdem). PAN memiliki kompetisi relatif menguat dan mengancam keutuhan internal PAN. Hal ini terjadi pasca diturunkannya Imran Djumadil dari ketua Partai yang diikuti dengan munculnya Sahrin Hamid salah satu pengurus DPP PAN. Lemahnya penegakkan mekanisme internal PAN turut memicu keretakan internal PAN. Konflik internal antara faksi Ideologis dengan faksi pengusaha menguat saat Musyawarah Luar Biasa tahun 2012, saat PAN Provinsi Maluku Utara di bawah kendali Sahrin Hamid mendapatkan kepercayaan DPP PAN. Sebagai mantan ketua DPP BM PAN, Sahrin Hamid memiliki hubungan dekat dengan Hatta Rajassa di PAN. Kedekatan ini dimanfaatkan oleh Sahrin untuk mendapatkan dukungan politik dalam pencalonan ketua DPW PAN Maluku Utara.

Jika ditarik ke belakang awal munculnya PAN di Maluku Utara pada masa awal terbentuknya, faksionalisasi dalam PAN justru saling memperkuat posisi PAN. Dengan sokongan faksi ideologis yang memiliki dukungan afiliasi masyarakat terpelajar perkotaan seperti Muhammadiyah, HMI dan Kampus yang memiliki budaya demokrasi lebih baik. Faksi pengusaha membiayai kebutuhan partai berdasarkan semangat reformasi. Beberapa pengusaha yang terlibat dalam pembentukan struktur organisasi PAN di Maluku Utara tahun 1998 antara lain Imran

Djumadil, Umar Bopeng, Rafel Sofyan dan Baharullah Karim. Pada awal berdirinya PAN, proses pembauran dua orientasi faksi yang berbeda dapat dilakukan dengan baik. Meskipun dipahami bahwa sebagai partai reformis, PAN awalnya mendapat dukungan moral dari kalangan mahasiswa, dosen dan kalangan organisasi kepemudaan di bawah kepemimpinan dua periode Abdurrahim Fabanyo. Hal ini memperlihatkan kemampuan elite lokal dalam struktur PAN yang mampu memfasilitasi sirkulasi elite internal.

Keuntungan ini dapat dirasakan oleh selama kepemimpinan Abdurrahim Fabanyo. Perluasan pengaruh PAN diikuti dengan menguatnya perolehan suara dan kursi di pemilu 2004, dan 2009. Namun memasuki masa kepemimpinan Imran Djumadil, PAN mengalami penurunan dukungan. Kelompok ideologis menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Imran Jumadil karena membiarkan beberapa konflik PAN di daerah Kabupaten dan Kota dibiarkan tidak tuntas diselesaikan. Meningkatnya perbedaan faksi ini memperlihatkan PAN akan mengalami perpecahan.

Sekurang-kurangnya ada dua hasil positif dan negatif dalam menganalisis faksionalisasi PAN yang kompetitif di Maluku Utara. Saat terbentuk pada masa awalnya, dampak positif yang ditimbulkannya antara lain menyatunya faksi ideologis dan faksi pengusaha dalam internal PAN. Demokratisasi intra-partai sesama faksi masih berjalan. Hadirnya kedua faksi ini dianggap mampu menjaga keseimbangan kekuatan internal PAN, yang lebih moderat dalam merangkul perbedaan orientasi kesejahteraan kedua faksi. Selain itu dalam perimbangan posisi kunci dalam internal partai tetap berlaku demi keberlanjutan partai. Namun sepeninggal Abdurrahim Fabanyo, perpecahan internal mulai muncul.

Puncaknya saat Musyawarah PAN di bawah kepemimpinan Sahrin Hamid. Kebersamaan kedua faksi selama ini tidak mampu dilanjutkan lagi. PAN mengalami fase koalisi faksi yang tidak stabil lagi. Ketidakpuasan faksi pengusaha terhadap kepemimpinan Sahrin dianggap mencedraai tradisi kepemimpinan dalam PAN yang menjaga keseimbangan. Hal ini sebagai gambaran macetnya intra-partai dalam aktivitas kepartaian pada PAN. Bahkan kebijakan-kebijakan partai yang menyimpang dianggap faksi pengusaha merugikan kelompoknya.

5.3.3 PKS dan Implikasi Faksi Kooperatif Semu.

Sebagai salah satu partai di Maluku Utara, selama suksesi dan pergantian kepemimpinan partai baik di ranah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, PKS tidak pernah mengalami konflik yang menimbulkan perpecahan internal. Hal ini didukung oleh demokratisasi internal PKS dalam kemampuannya mengelola mekanisme internal partai. Pemilihan ketua PKS wilayah telah diatur dalam mekanisme internal. Tahapannya diawali oleh rapat internal Majelis Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan di Provinsi.

Majelis ini berkewenangan menetapkan 10 nama calon formatur kemudian dipilih oleh masing-masing pengurus dan anggota partai yang telah memenuhi syarat sebagai kader Madya dan Dewasa, Ahli, dan Purna. Berbeda dengan cara konvensional yang berlaku pada PAN dan PPP, pemilihan Ketua PKS tidak terfokus pada sebuah tempat. Perbedaannya yaitu cara konvensional dihadiri oleh seluruh utusan partai Kabupaten/Kota sehingga memungkinkan mobilisasi massa pendukung calon ketua di arena Musyawarah. Seringkali menimbulkan kekacauan, tindakan walk out, tertundanya musyawarah, bahkan berujung pada perpecahan akibat dari perbedaan pilihan.

Sedangkan mekanisme pemilihan ketua di PKS tidak ada pengerahan peserta Musyawarah. Mekanisme awalnya para kader inti PKS yaitu Madya mengusulkan 2 nama, Dewasa mengusulkan 3 nama, Ahli dan Purna mengusulkan 4 nama kandidat. nama-nama itu diserahkan kembali ke Panitia Umum Internal Partai (PUIP). PUIP mengambil 5 nama suara terbanyak dan disampaikan ke DPP PKS. Sesuai dengan suara terbanyak pertama diputuskan sebagai Ketua, dan secara berturut-turut sekretaris, bendahara dan struktur wakil ketua lainnya.

Mekanisme internal PKS dalam pemilihan Ketua partai di level provinsi ini dapat mengurangi timbulnya konflik antar pendukung. Tahapan pemilihan ketua Partai secara berjenjang dengan hanya memperbolehkan minimal kader Madya dan Dewasa dalam sebagai pemilih dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman terhadap garis perjuangan partai melalui jenjang-jenjang perkaderan yang ketat. Kondisi ini mendorong disiplin internal partai tercipta. Masing-masing anggota partai tunduk dan patuh pada mekanisme internal pemilihan sesuai dengan level keanggotaannya.

Stabilnya mekanisme internal dalam mekanisme pemilihan ketua, rekrutmen calon formatur, terbukanya sistem rekrutmen calon legislatif dalam pemilu mendorong PKS mendekati karakter partai yang kooperatif. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan mekanisme internal partai. Ketua PKS Provinsi Maluku Utara (2014-2019), Ridwan Husen menjelaskan bahwa dalam PKS, menjunjung tinggi keputusan partai itu telah menjadi budaya internal partai.

Pengakuan yang sama juga dijelaskan oleh Alimin Muhammad, ketua PKS Provinsi Maluku Utara (2004-2009, dan 2009-2014) bahwa selama ini dalam mekanisme pemilihan ketua tidak terjadi konflik dan perpecahan dalam internal partai. Bahkan

sejak awal berdirinya, saat masih bernama PK (Partai Keadilan), penunjukan terhadap Muhammad Kasuba sebagai Ketua PK tahun 1998-2002), maupun terpilihnya Abdul Gani Kasuba sebagai Ketua PKS pertama di Maluku Utara (2002-2004) dalam pemilihan ketua PKS selalu tidak mengalami deadlock, hambatan dan perpecahan.

Menyatunya faksi internal PKS dalam demokratisasi internal partai menghasilkan partai ini tetap solid dan stabil selama 5 tahun terakhir, akomodasi dan konsensus atas agregasi kepentingan tetap menjaga identitas kelompok dan kerjasama yang integratif. Faksionalisasi dan perpecahan PKS sebenarnya bisa diatasi jika komunikasi internalnya berjalan dengan baik dan diikuti dengan penerapan pengkaderan berjenjang. Fakta internal partai ini sangat mengejutkan karena kurang lebih 18 tahun (1999-2017) berkiprah, PKS belum pernah menghadapi masalah serius berkaitan dengan perpecahan internal partai. Pengakuan Pimpinan Alimin Muhammad dan Ridwan Husen mengklaim bahwa tidak ada masalah dalam internal partai. Keutuhan itu masih tetap terjaga selama ini. Namun obyektivitas dan realitas politik sepanjang 18 tahun itu dilalui tanpa ada kejadian besar yang menguji stabilitas partai ini. Tindakan partai dalam menjaga ritme kooperatif telah ditunjukkan melalui penerapan internal partai. Partai ini sebenarnya belum teruji dalam konflik internal di tengah berkumpulnya berbagai kekuatan politik berlatar belakang Alkhairat (didominasi keturunan Arab Hadramaut), KAMMI, sarjana agama alumni Timur Tengah, dan LDK Kampus sebagai kader inti partai. Dalam kurun itu PKS masih dapat diatasi dan diikat dengan aturan main internal partai. Pengelompokan PKS dengan perbedaan latar belakang organisasi yang digelutinya masih menjaga keselarasan dan stabilitas identitas kelompok partai sejak terbentuknya.

Dalam penerapan manajemen internal PKS, partai ini berpedoman pada prinsip Platform partai dan AD/ART sebagai bagian dari penegakkan prinsip-prinsip internal organisasi dan internal disiplin partai. Perbedaan internal selalu dimusyawarahkan berdasarkan kaidah-kaidah partai dengan mengedepankan keutuhan internal, kolektif, dan transparan. Ruang dalam persaingan internal disalurkan melalui mekanisme pemilihan pimpinan dan model musyawarah yang mengedepankan soliditas internal.

Perubahan kebijakan partai dibangun melalui pertimbangan dan kesepakatan majelis Syura yang menawarkan ruang konsensus secara inklusif. Keberadaan faksi dalam PKS lebih memperkuat kapasitas PKS sehingga dapat menjaga identitas kelompok dalam PKS yang terdiri dari beberapa bagian namun tidak saling meniadakan. Pola ini memperkuat partai namun tidak mengabaikan struktur internal faksi. Struktur faksi dalam menghadapi perbedaan, dapat diselesaikan melalui mekanisme Musyawarah dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam stabilitas partai.

5.4 Dampak Faksionalisme Terhadap Keberlangsungan PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara

Faksionalisme selalu hadir ketika Partai dilahirkan. Artinya, heterogenitas ideologi dalam partai politik sebagai cermin dari varian faksi yang eksis dalam sebuah partai. faksi itu ada sejak awal terbentuknya struktur partai, sehingga eksistensi keragaman tidak dalam lembaga politik ini tidak bisa disingkirkan. Artinya, PPP, PAN dan PKS tidak dapat mengabaikan faksi sebagai bagian yang melekat pada struktur kelembannya dalam internal partai.

Faksi-faksi itu secara langsung beraktivitas dalam organisasi politik. Meskipun tidak semua fungsi faksi berdampak positif bagi keutuhan partai.

Namun konsekwensi bagi partai politik, kehadiran faksi sebenarnya sebagai bagian dari partai yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat secara sukarela dalam mengorganisasikan kepentingan politik yang lebih luas. Implikasi dari faksionalisme dapat menghasilkan 3 wajah faksi yaitu kooperatif, kompetitif dan degeneratif. Perbedaan proses faksionalisme ini melahirkan dampak yang berbeda pula. Persaingan internal PPP, PAN dan PKS dalam perebutan sumberdaya, jabatan, maupun pencarian keuntungan itu memiliki perbedaan. Pergolakan yang dialami oleh PPP berbeda dengan PAN meskipun keduanya pernah mengalami konflik internal. PPP mengalami pergolakan karena disebabkan oleh praktek monopoli ketua partai. Sebagai seorang pengusaha, ketua PPP menjadikan partai sebagai alat kekuasaan ekonomi-politik semata.

5.4.1 Dampak Faksionalisasi Degeneratif terhadap PPP

Buruknya kepemimpinan PPP ditandai oleh menguatnya personalisasi kepemimpinan dan politik kekerabatan dalam mengejar kesejahteraan berdampak luas terhadap PPP pada siklus faksionalisme degeneratif. Instabilitas PPP ini namun diabaikan dipicu oleh ketidakmampuan partai dalam menegakkan aturan main terutama berkaitan dengan kepemimpinan dan intervensi ketua DPP PPP. Dampaknya sangat besar terhadap PPP sehingga melemahnya kekuatan partai dan legitimasi dalam pemilu 2014.

Praktek patronase kepemimpinan partai PPP Rusdi Hanafi yang mengandalkan partai dengan kemampuan uangnya untuk bisa mengatur PPP. Meskipun harus mengabaikan nilai-nilai kolektivitas partai, langkah personalisasi partai ini dilakukan

untuk memuluskan kepentingan dalam penguasaan partai ini. Sepeninggal Rusdi Hanafi, pergolakan PPP berlanjut antara ketua PPP yang baru, Ridwan Tjan dengan Salim Khalik. Pergolakan ini mengakibatkan melemahnya PPP di mata konstituen. Pada pemilu 2014, PPP hanya mampu mendapatkan 1 kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara dengan total 27.309 suara (%).

Dampak yang ditimbulkannya antara lain merosotnya perloheana kursi di DPRD Provnsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini berdampak besar terhadap legimitasi PPP dalam partisipasi politik di parlemen. Sedikitnya jumlah kursi akan berpengaruh terhadap legitimasi partai dalam mengawal agenda politik partai. Terpuruknya PPP dalam kegagalan mengendalikan perpecahan menuai ketidakstabilan. Kecilnya legitimasi partai di parlemen berdampak bagi porsi sumber daya publik yang dikelola.

Dampak negatif yang telah ditimbulkan dari perpecahan internal PPP antara lain internal partai yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini berimplikasi pada melemahnya komunikasi internal partai dan berlanjut ke ranah publik yaitu melemahnya pengelolaan kebijakan publik. Keberlangsungan PPP di Maluku Utara terancam melemah karena pola kepemimpinan yang mengandalakan kekerabatan sebagai bentuk patron-klien serta lemahnya manajemen keputusan Kolektif partai.

Keterpurukan ini berdampak terhadap melemahnya fungsi kepartaian. PPP harus mengevaluasi dampak luas perpecahan terhadap kinerja dan kepemimpinan partai. Sebagai contoh, soliditas Pimpinan PPP Kota Ternate dan PDI-P masing-masing meraih 4 kursi dari 30 kursi. Namun kesuksesan ini tidak diikuti caleg PPP di kabupaten/kota lainnya. Lemahnya Kepemimpinan PPP di level Provinsi akibat perpecahan telah mengabaikan agenda partai yang lebih luas seperti komunikasi politik lintas

pengurus daerah dengan berbagai lapisan konstituen dalam pilihan publik.

Menurunnya trend positif PPP di mata pemilih akan mengancam keterwakilannya di DPRD Provinsi. Perolehan Jumlah kursi sejak pemekaran provinsi Maluku Utara tahun 1999, PPP mampu meraih 7 kursi dari total 30 kursi. Namun pada pemilu 2004, kehilangan 4 kursi, menyisakan 3 kursi. demikian pula pada pemilu 2009, suara partai ini semakin tergerus menyisakan 2 kursi dari kenaikan quota jumlah anggota DPRD Provinsi sebanyak 45 kursi. Pada Pemilu 2014, partai berlogo Kabah ini hanya diwakili 1 kursi. Menghadapi pemilu 2019, mayoritas caleg PPP pada 5 daerah pemilihan belum memiliki rekam jejak politik atau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ kota sebelumnya.

“Sejak awal sudah saya tegaskan PPP akan ditinggalkan banyak konstituennya jika Pak Ridwan Tjan masih meneruskan gaya kepemimpinan Pak Rusdi Hanafi. Bayangkan kami ini adalah tokoh kunci dalam memperkuat PPP di DPRD maupun ketika berada di masyarakat, tetapi ini. Khan lumrah jika partai dibesarkan oleh nilai jual dan ketokohan anggota partainya. Jika Ketua bisa memahami posisinya, seharusnya kami dapat diakomodir dalam daftar caleg pemilu 2014 lalu. Cara mengendalikan PPP lebih mementingkan kepentingan pribadi, tertutup dan tidak mau diajak kompromi demi meriah sisi positifnya. Akibatnya kelemahan ini telah berdampak luas pada partai ini, merosotnya kursi di Kabupaten dan Kota, lalu semakin berkurangnya jumlah kursi di DPRD Provinsi, dan jika pada pemilu 2019 berikutnya cara-cara ini masih dipertahankan maka bukan tidak mungkin PPP akan tidak mendapatkan satu kursi pun. Bagaimana PPP dapat bangkit dari keterpurukan ini jika kebersamaan yang selama ini kami rawat dihancurkan oleh ambisi seseorang yang tidak pernah dikader dan didik dalam tradisi politik PPP? Beliau demi memperkuat posisinya struktur pengurusnya lebih banyak etnik Ternate, dari keluarga dan dekat

dan sisa-sisa jaringan politik Rusdi Hanafi masih diakomodir. Padahal wilayah Maluku Utara ini sangat luas, multi etnis seharusnya iniyang harus digunakan untuk memperkuat kembali PPP. (SAH, 27/08/ 2018).

Selain itu, kepemimpinan yang personalistik pada PPP secara langsung turut membungkam praktek partisipasi secara internal. Perbedaan pendapat dalam partai justru dianggap menantang kepentingan dan kemauan ketua partai. Macetnya alur dalam menyampaikan aspirasi ini turut pula dalam menyampaikan aspirasi tidak ditanggapi karena kepentingan personal lebih dominan. Kepatuhan pada aturan main tidak berjalan sebagaimana mestinya. pemberhentian Ketua wilayah terpilih, Salim Halik tidak sesuai dengan mekanisme partai karena tanpa melalui suatu forum musyawarah dan pembelaan dalam internal partai.

Hal ini dilihat dari model intervensi mantan ketua PPP Provinsi terhadap ketua terpilih sebagai bentuk arogansi kekuasaan elite. Masalah lainnya, PPP mengabaikan legitimasi forum Musyawarah wilayah sebagai representasi perwakilan ini, dan lebih memilih intervensi DPP PPP. Antara PPP dan PAN memiliki kesamaan atas belum terlembaganya internal partai yang benar. Jika dibandingkan dengan PKS yang jauh lebih berhasil dalam keteraturan pola persaingan partai, suksesi kepemimpinan dan manajemen internal partai. Demikian pula PPP berbeda dengan PAN dalam penguatan partai yang mengakar di masyarakat. PPP memiliki organisasi partai yang lemah dan dikuasai oleh Ketua Partai yang lebih personalistik.

5.4.2 Dampak Faksionalisasi Kompetitif Terhadap PAN: Dari Negatif ke Positif

Dinamika faksi kompetitif bagi PAN diwarnai Perpecahan partai kedalam faksi yang saling bertentangan. Perselisihan intra-partai ini diwarnai oleh dua kubu faksi yang berbeda pendapat dalam memutuskan pemilihan ketua partai. Polarisasi opini kedua faksi terhadap pilihan partai, menimbulkan dampak perpecahan permanen yang ditandai oleh berpindahnya seluruh anggota faksi pengusaha ke partai politik lainnya. Dampak ini juga turut melemahkan PAN dengan menurunnya perolehan kursi partai di DPRD Provinsi dari 4 kursi pemilu 2009 berubah 3 kursi pada pemilu 2014.

Dampak faksionalisasi PAN sejak 2012 telah berimplikasi terhadap pecahnya keutuhan kader PAN di Maluku Utara. Berkurangnya 1 kursi PAN, dan bertambahnya 2 kursi Partai Nasdem melalui eks politisi PAN (Helmi Umar Muskin dan Muhlis Tapi-Tapi) pada Pemilu 2014 sekurang-kurangnya membuktikan dampak perpecahan. Demikian pula kemampuan fungsi-fungsi legislatif dipengaruhi oleh jumlah politisi dalam pengambilan keputusan partai terhadap agenda parlemen. Merosotnya perolehan kursi di provinsi juga diikuti di berbagai Kabupaten/Kota. Dampaknya secara kolektif berpengaruh besar terhadap kemampuan internal partai dalam soliditas faksi.

Selain itu perpecahan internal PAN diikuti oleh pindahnya elite faksi pengusaha dan berdampak terhadap fenomena Swing Voter (peralihan pemilih) pada partai lain. Perpecahan internal juga memperburuk elektabilitas PAN sebagai partai yang tidak mampu menyelesaikan konflik internal. Selain itu, sibuknya seluruh sumberdaya PAN dalam menghadapi perpecahan internal justru telah mengabaikan fungsi-fungsi kepartaiannya sebagai penyambung aspirasi rakyat.

Partai ini memang sejak awal terbentuknya sudah dikenal sebagai partai yang pluralis, agamais dan mengedepankan rasionalitas berpolitik. Lalu apa yang salah dengan kecenderungan saya dan teman-teman berlatar belakang pengusaha memilih PAN sebagai gerbong politik? perbedaan ini adalah hal selalu dialami juga oleh partai politik lainnya. Dulu ketika DPP PAN memberhentikan saya dari Ketua DPW PAN tahun 2011 bagi saya itu bukan solusi yang tepat karena justru semakin memperburuk keadaan di internal. DPP mengirimkan orang yang kurang tepat dan tidak diinginkan oleh sebagian besar pengurus yang berlatar belakang pengusaha ini. Saya dilaporkan ke DPP karena dianggap tidak menjalankan program kerja partai, lebih fokus pada usaha bisnis dan dianggap akan lebih berambisi mencalonkan diri sebagai Gubernur. Justru kehadiran Sahrin Hamid di Maluku Utara saya anggap memiliki kepentingan yang sama dalam mengusung dirinya sebagai salah satu calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Muhajir Albaar mantan Sekda Provinsi Malut. Konflik ini telah memicu sebagian teman-teman memilih pindah ke Nasdem seperti Ibu Husni Bopeng, Pak Muhlis Tapi Tapi, Pak Helmi Umar Muksin, Ibu Nurlela padahal mereka ini adalah kader partai yang memiliki pengaruh di konstituennya karena terbukti mereka berhasil meraih kursi DPRD Pemilu 2014 yang lalu saat dicalonkan dari Nasdem. Implikasi lainnya di partai ini sirkulasi elitnya berlangsung sangat tinggi. Saya memilih kembali ke PAN setelah Sahrin Hamid diberhentikan dari Ketua wilayah. (IMJ, 5/10/2018)

Peluang PAN dalam menjaga 3 kursi hasil pemilu 2014 masih memungkinkan jika menjaga stabilitas internal partai sampai pemilu 2019. Dengan berbagai berbagai figure lintas etnik dan latar belakang yang heterogen PAN bisa mendongkrak perolehan kursi lebih banyak lagi pada pemilu 2019. Konfigurasi caleg di PAN dapat digambarkan sebagai berikut. Imran Djumadil, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 2 periode (2004-2009;

2009-2014) sebagai salah satu caleg di daerah pemilihan Ternate-Halmahera Barat; Zamrud Wahab (anggota DPRD Kota Ternate 2014-2019). Daerah Pemilihan Halmahera Utara yang menonjol adalah Dr. Kasman Hi Ahmad (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara). Daerah Pemilihan 3 (Tidore, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur) salah satu caleg adalah Salahuddin Lessy, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2014-2019.

Daerah Pemilihan 4 (Halmahera Selatan) ada dua caleg yang menonjol yaitu Majid Husen (mantan sekda Provinsi Maluku Utara) dan Abdullah Majid Husen (anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan). Sedangkan di daerah pemilihan 5 kepulauan Sula dan Taliabu, salah satu calegnya adalah Safi Pauwah, pernah menjabat sebagai pejabat sementara Bupati Kepulauan Sula.

Sebagai mantan birokrat yang memiliki relasi kuat di kalangan barisan PNS dan etnik Sula, Safi Pauwa pernah bersaing ketat dengan Hendrata Thes, Bupati Terpilih. Bersama Majid Husen (mantan Sekda Provinsi Maluku Utara), Dr. Kasman Hi Ahmad (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara-UMMU dua periode), Dr. Khusnullah Pangeran (Mantan Wakil Rektor urusan kemahasiswaan UMMU, konsultan berbagai proyek di Pemerintah Provinsi), dan Safi Pauwah mengendalikan PAN wilayah sampai saat ini. Karakter faksi terbaru ini lebih menonjolkan kekuatan intelektual dan profesional. Jika pada dua kepemimpinan sebelumnya ada faksi ideologis dan faksi Pengusaha, kemunculan formasi faksi profesional sedikit mengembalikan karakter PAN yang kompetitif negatif berubah pada tipe faksi kompetitif yang positif.

Kepemimpinan Majid Husen lebih banyak memfasilitasi sirkulasi elite internal, mendorong berbagai kebijakan yang meliputi anggota dan pengurus. Berbeda dengan dua faksi

sebelumnya Ideologis dan Pengusaha yang lebih terfragmentasi dalam suara penolakan kepemimpinan. Pada faksi Profesional ini lebih moderat, memulihkan citra PAN, meskipun prakteknya belum memenuhi aspek demokrasi intra-partai yang sempurna. Hasilnya dapat dibandingkan jika pemilu 2014 PAN meraih 3 kursi, pada pemilu 2019 meraih 4 kursi. Namun hasil kurang memuaskan dialami di DPRD Kabupaten dan Kota, semula total 16 kursi berkurang menyisakan 12 kursi. Namun faksionalisasi telah memberikan dampak yang luas. Berdasarkan data KPU, dari 4 kursi yang diraih, ternyata Majid Husen tidak termasuk di dalamnya. Hasil ini juga dialami ketua PPP wilayah, Ketua PKS wilayah dan Ketua PKB Wilayah dalam keikutsertaan sebagai calon anggota DPRD Provinsi.

5.4.3 Dampak Faksionalisasi Kooperatif Semu Terhadap PKS.

PKS mengklaim memiliki mekanisme internal yang demokratis dalam pemilihan ketua partai telah memposisikan PKS sebagai partai yang tidak pernah mengalami konflik internal selama ini. Keputusan partai melalui kesepakatan Bersama dalam forum Musyawarah. Ada dua bentuk proses pengambilan keputusan yaitu melalui voting memilih formatur, dan Musyawarah untuk mufakat pada penyelesaian masalah. Tipe ini lebih mendekati kesepakatan bersama atau konsensus.

Sebelum ditetapkan ketua DPW PKS, DPP PKS menelaah dan meneliti lebih jauh dan mendalam tentang rekam jejak kelima calon. Hal ini juga dimaksudkan agar mencocokkan dengan masukan pengurus wilayah. Berdasarkan hasil penelusuran, DPP PKS belum pernah menganulir hasil pemilihan ketua wilayah PKS Maluku Utara. Promosi partisipasi keanggotaan diatur secara berjenjang antar kader berdasarkan level keanggotaan. Berbagai putusan partai didasarkan pada aturan main dan dilakukan

melalui mekanisme Musyawarah. Namun partisipasi politik masih dibeda-bedakan berdasarkan jenjang pengkaderan. Tujuannya agar ada hirarki nilai dan pola anutan berdasarkan level keanggotaan. Hal ini berpengaruh pada kompetisi yang terbatas, representasi berdasarkan derajat keanggotaan yang dilakukan transparan. Poin ini menggambarkan demokrasi internal Partai politik membutuhkan manajemen kepartaian yang lebih modern, perilaku aktor politik dalam partai lebih banyak membiasakan dalam bertindak berdasarkan kaidah kepartaian. Partai akan lebih solid dan terbangun disiplin keanggotaan.

Persaingan kepemimpinan selama ini dapat diatasi dan dikendalikan dengan baik melalui mekanisme pemilihan internal partai, tanpa memerlukan mobilisasi masa, anggaran besar, tanpa ada pengelompokan faksi dan figur yang saling berhadapan. Hal ini dapat dirunut ke belakang munculnya PKS di Maluku Utara sejak 2002, kebersamaan yang lebih kooperatif itu telah berdampak dalam kestabilan internal partai. PKS mampu menempuh rute keberlanjutan dan kesolidan partai.

Namun dalam kasus Pilgub Malut 2018 menunjukkan agregasi kepentingan PKS diperhadapkan dengan dua kader partai yang mencalonkan dirinya. Tentu saja PKS memfasilitasi agregasi dalam kapasitas partai politik, namun identitas sub kelompok mengalami perpecahan menjelang Pilgub 2018 dan mungkin saja dapat merusak kekuatan partai menghadapi Pemilu 2019. Perpecahan ini tidak berpengaruh pada internal kepemimpinan partai, tetapi lebih membawa dampak yang besar terhadap nilai tawar partai dalam preferensi pilihan konstituen dengan patron yang masih kuat. Patronase ini telah digambarkan dalam poin sebelumnya tentang kekuatan pejabat daerah yang berasal dari kader PKS maupun eks kader PKS. Patron yang memiliki sumberdaya uang, kekuasaan dan jaringan, popularitas

masih lebih dominan daripada kesetiaan terhadap loyalitas partai. dinamika faksi antar sesama tokoh PKS yang memiliki sumberdaya di pemerintahan.

Pilgub Malut 2018 telah membawa dampak antara kelompok loyalis sesama keluarga Kasuba. Kelompok Muhammad Kasuba didukung seluruh Pimpinan partai di Wilayah maupun seluruh daerah, termasuk Husni Salim Kasuba sebagai ketua PKS Halmahera Selatan yang berada dalam alam lingkaran keluarga Kasuba. Sedangkan kubu lainnya adalah Abdul Gani Kasuba (Gubernur Malut terpilih dalam Pilgub 2018) didukung oleh Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba yang memilih pindah ke PKPI setelah didepak dari PKS. Sedangkan faksi yang bertarung dalam PKS ini menggunakan instrumen yang berbeda dalam melegitimasi masing-masing kelompok. Kubu Muhammad Kasuba dipastikan menguasai seluruh instrumen struktur kepemimpinan partai, sedangkan Abdul Gani Kasuba lebih populer di mata simpatisan PKS yang berada di level akar rumput. Kemampuan sumberdaya kekuasaan politik yang dimiliki oleh Abdul gani Kasuba yang didukung oleh Bahrain Kasuba akhirnya mengungguli saudara kandungnya dalam persaingan meraih suara di Pilgub 2018.

Berbeda dengan internal kepemimpinan PKS yang solid dalam kerjasama intra-partai yang terintegrasi, partai ini menghadapi pola patronase yang kuat dari kedua pejabat pemerintahan itu dalam mempengaruhi pilihan konstituen PKS. Jika dirunut ke belakang, PKS selama terbentuk tahun 2003 sampai tahun 2016 tidak pernah mengalami pergolakan kepemimpinan partai. Memasuki tahun 2017, pergolakan elite PKS lebih bersifat individual antara dua tokoh PKS berpengaruh. masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. Konflik internal elite PKS dikuatirkan akan memecah belah soliditas partai ketika

menghadapi pemilu 2019. Kedua tokoh “kakang-beradik kandung” ini masih memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat. Dukungan yang diperoleh selama ini telah membentuk suatu patronase faksi yang sangat kuat.

Di satu sisi, Angka demografis 70 persen pemilih berdomisili di Perdesaan lebih cenderung dengan preferensi figur, modal dan popularitas daripada preferensi tokoh politik yang cerdas dan profesional. Pergolakan kedua tokoh ini dalam Pilgub Maluku Utara tahun 2018 berpengaruh terhadap masing-masing pendukungnya di PKS. PKS mulai diuji dengan klaim sebagai partai yang solid dan tidak pernah alami perpecahan internal. Ada dua fakta yang perlu diluruskan berkaitan dengan klaim Pimpinan PKS. Pertama, kesolidan internal Pimpinan PKS di wilayah dan seluruh daerah tidak bisa dipungkiri telah memperkuat nalar sebagai partai yang kooperatif selama kurang lebih 18 tahun kiprahnya di daerah ini. Namun fakta kedua tentang dampak Pilgub 2018 telah menguji partai ini. Soliditas internal partai tidak sepenuhnya dapat menjamin perpecahan dukungan melalui Pilgub 2018.

Perpecahan ini berdampak pada citra PKS di mata pendukung dan masyarakat umumnya lebih memilih partai lainnya di pemilu 2019. Pada kasus lainnya, PKS menghadapi beberapa kader partai yang menerima munculnya GARBI di Maluku Utara. Tindakan Sanksi dan pemecatan diputuskan melalui mekanisme internal partai sebagai upaya untuk menegakkan aturan main partai yang berlaku bagi seluruh anggota. Namun dampak dari pemutusan ruang gerak beberapa kader PKS yang Potensial dan berpengaruh di beberapa daerah telah mengurangi perolehan kursi.

Tindakan ini otomatis telah menutup ruang politik dalam struktur partai dan daftar caleg pemilu 2019. Kader potensial itu sebenarnya memiliki basis yang nyata dengan bukti dalam pemilu

2014. Mochdar Bailussy, Karnawi Hasan, Jaiz Miraj dan Saiful Ahmad adalah beberapa kader potensial. Situasi yang kontras antara soliditas internal struktur partai yang solid, namun di sisi lain PKS melakukan kebijakan internal partai dengan alasan untuk menegakkan etika politik dan menata kembali loyalitas kader partai. Pertimbangan menjelang Pemilu 2019 ini justru kontra produktif dengan imajinasi massa dan tujuan partai untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak dalam setiap pemilu. Ketua PKS Provinsi Maluku Utara menilai bahwa hal itu tidak berpengaruh terhadap keutuhan internal PKS. Selain itu PKS memiliki mekanisme penyelesaian internal partai dan masih mengindahkan rambu-rambu aturan partai. Pemilu 2009 PKS memperoleh 4 kursi dan meningkat 5 kursi pada pemilu 2014.

Demikian pula pemecatan terhadap beberapa anggota partai yang berstatus sebagai anggota DPRD, berafiliasi ke organisasi kemasyarakatan GARBI akan membawa dampak terhadap soliditas partai di level masyarakat. Soliditas internal PKS selama akan teruji dalam pemilu 2019. Meskipun soliditas akan berdampak luas terhadap daya terima dan pengakaran partai, namun partai ini harus menghadapi dampak yang lebih besar yaitu kemampuan dalam membiayai politik menghadapi pemilu 2019. Dampak lainnya adalah formasi caleg PKS mengalami perubahan pada aktor-aktor partai yang diterima dan ditolak dalam struktur daftar caleg.

Pergantian kepemimpinan di wilayah dan mekanisme pemilihan itu sudah diatur dalam ketentuan internal. Saya ketika masih aktif sebagai salah satu pengurus di PKS wilayah, mekanismenya sangat mentaati prosedur yang diputuskan melalui kesepakatan bersama antara Panitia pemilihan internal PKS dengan ketentuan yang berlaku. Sejak dibentuk di Maluku Utara Tahun 2002, PKS tidak pernah alami konflik internal kepemimpinan. Namun itu bukan berarti bahwa PKS juga tidak mengalami pengelompokan

dalam partai itu. Sebenarnya ada juga kelompok tua yang didominasi kalangan Dai dan Guru dari organisasi keagamaan Al-Khairat, sedangkan saya bagian dari generasi awal KAMMI dan pendiri KAMMI di Maluku Utara yang lebih dekat dengan adik-adik mahasiswa. Bentuk lainnya berupa berkumpulnya sebagian teman-teman yang dekat dengan pejabat pemerintah dari PKS seperti gerbongnya Pak Bupati Muhammad selama 2 periode, maupun Pak Kiyai Abdul Gani Kasuba sebagai Wakil Gubernur sejak tahun 2008 maupun sebagai gubernur tahun 2014 lalu. tidak adanya konflik dalam kepemimpinan internal PKS selama ini tetapi tidak menjamin bahwa tidak ada perpecahan sama sekali. Kasus Rekomendasi dukungan DPP PKS terhadap Muhammad Kasuba untuk Pilgub 2018 telah mendorong perpecahan di internal PKS. Meskipun pengurus wilayah saat ini beralih bahwa PKS tetap solid di internal tetapi kondisi ini sangat rumit. Bagi anggota PKS wajib mendukung Muhammad Kasuba, namun ada juga yang diam-diam mendukung Abdul Gani Kasuba yang diusung oleh PDI-P dan PKPI. Di saat yang bersamaan munculnya GARBI di sini awal tahun 2018 telah berdampak luas pada pemecatan beberapa anggota PKS yang masih menjabat sebagai anggota DPRD aktif. imbasnya adalah kekalahan Muhammad Kasuba pada Pilgub ini justru telah memperburuk citra PKS di mata publik. Saya pesimis dengan kondisi ini akan melemahkan posisi PKS di Maluku Utara pada Pemilu 2019 akan datang. (SA, 8/10/2018).

Sebelum Pilgub Malut 2018, PKS masih terjaga dalam konteks demokrasi intra-partai dengan mengedepankan konsep Syura' sebagai sistem keseimbangan dalam kekuatan internal. Beberapa pengakuan dapat disebutkan bahwa sejak awal terbentuknya sampai 2018, tradisi Musyawarah selalu dikedepankan dalam memecahkan berbagai masalah yang melahirkan perbedaan pendapat di kalangan pengurus.

Mencermati trend kenaikan kursi di DPRD sejak Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tidak terlepas dari soliditas PKS di level pimpinannya, dan dukungan finansial memadai dari wakil

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan Bupati 2 periode Halmahera Selatan Muhammad Kasuba. Namun setelah hengkangnya Gubernur Terpilih 2018, Abdul Gani Kasuba ke PDIP, dan beralihnya Bahrain Kasuba dari PKS ke PKPI di Halmahera Selatan, akan turut mempengaruhi perolehan kursi di 5 daerah pemilihan Maluku Utara. Pemilu 2014, PKS mendapatkan 5 kursi. 2 kursi disumbangkan dari daerah pemilihan Halmahera Selatan, 1 kursi dari Halmahera Utara, 1 kursi dari Ternate-Halmahera Barat, dan 1 kursi dari Kepulauan Sula.

Berbagai pertanyaan yang muncul adalah mengapa PKS dengan soliditas internal yang kokoh, kooperatif dan selalu menjaga keutuhan partai bisa alami kehilangan 3 kursi dari 5 kursi pemilu 2014? Jika dibandingkan dengan dinamika kompetitif dan konflik internal yang berkepanjangan yang dialami PAN, atau konflik internal PPP dengan berbagai faktor dan dualisme kepemimpinan itu, menurunnya angka perolehan kursi dapat dijelaskan sebagai dampak faksionalisasi kooperatif yang tidak tidak terduga.

Pertama, Penentuan Figur caleg yang dicalonkan dalam Pemilu 2019 sedikit mengalami perubahan. Daerah Pemilihan Kota Ternate-Halmahera Barat (Maluku Utara 1) dengan kuota kursi sebanyak 12 kursi. Dua caleg yang pernah duduk di kursi DPRD adalah Ridwan Husen mantan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (2004-2009) dan H. Is Suaib sebagai anggota DPRD Kota Ternate 2 periode (2009-2014 dan 2014-2019). Kedua figur ini adalah pengurus harian wilayah PKS. Tetapi rekam jejak, sebageian besar caleg lainnya belum memiliki pengalaman, tingkat popularitas, jaringan konstituen dan kesiapan modal yang terbatas. Rekrutmen caleg ini juga dapat dipahami sebagai keputusan dilematis. Idealnya Basri Kanaha tetap dicalonkan di daerah pemilihan ini untuk menyokong kekuatan PKS dalam

mempertahankan kursi. Basri pernah 2 kali menjabat anggota DPRD Kota Ternate dan satu periode anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Ternate Halbar.

Kedua, dipicu oleh sentiment etnik sebagai bentuk loyalitas kultural melalui jaringan Saiful Ahmad, Mochdar Bailussy (etnis Makean) dan jaringan Tobelo-Galela tidak lagi memilih caleg setelah perpecahan di internal keluarga Kasuba. Kasus Saiful Ahmad dan Mochdar Bailussy sebenarnya berawal dari ketertarikan pada GARBI. Kedua orang ini sebagai tulang punggung kader PKS yang loyal dan memiliki pengaruh di kalangan konstituen etnik Makean. Dukungan terhadap GARBI berujung pada pemecatan kedua kader.

Ketiga, terbatasnya kemampuan finansial para caleg dan terputusnya akses komunikasi politik dengan beberapa elite PKS. Kegagalan mempertahankan 1 kursi di daerah pemilihan Sula-Taliabu pada pemilu 2019 menguak fakta tentang kurangnya perhatian tokoh PKS yang memiliki jaringan politik dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi pemilu 2019. Wakil Bupati Kepulauan Sula, Zulfakhri memulai karir politik di PKS sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang terpilih pada pemilu 2014. Kegagalan mempertahankan 1 kursi di daerah pemilihan ini tentu saja mengejutkan tentu saja bisa disebabkan oleh reputasi politik caleg dan tingkat pengakarannya di masyarakat masih kalah bersaing dengan caleg partai politik lainnya. Salah satu faktor faksionalisasi tentang kesejahteraan yang sudah digenggam dikuatirkan akan berpengaruh terhadap koletivitas partai. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya PKS meraih kursi di daerah ini. Kesejahteraan elite partai belum tentu dapat menjamin kemampuan para caleg dalam memaksimalkan perolahan suara yang signifikan di basisnya. Kegagalan ini juga menjawab beberapa pertanyaan tentang klaim

kemampuan dan soliditas internal PKS sebagai modal politik kembali terbantahkan dalam hasil pemilu 2019.

Caleg Daerah Pemilihan 2 (Kabupaten Halmahera Utara-Kabupaten Pulau Morotai) dengan kuota kursi sebanyak 9 kursi. dari 9 caleg, terdapat 3 caleg yang memiliki peluang yaitu Basrin Kanaha (anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 2014-2019), Hasbi M. Albar (mantan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara periode 2009-2014) dan M. Ali Sangaji (mantan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai 2 periode dari Partai Golkar). PKS mampu mempertahankan satu kursi sejak pemilu 2009 dan 2014 yang diraih oleh Alimin Muhammad, mantan Ketua KAMMI Maluku Utara dan pernah memimpin PKS wilayah Maluku Utara selama dua periode. Masa kepemimpinan Alimin selama dua periode menggambarkan dominasi struktur mantan aktivis KAMMI. PKS di bawah kepemimpinan Alimin mencapai beberapa hal signifikan seperti terpilihnya Rusli Sibua sebagai Bupati Pulau Morotai yang diusung oleh PKS dan PAN, terpilihnya kembali Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur pada Pilgub 2013, Bahrain Kasuba terpilih sebagai Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 yang diusung oleh PKS dan HANURA, serta Zulfachri terpilih sebagai wakil bupati Kepulauan Sula pada Pilkada Sula 2015 yang diusung oleh PKS dan Demokrat.

Beberapa fakta lainnya tentang menurunnya angka perolehan kursi di seluruh DPRD Kabupaten dan Kota dan DPRD Provinsi. Pada Pemilu 2014 PKS memperoleh 16 kursi yang tersebar di berbagai daerah dan 5 kursi di DPRD Provinsi. PKS di bawah kepemimpinan Ridwan Husen mengalami beberapa konflik dan perpecahan di kalangan simpatisan dan anggota partai ketika Pilgub Malut 2018, terbentuknya GARBI, tindakan pemecatan telah menimbulkan dampak luas terhadap perolehan kursi pada pemilu 2019. Klaim soliditas internal pengurus inti

ternyata tidak mampu menjadi kekuatan penopang dalam mengatasi perpecahan di kalangan anggota partai yang sudah terbentuk pola patronase etnik maupun marga.

Klaim sebagai partai modern dapat dibenarkan karena dikelola dengan baik, pengkaderan yang ketat dan berjenjang, namun fleksibel terhadap dinamika internal. Beberapa klasifikasi, PKS dikenal sebagai partai berbasis kader. Namun pada sisi lainnya, dengan menurunnya hasil perolehan kursi pada pemilu 2019, klaim itu tentu saja harus dipertanyakan kembali. PKS hanya mampu meraih 14 kursi di seluruh DPRD Kabupaten dan Kota, dan hanya memperoleh 2 kursi di DPRD Provinsi. Dua fakta menarik dapat diungkapkan. Pertama, PKS sangat rentang terhadap tindakan kader potensial yang memiliki jaringan basis yang luas.

Daerah Pemilihan 3 (gabungan Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore) adalah basis utama Golkar dan PDI-P. Dengan kuota 7 kursi, PKS belum pernah meraih kursi sejak pemilu 2004. Sedangkan Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Halmahera Selatan sebagai basis PKS. alokasi kursi daerah pemilihan ini 9 kursi. Pada tahun 2014 PKS meraih 2 kursi melalui Bahrain Kasuba dan Zulkifli Hi. Umar. Sejak diumumkan daftar caleg, ada tiga orang yang dianggap memiliki pengaruh pada basis konstituennya. Zulkifli Hi. Umar (wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara 2014-2019), Husni Salim (Ketua PKS Halmahera Selatan dan ketua tim pemenang Bahrain Kasuba Pilkada 2015), dan Hasan Ali Bassam Kasuba (Putra kandung tertua dari Muhammad Kasuba (Mantan Bupati Halmahera Selatan).

Zulkifli Hi Umar masih mempertahankan satu kursi yang diraihnya pada Pemilu 2019. Hasan Ali Basam Kasuba di urutan kedua. Sebenarnya PKS peraih suara terbesar di Halmahera Selatan, namun dengan sistem alokasi kursi metode *Sainte Lague*

akumulasi suara sisa setelah dibagi tiga tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi ke-9. Sedangkan Persaingan internal antara Husni dan Basam terjebak dalam meraih dukungan konstituen Etnik Tobelo Galela. Keduanya saling bersaing di kantong-kantong suara Etnis Tobelo dan Galela yang tersebar di beberapa kecamatan. Saat yang bersamaan, caleg PKPI juga didukung oleh Bahrain Kasuba. Suara yang terbagi di beberapa caleg ini justru sangat merugikan PKS. Persaingan ini justru merugikan keluarga Kasuba karena tidak satupun internal caleg Marga Kasuba yang terpilih.

Fenomena di Daerah pemilihan 4 dikategorikan sebagai persaingan internal keluarga Kasuba melalui dua partai politik pada pemilu 2019. Akar persaingan dimulai sejak tahapan Pilgub 2018 lalu, dan berlanjut pada Pemilu 2019. Posisi ini tidak menguntungkan PKS karena selama ini akses sumberdaya partai masih disokong oleh kekuatan politik Bupati sejak tahun 2004 sampai 2017. Namun Pilgub 2018 telah merubah peta politik di daerah ini.

Kasusnya agak mirip dengan kegagalan di daerah Pemilihan 5 Sula dan Taliabu. Pilkada 2015 di Sula dimenangkan oleh Pasangan Hendrata-Thes yang berpasangan dengan Zulfahri, kader PKS. Zulfahri adalah anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Sula-Taliabu, namun mengundurkan diri untuk kepentingan pilkada. Ironisnya, setahun kemudian pada pemilu 2019, PKS gagal mempertahankan kursi perwakilannya. Faktor eksternal dapat mempengaruhi hilangnya kursi PKS. Sula dan Taliabu adalah basis Golkar di bawah pengaruh politik Ahmad Hidayat Mus dan keluarganya. Selain itu, Bupati Sula, Hendrata Tes adalah Pimpinan Partai Demokrat yang menyokong sepenuhnya kepentingan politik di daerah ini. Namun bagaimana dengan peranan Zulfahri dalam menyokong dan menjamin

kepentingan politik PKS pada Pemilu 2019 dianggap tidak maksimal. Kegagalan ini juga diperkuat oleh faktor struktur caleg yang diajukan oleh PKS tidak mampu bersaing dengan partai-partai politik lainnya. Rendahnya perolehan suara PKS hanya pada urutan ke-7, namun Demokrat meraih 2 kursi menggeser dominasi Golkar.

Efek Pilgub 2018 juga sebagai salah satu faktor di daerah pemilihan Sula-Taliabu yang dikenal sebagai daerah yang selalu bermasalah dengan tingginya tingkat kecurangan, intimidasi, premanisme dan maraknya praktek politik uang. Pada Pilgub 2018, Bupati Sula berbeda pilihan politiknya dengan Wakil Bupati.

Tabel 5.10 Implikasi dan Dampak Faksionalisme dalam Wajah Faksi PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara

PARTAI	IMPLIKASI DEGENERATIF	DAMPAK
PPP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguatnya personalisasi kepemimpinan dan model klientelistik terbatas dalam memberlakukan partai sebagai alat akses sumberdaya Bersama kerabatnya untuk mendapatkan insentif personal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perilaku ini berdampak terhadap terbatasnya akses anggota partai yang meluas sehingga mendorong siklus destruktif dalam partai
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguatnya Dominasi elite partai berlatar belakang Etnik Ternate dalam struktur partai dengan perilaku yang konservatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merusak kebersamaan dan semangat kemajemukan anggota partai politik yang meliputi heterogenitas etnik yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partai mengalami perpecahan internal antara Faksi Konservatif Vs Faksi Pembaharuan, dimana perpecahan diikuti oleh tindakan penonaktifan terhadap seluruh faksi pembaharuan dari struktur partai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masalah ini justru semakin memperkecil kekuatan PPP dalam Pemilu 2014. ▪ Tindakan penonaktifan dan pemecatan yang dilakukan oleh Faksi Konservatif yang berkuasa berdampak luas terhadap pengembosan suara partai di daerah pemilihan lainnya ▪ Penonaktifan Salim Halik (Ketua Partai yang dikudeta) dan pindahnya Dua Kader PPP Wahda Zainal Imam dan Sahril Taher pindah ke Partai Gerindra sebagai faktor dominan menurunnya perolehan suara partai pada pemilu 2014.
PAN	IMPLIKASI KOMPETITIF	DAMPAK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai Partai yang mengalami rute faksionalisasi kompetitif sejak awal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejak tahun 2000-2010 dalam dua periode kepemimpinan Porsi ketua selalu dikuasai faksi Ideologis, Abdurrahim Fabanyo (mantan aktivis Muhammadiyah), sedangkan Sekretaris (Imran

	terbentuknya tahun 2000, PAN didominasi oleh dua faksi ideologis dan faksi Pengusaha	Jumadil), Bendahara (Baharullah Karim), dan Ketua Bappilu (Umar Bopeng) mewakili faksi Pengusaha
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sirkulasi elite dalam struktur partai berlangsung kompetitif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model sirkulasi ini berdampak terhadap beberapa fase kepemimpinan PAN berlangsung kompetitif. Dampak kompetitif mulai memuncak pada kepemimpinan Imran Djumadil sejak tahun 2010 tetapi tidak bertahan lama dan tumbang tahun 2011 setelah beberapa Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan mosi tidak percaya ke DPP PAN. ▪ Dampak sirkulasi elite partai juga berpengaruh pada perubahan actor yang menduduki posisi-posisi kunci dan strategis dalam partai. Sekretaris PAN dikendalikan oleh faksi Ideologis (Suardi Kasman), sedangkan faksi pengusaha menguasai jabatan strategis seperti Bendahara masih dipercayakan kepada Bahrullah Karim, Ketua MPW Umar Bopeng, dan Ketua Bappilu Ghazali Abdul Muthallib.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periode awal menggambarkan keseimbangan faksi dan demokrasi intra partai masih berjalan normal, namun pada periode berikutnya ketegangan antara DPW PAN dengan sejumlah DPD PAN mengerucut pada masa kepemimpinan faksi pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembauran konflik ke dalam sirkulasi elite partai berdampak terhadap kemampuan faksi pengusaha menguasai mayoritas struktur partai, tetapi sangat rentan dengan perbedaan dengan Pimpinan DPD PAN di Kabupaten dan Kota yang didominasi faksi ideologis.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PAN mengalami konflik internal antara dua faksi berimplikasi pada ketidakstabilan 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergolakan faksi yang semakin kuat dan perpecahan internal PAN berdampak pada sikap sebagian besar faksi pengusaha di

	<p>masa kepemimpinan Imran Djumadil, Sahrin Hamid dan Majid Husen. Sejak diturunkannya Imran Djumadil dari Ketua Partai tahun 2011 dan digantikan oleh Sahrin Hamid. Suasana partai yang tidak stabil telah memacetkan manajemen intra-partai. hal ini dapat dilihat pada kebijakan ketua partai yang ditentang oleh Umar Bopeng (ketua MPW) dan gerbong faksi pengusaha.</p>	<p>DPW maupun DPD memilih meninggalkan PAN dan dan beralih ke partai NASDEM menjelang Pemilu 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PAN kehilangan 1 kursi dari daerah pemilihan Halmahera Utara-Morotai setelah Umar Bopeng tidak diakomodir lagi dalam daftar calon tetap PAN untuk Pemilu 2014, namun PAN kembali 4 kursi pada pemilu 2019.
PKS	IMPLIKASI KOOPERATIF	DAMPAK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKS menerapkan mekanisme kesepakatan Bersama dan konsensus dalam menentukan struktur partai sejak 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan partai ini berdampak positif pada kebersamaan dan konsensus kepemimpinan ini sehingga tetap menjaga stabilitas dan soliditas internal sesama faksi yang berbeda dalam pengambilan keputusan Bersama. ▪ kebersamaan dan konsensus dapat dilihat pada mekanisme pemilihan ketua partai melalui penjaringan calon formatur yang diputukan melalui rapat internal Panitia Pemilihan Internal Partai secara demokratis dan transparan dengan sejumlah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai Faksi (KAMMI, LDK-Kampus, Yayasan Alkhairat, Kelompok Tarbiyah, dan Pesantren yang dibangun oleh KH Abdul Gani Kasuba) masih solid dan stabil dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal ini berdampak besar terhadap keutuhan partai dan stabilnya internal partai selama mengikuti tiga kali Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

	<p>upaya memfasilitasi agregasi kapasitas partai politik sambil menjaga identitas sub kelompok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selain itu, kondisi ini memberikan dampak positif terhadap partai yaitu meningkatnya perolehan kursi maupun jabatan Bupati dan Gubernur. Pemilu 2004, PKS hanya mendapatkan 3 kursi, Pemilu 2009 meraih 4 kursi, Pemilu 2014 meraih 5 kursi. ▪ Agregasi kapasitas PKS telah berdampak luas bagi kebersamaan identitas sub kelompok dalam PKS sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan actor PKS dalam Pilkada di Kabupaten Halsei maupun Pilgub 2 periode (Pilgub 2007 dan Pilgub 2014).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur faksi dalam PKS berfungsi sebagai instrument yang efektif dan menyatu dalam kerjasama intra-partai agar tetap terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdampak terhadap kerjasama intra partai dari berbagai faksi untuk saling mendukung dan membesarkan loyalitas selama mengikuti 3 pemilu berturut-turut.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agregasi kelompok terpisah dan perpecahan yang samar karena masing-masing kelompok mengartikulasikan bagian-bagian terhadap preferensi kelompok dan kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal ini berdampak terhadap model agregasi kelompok yang terpisah antara kubu AGK dan MK. Perpecahan yang samar itu tergambar dalam dinamika internal PKS yang saling berhadapan-hadapan antara kubu Abdul Gani Kasuba dengan Muhammad Kasuba pada Pilgub Maluku 2018 ▪ Perpecahan yang samar ini diikuti oleh dua generasi Kasuba lainnya. Bahrain Kasuba (Bupati Halmahera Selatan 2016-2021) berada pada kubu yang sama dengan Abdul Gani Kasuba (Gubernur Maluku Utara 2014-2019). Sedangkan Muhammad Kasuba (Mantan Bupati Halmahera Dua Periode 2005-2010; dan Periode 2010-2015) berada dalam kubu yang sama dengan Husni Salim Kasuba, Ketua PKS Halmahera Selatan.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakta menunjukkan bahwa perpecahan yang samar antara kedua kader PKS berakibat pada kekalahan Pilgub, namun kedua kubu menyatu kembali pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Kabupaten yang menghasilkan kemenangan AGK sebagai Gubernur Maluku Utara Periode kedua 2019-2024 ▪ Perpecahan yang samar akan terjadi kembali pada pemilu 2019 karena Ketua PKS Halmahera Selatan, Husni Salim Kasuba akan berhadap-hadapan dengan ketua PKPI Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba ▪ Dampak perpecahan yang samar juga terjadi pada Muhammad Kasuba yang mencalonkan diri sebagai caleg PKS untuk DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, dengan orientasi politik Abdul Gani Kasuba yang dituntut berkomitmen terhadap caleg PDI-P dan PKPI di berbagai level karena kedua partai ini sebagai partai pengusung pasangan AGK-YA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implikasi dan Anomali Faksi Kooperatif PKS pada Pemilu 2019 dan Akibat yang ditimbulkannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak Pilgub 2018 berdampak pada hilangnya 3 kursi PKS pada Pemilu 2019 dari 5 kursi sebelumnya. Agregasi kelompok terpisah dan perpecahan yang samar telah terjadi dalam PKS, pemecatan beberapa kader muda PKS sebagai bentuk artikulasi preferensi kelompok yang menginginkan perubahan dalam siklus kepentingan partai.

5.5. Faksionalisme Partai Politik Islam Dampaknya Terhadap Konstituen Ummat Islam di Maluku Utara

Akar sejarah PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara berbeda berdasarkan afiliasi organisasi massa, gerakan sosial dan pelayanan kepentingan umat. Sebelum lahirnya PAN dan PKS, PPP memiliki peluang dan suplai anggota partai dari Muhammadiyah dan organisasi otonomo, NU, HMI, PII.

Representasi Muhammadiyah di PPP seperti Rusdi Hanafi seorang pengusaha dan Syamsul Hadi, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ridwan Elyas (politisi, Dai) pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Halmahera Tengah dan Wakil Bupati Halmahera Tengah. Namun terbentuknya PAN dan PKS di awal reformasi serta partai politik berlabel Islam lainnya telah menciptakan kelompok baru politisi Muslim. PAN, misalnya pada masa awal terbentuknya di Ternate, tokoh penggerakannya adalah Abdurrahim Fabanyo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Utara (Sebelum dimekarkan sebagai Provinsi baru). Awal terbentuknya PAN di Maluku Utara, dikendalikan oleh mayoritas aktivis Muhammadiyah (Deni, 2007).

Perpecahan mulai terlihat pada pola relasi warga Muhammadiyah dalam menyikapi pembentukan PAN di Maluku Utara. Syamsul Hadi, menggerakkan anggota IMM lainnya Sofyan Abbas, Makbul A.H. Din, Asrun Padoma dan Saiful Deni untuk beraktivitas politik di PPP, menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah Islam sehingga tidak cocok memberikan hak-hak politiknya kepada PAN yang lebih sekuler. Meskipun Amien Rais adalah seorang tokoh Muhammadiyah (Deni, 2007:102).

Muhammadiyah dilematis menghadapi konflik internal warganya yang beraktivitas di PPP dan munculnya PAN sebagai partai politik baru yang dipimpin oleh Abdurrahim Fabanyo. sepanjang tahun 2001-2005, struktur PAN semakin plural dari

pergeseran struktur dan dominasi Ideologis (Muhammadiyah, HMI, PII) ke kalangan pengusaha eks Golkar dan politisi lainnya yang tidak memiliki latar belakang afiliasi organisasi Islam. Muhammadiyah mulai kehilangan relasi politik dengan PAN setelah Abdurrahim Fabanyo digantikan Imran Djumadil (Faksi Pengusaha).

Fenomena diskonektivitas vertikal antara partai Islam dengan basis massa (grass root) juga terjadi di level nasional sampai daerah, Indonesia (Epley & Jung, 2016). Bahkan Diskonektivitas partai politik Islam itu diikuti dengan berbagai dampak. Afiliasi PAN dengan Muhammadiyah sebagai salah satu basis pendukung belum tentu menjamin dukungan elektoral memadai. Diskonektivitas vertikal partai Islam dengan partisan (Epley & Jung, Ibid) disebabkan oleh 3 faktor yaitu (1) Konstituen biasanya terlepas dari partai politik termasuk partai-partai Islam; (2) organisasi Muslim berbasis massa masih memiliki koneksi yang lemah dengan anggotanya maupun dengan partai politik sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat mendorong mobilisasi politik; dan (3) Partai-partai Islam tidak cukup membedakan diri dari pihak sekuler, serta mengalami konsekuensi buruk dari persaingan faksi di internal partai. Kesenjangan antara partai-partai politik Islam dengan basis muslim seperti "kesenjangan antara elit dan massa". Partai politik Islam belum terlembagakan dengan baik serta basis Muslim yang masih "mengambang.

Tokoh PKS, Abdul Gani Kasuba adalah ulama Jebolan Timur Tengah dan memiliki reputasi Dakwah dan pengaruh kuat di kalangan ummat Islam Maluku Utara. Modalitas kultural ini dimanfaatkan PKS. Fenomena yang sama juga berlaku pada beberapa Dai dan tokoh Islam lainnya melibatkan diri di partai politik berlabel Islam. Keterlibatan dan aktivitas partai

bersentuhan dengan tantangan internal faksionalisme partai dan masalah eksternal membuat politisi islam lebih bertindak pragmatis dan materialistis.

Faksionalisasi Partai politik Islam di Maluku Utara berdampak terhadap terbengkalainya masalah sosial. Rendah perhatiannya terhadap masalah sosial seperti semakin meningkatnya angka kemiskinan sejak tahun 2016-2019 (Posko malut online); atau Syariah muamalah seperti masih tingginya angka perceraian di kalangan pasangan rumah tangga muslim dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2019); masalah moralitas tentang Prostitusi Online di Kota Ternate (; masalah keyakinan dan aqidah tentang dugaan pemurtadan Lima ratusan Siswa terselubung di Pulau Morotai yang dilakukan oleh salah satu LSM dari Jakarta (<https://www.gelora.co/2019/02/ribuan-umat-islam-morotai-protas-dugaan.html>).

Kelompok-kelompok yang peduli dengan masalah keummatan ini lebih banyak digerakan oleh tokoh agama non-partai, MUI dan kekuatan pemuda Muslim Morotai. Partai-partai politik Islam PKS 3 kursi, PPP 1 kursi, PKB 1 kursi, PAN 1 kursi (6 kursi atau 60 persen) 20 kursi DPRD Kab. Morotai, tidak banyak berbuat menghadapi kasus ini. Fenomena hilangnya relevansi antara ideologi Islam dengan rendahnya kinerja partai politik islam dalam menopang kekuatan program kerja semakin menjauhkan partai dari akar konstituennya.

Ketika elite internal partai Islam mengalami perpecahan, pola pragmatis dan materialistis mempengaruhi psikologis perilaku pemilih muslim. Tiga kasus kasus awal tentang terpilihnya 3 Calon Bupati Non-Muslim Wilhelmus Tahalele di Halmahera Timur, tahun 2010; Pengusaha China, Beny Laos di Pulau Morotai tahun 2015 dan Pengusaha Hendrata Tess di Kepulauan Sula tahun 2015 adalah contoh fenomena baru

perilaku pemilih muslim yang lebih pragmatis, dan tersingkirnya Calon Bupati dari identitas Islam dari basis massanya pada ajang Pilkada 2015. Pilkada dan praktek jual beli suara sebagai fenomena dominan di Maluku Utara. Ketiga kasus di Maluku Utara ini dapat menggambarkan bahwa ketika partai-partai politik Islam disibukkan dengan kasus perpecahan antar faksi, pengalihan identitas sebagai pemilih muslim mudah diubah oleh kelompok politik pemodal. Fenomena klientelisme di level nasional dan praktek broker politik telah memuluskan langkah kandidat bermodal uang dan jaringan broker yang dikemas dalam bentuk agama, etnis dan wilayah Indonesia (Aspinall, 2014; Aspinall & As'ad; Robet, 2019; Aspinall & Berenschot, 2019).

Tercerabutnya relasi antara ummat Islam dengan partai politik Islam di Maluku Utara adalah fenomena fragmentasi partai dan memburuknya ikatan ideologs dan identitas Islam antara partai dan konstituen berbasis Islam. Fenomena ini juga dapat menjelaskan salah satu partai Islam telah gagal dan kehilangan legitimasi melalui hasil pemilu 2019 tanpa kursi perwakilan di DPRD Provinsi Maluku Utara. Hal ini membuktikan hasil penelitian sebelumnya Fakta (Noor, 2016), yang menjelaskan perpecahan internal PPP dan dampak fragmentasi terhadap kepemimpinan ummat yaitu (1) kurangnya sistem internal, yang seiring waktu menciptakan kurangnya otoritas di dalam partai, dan termasuk tidak adanya lembaga yang terlegitimasi kuat atau tidak adanya figur/patron yang kuat; (2) kurangnya berbagai ikatan ideologis yang pada gilirannya mempromosikan pragmatisme individu yang menjadi landasan paling penting dari sikap politik, tujuan dan hubungan dalam PPP; yang ketiga adalah kepentingan eksternal, sebagai variabel intervening yang sebenarnya bisa dihindari jika Partai telah mengesampingkan dua faktor sebelumnya di tahap awal.

Demikian pula PKS dalam dinamika lokal Maluku Utara, strategi mobilisasi massa etnis dan agama pada pemilu yang didahului dengan penyediaan layanan kesejahteraan dan sosial hanya menghasilkan pemerintahan yang pragmatis. Siklus pragmatisme ini dapat membedakan dengan absennya partai politik Islam dalam 5 tahun terakhir dari masalah Ideologis akidah seperti dugaan pemurtadan Baptis/ permutadan Siswa di Morotai dan Prostitusi online. Pola ini tidak berbeda jauh dengan beberapa fakta di level nasional, agama sebagai motivasi kuat terhadap untuk ekspansi program kesejahteraan partai dan mendorong komitmen anggota untuk melayani komunitas Muslim, termasuk memupuk Identitas PKS dalam praktek klientelistik agama dan patronage sempit (Hamayotsu, 2015:171).

Klientelistik agama ini membangun jaringan patronase PKS di berbagai daerah melalui amal sosial, tetapi sesungguhnya tidak menghasilkan kemampuan badan amal Islam untuk memberikan bantuan secara efektif sesuai dengan tujuannya. Bahkan fungsionaris PKS pun diragukan mengatasi masalah akar kemiskinan di Indonesia. Patronage ini justru diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti korupsi, sogokan, dan gratifikasi (Latief, 2013).

5.6 Temuan dan Implikasi Teoritik tentang Faksionalisme

Hasil pembahasan ini juga membahas implikasi teoritik pada beberapa temuan penilaian teori yang digunakan sebagai pisau analisa. Temuan terdiri dari dukungan, penguatan, kritikan, penyempurnaan beberapa teori dan asumsi dalam dasar teori. Kesesuaian antara Teori dan praktek membutuhkan pembuktian melalui uraian sistematis. Uraian singkat ini sekurang-kurangnya menyebutkan beberapa temuan, kritikan dan implikasi teoritik.

Dalam mengungkapkan penyebab terjadinya faksionalisme terhadap PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara, keterlibatan aktor faksi, dan Dampak yang ditimbulkan terhadap partai politik dan masyarakat pada umumnya, penelitian disertasi ini menggunakan dua teori utama Boucek (2012) Tentang faktor penyebab faksionalisme, Bettcher (2005) tentang pengorganisasian dan motivasi faksi; dan Boucek (2009) tentang Dampak Faksionalisme dalam 3 wajah atau rute faksionalisme, disertasi ini merumuskan sebuah kebaruan penelitiannya (Novelty) pada temuan tentang faksionalisme partai politik Islam di level lokal, faktor yang paling dominan adalah keberhasilan maupun kesuksesan partai politik dalam pemilu dapat menyebabkan persaingan internal antar faksi.

Struktur penggunaan teori pertama menjelaskan tentang penyebab faksionalisme (1) Persaingan internal, (2) heterogenitas ideologi, (3) perebutan posisi kunci partai, dan (4) motivasi kesejahteraan Teori Boucek (2012); Teori kedua tentang pengorganisasian dan motivasi faksi (Faksi klientelisme patronase, faksi kepentingan, faksi kecenderungan, dan faksi prinsipil); teori ketiga tentang dampak faksionalisme (Faksi kooperatif, faksi kompetiti, dan faksi degenetarif). Tetapi dalam temuan terbaru, terjadi pergeseran tentang serangkaian awal hingga akhir penyebab faksionalisme PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara, sebagai berikut:

Tabel 5.11. Perbandingan Faksionalisme dan Kebaruan/Novelty

No.	Penyebab Faksionalisme Boucek	Kebaruan/Novelty tentang Penyebab awal mempengaruhi penyebab berkelanjutan dan Daur Politik Faksi
1.	SeKesuksesan partai dan persaingan internal.	Heterogenitas etnis mendorong perpecahan;
2.	Heterogenitas, konflik ideologi dan resiko Perpecahan	Motivasi kesejahteraan yang didominasi keluarga
3.	Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir	Perebutan posisi kunci partai yang destruktif demi keberlanjutan karir politik
4.	Motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu	kesuksesan atau kegagalan partai dalam pemilu telah mendorong semakin tingginya persaingan internal;
No	Pengorganisasian dan Motivasi Faksi dari paling Lemah Hingga yang Paling kuat menurut Bettcher	Kebaruan/Novelty tentang dominasi model Faksi yang paling lemah sampai kuat
1.	Klientalisme/Patronage	Kepentingan yang kuat pada tipe pemburu rente seperti Faksi Pengusaha PAN
2.	Kepentingan	Klientalisme/Patronage yang kuat dalam Pilgub pada Faksi Pragmatis PKS
3.	Kecenderungan	-
4.	Prinsipil	-

No.	Dampak Faksionalisme yang paling baik hingga terburuk	Kebaruan/Novelty
1.	Kooperatif	Kooperatif semu/Pseudo Cooperative faction pada faksi Idealis PKS
2.	Kompetitif	Siklus Negatif-Positif-Negatif pada PAN untuk seluruh faksi
3.	Degeneratif	Degeneratif Parsial berbasis struktur dan berdasarkan Zona politik Daerah Pemilihan dalam Pemilu pada PPP

Dari komparasi tabel tersebut di atas telah memperlihatkan perbedaan antara teori terdahulu dengan temuan kebaruan (novelty). Heterogenitas etnik yang memiliki kekuatan yang hampir berimbang telah mempengaruhi ideologi partai. Pelibatan Etnis Makian, Tobelo, Galela, Tidore dan Sula dalam kepentingan etnis yang dominan dan majemuk itu telah mendorong polarisasi aktor di internal partai politik Islam. Aktor politik Islam yang mengendalikan partai politik telah kehilangan identitas Islam, lebih bertindak pragmatis dan cenderung menggunakan etnis sebagai nilai tawar.

Elite partai dalam kelompok terkecil seperti faksi keluarga Kasuba (PKS) dan Hanafi (PPP) adalah tipikal patronase etnik yang solid, sedangkan faksi Pengusaha dikendalikan keluarga Bopeng (PAN) adalah modalitas uang. Politik Familisme PKS mampu memobilisasi basis etnis, patronase modalitas yang dikuasai melalui jabatan Gubernur dan Bupati, dan jaringan kuat partai pengusaha dengan pemerintah pada PPP dan PAN. Temuan

lainnya kasus kegagalan partai politik Islam di Maluku Utara semakin meningkatkan konflik persaingan internal, sebenarnya berbeda dari keumuman teori sebelumnya tentang “semakin suksesnya partai dalam pemilu akan mendorong persaingan internal”. Kegagalan PPP dalam pemilu 2014, PAN dalam Pilgub 2007 dan 2014 maupun kegagalan PKS pada Pilgub 2018 tetap tidak menyurutkan tensi persaingan internal di pemilu 2019.

Temuan lainnya tentang dominannya keterlibatan faksi patronase keluarga, etnis dan modalitas uang mewarnai perebutan posisi kunci partai terutama ketua partai dan lingkaran sekitarnya. Ketua partai adalah magnet politik bagi semua faksi karena kepemimpinan partai sebagai sumber legitimasi kuat dan nilai tawar yang besar bagi pencari kekuasaan di setiap Pemilu dan Pilgub di Maluku Utara. Pola persaingan faksi dalam klasifikasi ini didominasi faksi internal keluarga, antar keluarga dan antar etnis. Kasus Maluku Utara berbeda dengan keumuman Bettcher klasifikasi klientelisme yang lemah, justru lebih kuat dan solid dalam pengorganisasian faksi dan motivasi kesejahteraan. Klientelisme dan jaringan patronase berlangsung dominan dan sangat pragmatis.

Temuan ini menggambarkan tentang merosotnya kekuatan PKS dan PPP, serta stagnannya kekuatan politik Islam modernis PAN dalam persaingan elektoral karena terjebak dalam pola pragmatism dan masih tetap mempertahankan kepentingan keluarga dalam partai. Dampaknya, berbagai problematika umat Islam yang bersentuhan dengan Syariah luput dari perhatian partai Islam. Sensifitas identitas partai Islam mulai memudar di level lokal seperti PKS dalam berkoalisi dengan Partai Demokrat mencalonkan Hendrata Tess, pengusaha Kaya Keturunan Cina-Non-Muslim di Kepulauan Sula dengan komposisi penduduk 90 persen Muslim. Temuan lainnya dampak

faksionalisme terhadap partai Islam berbeda dari keumuman teori Boucek karena tindakan pragmatisme berlaku pada ketiga partai yang terdampak. PKS solid dikategorikan sebagai faksi kooperatif semu, PAN sebagai kompetitif yang labil, dan PPP dalam faksi Degeneratif Parsial.

5.7 Komparasi Teori Boucek dan Bettcher dengan Novelty/Kebaruan

Menurut Teori Boucek (2012) bahwa *“semakin sukses partai politik dalam pemilu, akan semakin tinggi persaingan personal di internal partai politik”*. Sedangkan Temuan baru hasil penelitian ini justru memunculkan varian baru yang lebih beragam. **Temuan Pertama**, *semakin sukses dua orang politisi dari partai yang sama, etnis yang sama dan dari keluarga yang sama akan mendorong persaingan internal dan rivalitas berkelanjutan*, seperti Kasus Abdul Gani Kasuba dari faksi pragmatis Vs Muhammad Kasuba dari faksi idealis di internal PKS).

Temuan kedua, *rivalitas dan persaingan internal antara aktor politik yang sukses Vs aktor politik yang gagal pada Pemilu sebelumnya akan berdampak pada rivalitas dan persaingan internal di pemilu berikutnya*. Temuan ini pada kasus Muhammad Kasuba, Caleg DPR RI dan Putra kandungnya Bassam Kasuba, caleg DPRD provinsi tidak terpilih pada Pemilu 2019. Temuan lainnya juga dapat ditemukan pada kasus rivalitas Bassam Kasuba (Putra Muhammad Kasuba) Vs Bahrain Kasuba menjelang Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan pada Pilgub 2020.

Temuan ketiga, *ketika partai semakin gagal dalam pemilu, semakin mempertajam munculnya persaingan internal*. Kasus ini dapat ditemukan rivalitas Ridwan Tjan (faksi konservatif) Vs Salim Khalik (faksi pembaharuan) pada daerah pemilihan Ternate-Halmahera Barat.

Temuan Keempat, *gagalnya partai dalam pemilu tidak akan menyurutkan persaingan internal antar faksi dalam memberikan dukungan politik berbeda terhadap kandidat Kepala daerah.* Faksi konservatif memberi dukungan pada pasangan calon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar, faksi pembaharuan memberi dukungan pada pasangan Burhan Abdurrahman-Ishak Djamaludin pada Pilgub 2018.

Temuan Kelima, *bahwa semakin gagal partai dalam pemilu justru semakin memperkuat perebutan posisi kunci seperti ketua partai dan dan jabatan strategis lainnya.* kasus ini ditemukan pada pola perebutan posisi kunci ketua parta di PPP dan PAN. **Temuan Keenam**, *bahwa keterbatasan sumberdaya partai tidak menyurutkan faksi dalam perebutan posisi kunci partai dan persaingan internal.* Kasus ini dapat dilihat pada faksi di PPP, dan faksi ideologis di PAN dan kasus faksi idealis di PKS.

Teori Boucek tidak menekankan faktor mana yang paling dominan muncul sebagai penyebab terjadinya faksionalisme, sedangkan pada kebaruan/Novelty hasil penelitian ini ditemukan bahwa *“persaingan internal lebih dominan memicu faksionalisasi internal partai dan mempengaruhi terhadap peta pengelompokan heterogenitas etnis, motivasi sumberdaya, dan perebutan posisi kunci terbatas.”* Dampaknya, *Pemenang dari persaingan internal lebih mudah mengontrol perbedaan ideologi dan heterogenitas etnis, lebih mudah mengendalikan sumberdaya partai dan pemerintahannya dan memiliki akses yang terbuka dalam mendapatkan kursi ketua partai.*

Temuan baru lainnya ditemukan pada Model pengorganisasian Klientelistik Versi Bettcher dalam faksi digambarkan bahwa model didominasi aktor politik lebih individual, Geng Politik, Juntos, dan pengelompokan keluarga maupun kelompok Formal partai seperti legislator, kandidat,

pejabat, dan anggota partai. Faksi klientelisme dan patronase dianggap tidak tertata dengan baik, rentan runtuh dan lemah dalam pengelolaan organisasi faksi. Sedangkan hasil temuan penelitian ini menemukan makna baru bahwa ternyata *“model pengorganisasian faksi klientelisme justru jauh lebih kuat, solid dan kokoh dalam faksi pragmatisme PKS Maluku Utara.”* Meskipun polarisasi dalam keluarga Kasuba telah membentuk dua faksi pada Pilgub 2018, namun jaringan patronase Abdul Gani Kasuba justru lebih solid, kokoh dan teruji sejak pilgub 2007, 2014 dan 2018. *Kedua*, munculnya varian baru faksi klientelisme yang lebih bersifat lokal pada tokoh politik Islam meskipun dilatarbelakangi karakter sebagai muslim terdidik.